

**STRATEGI PENGEMBANGAN PELABUHAN
PERIKANAN NUSANTARA DALAM
MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
NELAYAN**

(Studi Pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Kabupaten Trenggalek)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

ARIE DWI PURNOMO

NIM. 105030103111005



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2014**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MOTTO

“My parents are the greatest gift in a life.”

Orang tua kita adalah anugerah terbesar di dalam sebuah kehidupan

Anonim

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Dalam Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Kabupaten Trenggalek)

Disusun oleh : Arie Dwi Purnomo

NIM : 105030103111005

Fakultas : Ilmu Administrasi

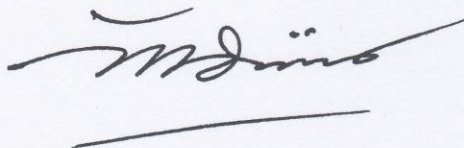
Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 7 Juli 2014

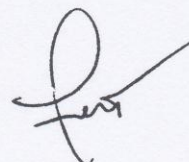
Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Mardiyono, MPA
NIP. 19520523 197903 1 000

Anggota



Farida Nurani, S.Sos, M.Si
NIP. 19700721 200501 2 001

TANDA PENGESAHAN

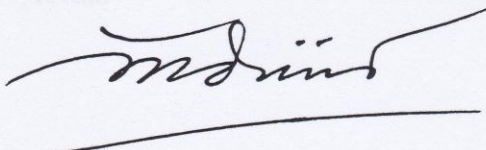
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 3 Juli 2014
Jam : 09.00 – 10.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Arie Dwi Purnomo
Judul : Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Dalam Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Kabupaten Trenggalek)

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua



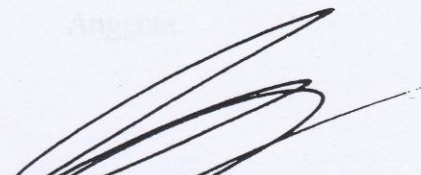
Dr. Mardivono, MPA
NIP. 19520523 197903 1 000

Anggota



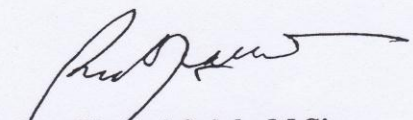
Farida Nurani, S.Sos, M.Si
NIP. 19700721 200501 2 001

Anggota



Prof. Agus Suryono, MS
NIP. 19521229197903 1 003

Anggota



Dr. Chairul Saleh, M.Si
NIP. 19600112 198701 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur jiplakan saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang diperoleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 9 Juni 2014

Mahasiswa



Nama : ARIE DWI PURNOMO

NIM : 105030103111005

RINGKASAN

Arie Dwi Purnomo, 2014, **Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Dalam Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Nelayan** (Studi Pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Kabupaten Trenggalek), Dr. Mardiyono, MPA, Farida Nurani, S.Sos, M.Si, 149 Hal + xv.

Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan potensi sumber daya alam laut yang dapat dimanfaatkan sebagai pendorong perekonomian nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat nelayan. Namun pada kenyataannya potensi SDA laut masih belum dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena sebagian besar potensi SDA laut Indonesia masih dikuasai oleh perusahaan perikanan skala kecil dengan kapal ukuran <30 GT dan rendahnya kualitas nelayan yang ada yang menyebabkan kurangnya kesejahteraan pada masyarakat. Oleh karena itu keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, diharapkan mampu untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat nelayan dan mampu mengubah nelayan menjadi nelayan yang berkualitas dan memiliki daya saing.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat nelayan serta melihat upaya nyata yang telah maupun yang akan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menganalisis faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam melaksanakan strategi pengembangan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan untuk analisis data lapangan menggunakan analisis interaktif yang dikombinasikan dengan Analisis SWOT untuk melihat bagaimana strategi yang dilakukan.

Hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa strategi pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang telah dilakukan memberikan pengaruh perubahan terhadap pola pikir masyarakat yang mulai terbuka serta meningkatnya keberdayaan masyarakat nelayan akan tetapi tidak menunjukkan perubahan yang signifikan pada masyarakat nelayan. Berdasarkan Analisis SWOT ditemukan bahwa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dalam strategi pengembangannya mendukung kebijakan – kebijakan pertumbuhan agresif.

Saran yang direkomendasikan perlu peningkatan peran dalam pengawasan hasil perikanan dan manajemen rantai dingin, menambah petugas penyuluh perikanan, meningkatkan nilai investasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan sektor perikanan, mengoptimalkan informasi perikanan, menciptakan iklim usaha serta pekan nasional untuk masyarakat nelayan.

Kata Kunci: Strategi, Pengembangan, keberdayaan

SUMMARY

Arie Dwi Purnomo, 2014, The Developmental Strategy of Nusantara Prigi Fishery Harbor to Improve The Empowerment of Fisher Community (Study at The Office of Nusantara Prigi Fishery Harbor of Trenggalek District), Dr. Mardiyono, MPA, Farida Nurani, S.Sos, M.Si, 149 pages + xv.

Indonesia is a maritime country with the largest number of islands in the world. It is enriched with marine natural resources which must be a meaningful support to national economic, especially to improve the welfare of community, respectively for fisher community. In reality, however, natural resources in the sea are not well managed for the improvement of community welfare because most of these resources are dominated by small scale fishery enterprises which usually uses <30 GT boat. Low quality of management from traditional fisher only leads to the deprivation of their welfare. Therefore, the presence of Nusantara Prigi Fishery Harbor is expected to improve the empowerment of fisher community and to change them into having more quality and competitive edge.

The objectives of research are as following: to describe and to analyze the developmental strategy of Nusantara Prigi Fishery Harbor to improve the empowerment of fisher community; to illustrate what action has been taken to improve fisher welfare; and to analyze the factors of strength, weakness, opportunity and threat during developmental strategy. Research method is descriptive with qualitative approach. Data source includes primary and secondary data. Data analysis is using interactive analysis combined with SWOT to see how strategy is implemented.

Result of research has found that the developmental strategy of Nusantara Prigi Fishery Harbor can influence community point of view to be more opening to any inputs and improve the empowerment of fisher community but without any significant changes in fisher community. The analysis of SWOT has indicted that the developmental strategy of Nusantara Prigi Fishery Harbor has supported aggressive growth policies.

It is recommended that the extent to which fishery haul and cold-chain management are monitored shall be improved. The number of counseling officer for fishery must be increased. Investment value and organizational capacity at fishery sector needs to be maximal. Fishery information shall be optimally delivered to create favorable business climate. National weekend for fisher community may be one solution for that.

Keywords: Strategy, Developmental, Empowerment

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Dalam Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Kabupaten Trenggalek)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik dan Bapak Mohammad Said, S.Sos, MAP selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik.
4. Bapak Dr. Mardiyono, MPA dan Ibu Farida Nurani, S.Sos, M,Si selaku dosen pembimbing yang selalu setia membimbing dan memotivasi penulis serta memberikan masukan sampai tulisan ini bisa terselesaikan.

5. Bapak Dr. Mardiyono, MPA, Ibu Farida Nurani, S.Sos, M.Si, Bapak Prof. Agus Suryono, MS dan Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si yang telah menguji dan memberikan saran perbaikan pada tulisan ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya dosen jurusan Administrasi Publik yang selama ini telah membimbing dan menularkan kajian keilmuannya kepada penulis selama proses perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
7. Kepala Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Bapak Hartono, SE. Kepala Bagian Pengembangan Ibu Ir. Rini Wahjoeningtias dan Kepala Tata Operasional Ibu Erawati Wulandari, S.Pi, MP serta seluruh pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang selama ini sangat membantu penulis untuk mendapatkan data dalam proses penelitian.
8. Teristimewa kepada orang tua tercinta Bapak Hartono dan Ibu Tumini yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk selalu semangat dalam menyelesaikan tugas akhir penulis. Serta doa yang selalu dikirimkan baik dalam keadaan suka maupun duka. Semuanya tanpa penulis sadari betapa besar pengorbanan Ayah dan Ibu.
9. Teman seperjuangan MAFIA angkatan 2010 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selama ini selalu membantu dan menemani penulis untuk diskusi baik dalam suasana suka maupun duka.
10. Terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penulisan yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam tulisan ini.

Malang, Juni 2014

Penulis



DAFTAR ISI

| | Hlm. |
|---|-------------|
| JUDUL | i |
| MOTTO | ii |
| HALAMAN TANDA PERSETUJUAN | iii |
| TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS | v |
| RINGKASAN | vi |
| <i>SUMMARY</i> | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Kontribusi Penelitian | 11 |
| E. Sistematika Penulisan | 12 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan | 14 |
| 1. Definisi Administrasi Publik | 14 |
| 2. Definsi Adminsistrasi Pembangunan | 16 |
| 3. Konsep Pembangunan | 19 |
| (a) Nilai – Nilai Pembangunan | 20 |
| (b) Tipe – Tipe Pembangunan | 21 |
| (c) Unsur Pembangunan | 21 |
| (d) Tujuan Pembangunan | 22 |
| (e) Sasaran Pembangunan | 23 |
| B. Teori Peran | 24 |
| 1. Kedudukan | 24 |
| 2. Peranan | 26 |
| C. Konsep Strategi | 27 |
| 1. Pengertian Strategi | 27 |
| 2. Tingkatan – Tingkatan Strategi | 29 |
| 3. Tipe – Tipe Strategi | 30 |
| 4. Manajemen Strategik | 31 |
| 5. Dimensi – Dimensi Manajemen Strategik | 34 |
| D. Konsep Kesejahteraan | 37 |
| 1. Pengertian Kesejahteraan Sosial | 37 |
| 2. Tujuan Kesejahteraan Sosial | 39 |



| | |
|---|----|
| 3. Fungsi Kesejahteraan Sosial | 42 |
| E. Pemberdayaan | 43 |
| 1. Konsep Pemberdayaan | 43 |
| 2. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan | 49 |
| F. Pelabuhan Perikanan | 51 |
| 1. Pengertian Pelabuhan | 51 |
| 2. Pengertian Pelabuhan Perikanan Nusantara | 51 |
| 3. Fungsi Pelabuhan Perikanan | 52 |
| 4. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan | 52 |
| 5. Fasilitas Pelabuhan Perikanan | 55 |
| G. Masyarakat Nelayan | 56 |

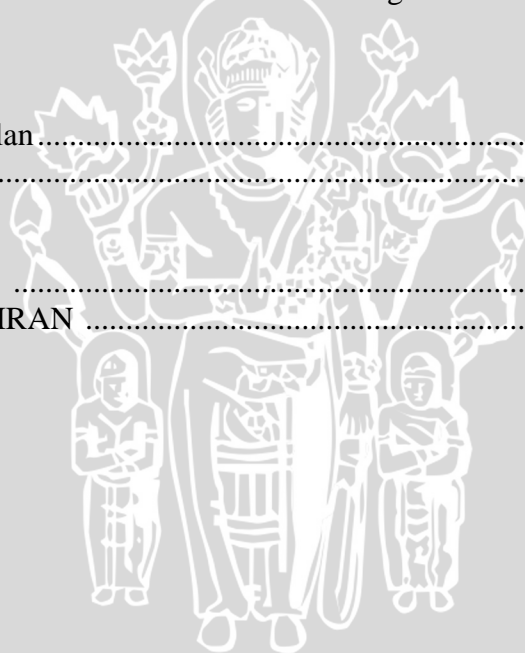
BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian | 60 |
| B. Fokus Penelitian | 61 |
| C. Lokasi dan Situs Penelitian | 62 |
| D. Jenis Sumber Data | 63 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 64 |
| F. Instrumen Penelitian | 65 |
| G. Analisis Data | 66 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|-----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 72 |
| 1. Letak Geografi dan Topografis Desa Tasikmadu – Trenggalek | 72 |
| (a) Kondisi Sosial Masyarakat Desa Tasikmadu | 76 |
| (b) Potensi Kegiatan Perikanan | 80 |
| 2. Gambaran Umum Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi | 84 |
| (a) Kedudukan dan Fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi | 85 |
| (b) Dasar Hukum | 87 |
| (c) Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi | 88 |
| (d) Jumlah Pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi | 89 |
| B. Penyajian Data..... | 90 |
| 1. Peran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Terhadap Nelayan | 90 |
| 2. Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi | 102 |
| (a) Peningkatan Sumber Daya Manusia | 111 |
| (b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi | 115 |

| | |
|---|-----|
| 3. Faktor – Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Dalam Startegi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi | 119 |
| (a) Faktor Pendukung | 120 |
| (b) Faktor Penghambat | 124 |
| C. Analisis Data | 129 |
| 1. Peran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Terhadap Nelayan | 129 |
| 2. Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi | 138 |
| (a) Peningkatan Sumber Daya Manusia | 142 |
| (b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi | 145 |
| 3. Analis Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Dalam Startegi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi..... | 152 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 159 |
| B. Saran | 161 |
| DAFTAR PUSTAKA | 164 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | 167 |

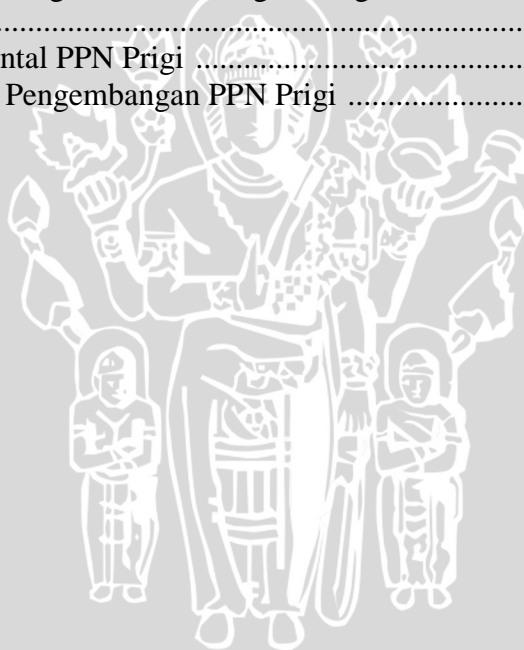


DAFTAR TABEL

| No | Judul | Hlm. |
|----|--|------|
| 1 | Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2009 – 2013 | 6 |
| 2 | Jumlah Armada Berdasarakan Ukuran Kapal dan Jenis Alat Tangkap | 8 |
| 3 | Frekuensi kunjungan Kapal Tahun 2009 – 2013 | 8 |
| 4 | Matrik SWOT | 70 |
| 5 | Populasi Penduduk Desa Tasikmadu Berdasarkan Jenis Kelamin | 77 |
| 6 | Jumlah Populasi Penduduk Desa Tasimadu Berdasarkan Usia Produktif | 78 |
| 7 | Jumlah Populasi Penduduk Desa Tasimadu Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 79 |
| 8 | Jumlah Populasi Penduduk Desa Tasimadu Berdasarkan Pekerjaan | 80 |
| 9 | Jumlah Nelayan Menurut alat tangkap PPN Prigi 2009 – 2013 | 81 |
| 10 | Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2009 – 2013 | 82 |
| 11 | Pendaratan Ikan di PPN Prigi Tahun 2009 – 2013 | 83 |
| 12 | Jenis Ikan Terbanyak di PPN Prigi Tahun 2013 | 84 |
| 13 | Perkembangan Jumlah Pegawai Tahun 2009 - 2013 | 90 |
| 14 | Kelompok Pengolah Hasil Perikanan | 97 |
| 15 | Jumlah Uang Beredar di PPN Prigi Tahun 2013 | 101 |
| 16 | Peranan PPN Prigi Terhadap Masyarakat Nelayan | 137 |
| 17 | Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Ppn Prigi Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia | 144 |
| 18 | Pengembangan Sarana Dan Prasarana PPN Prigi | 150 |
| 19 | Kerangka Analisis SWOT | 153 |
| 20 | IFAS | 154 |
| 21 | EFAS | 155 |
| 22 | Matrik SWOT | 158 |

DAFTAR GAMBAR

| No | Judul | Hlm. |
|----|---|------|
| 1 | Komponen – Komponen Analisis Data: Model Interaktif | 68 |
| 2 | Diagram Analisis SWOT | 69 |
| 3 | Peta Administratif Kabupaten Trenggalek | 73 |
| 4 | Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi | 85 |
| 5 | Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun Anggaran 2013 | 89 |
| 6 | Gambar Rencana Jangka Pendek Pengembangan Pelabuhan Perikanan Prigi | 106 |
| 7 | Gambar Rencana Jangka Menengah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Prigi | 107 |
| 8 | Gambar Rencana Jangka Pendek Pengembangan Pelabuhan Perikanan Prigi | 107 |
| 9 | Diagram Titik Sental PPN Prigi | 136 |
| 10 | Diagram Strategi Pengembangan PPN Prigi | 156 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia baik dari segi luas wilayah maupun jumlah pulau yang dimiliki. Indonesia memiliki pulau sekitar 17.502 dan garis pantai sepanjang 81.000 Km dengan luas wilayah perikanan laut sekitar 5,8 juta Km², yang terdiri dari perairan kepulauan dan territorial dengan luas 3,1 juta Km² serta perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 juta Km². (Emil. et al, 2013). Dengan luas wilayah perairan yang dimiliki oleh Indonesia menunjukkan bahwa sumber daya laut Indonesia melimpah dan berpotensi untuk kegiatan perekonomian di sektor perikanan. Berdasarkan hasil pengkajian Badan Riset Kelautan dan Perikanan yang berkerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang menyebutkan potensi sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,410 juta ton per tahun, yang terdiri dari perairan wilayah laut teritorial sekitar 4,652 juta ton per tahun dan perairan ZEEI sekitar 1,785 juta ton pertahun (Emil. et al, 2013:57). Berdasarkan hasil pengkajian Badan Riset Kelautan dan Perikanan yang bekerjasama dengan LIPI, menunjukkan bahwa potensi sumber daya laut Indonesia sangat berlimpah yang dapat dimanfaatkan sebagai pendorong perekonomian Indonesia untuk masa yang akan datang.

Berkaitan dengan itu, prospek pengelolaan pemanfaatan sumberdaya perikanan Indonesia menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang strategis dinilai sangat cerah terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

khususnya nelayan, penyediaan lapangan kerja, Penerimaan devisa melalui ekspor dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (Hutabarat (2010) yang dikutip oleh Emil. *et al*, 2013:57).

Berdasarkan pernyataan diatas menjelaskan bahwa sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu sumber pendapatan devisa masih diharapkan oleh Indonesia sebagai tumpuhan perekonomian nasional dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Hal ini berdasarkan hasil penelitian Barani (2004), yang menyebutkan bahwa terdapat peningkatan produksi sektor perikanan tangkap dari tahun ketahun.

Produksi sektor perikanan tangkap mengalami kenaikan rata – rata sebesar 5,51% yaitu dari 4.276.720 ton pada tahun 2001 menjadi 4.728.320 ton pada tahun 2003. Volume dan nilai ekspor rata – rata meningkat masing – masing sebesar 19,615% dan 11,92%. Volume ekspor pada tahun 2001 sebesar 487.117 ton dengan nilai 1.631.899.000 US\$ mengalami peningkatan pada tahun 2003 menjadi 6960290 ton dengan nilai 2.004.067.000 US\$. Demikian pula dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perikanan tangkap mengalami kenaikan dari Rp.4,033 milyar pada tahun 2001 menjadi Rp.355,720 milyar pada tahun 2003. Barani (2004) yang dikutip oleh Purwanti (2010:1).

Secara nasional peran dan tanggung jawab pembangunan perikanan telah ditunjukkan dengan adanya kenaikan volume produksi perikanan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun demikian, pengembangan perikanan tangkap sampai saat ini masih belum memberikan kesejahteraan yang memadai. (Purwanti, 2010:2). Dikarenakan potensi dan kekuatan ekonomi yang ada pada sektor perikanan masih belum mampu dikelola dengan baik untuk memberikan kontribusinya terhadap pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta pada khususnya kepada masyarakat nelayan. Hingga saat ini yang terjadi pada perusahaan sektor perikanan Indonesia

sebagian besar masih dikuasai oleh masyarakat nelayan tradisional dengan skala pengusahaannya yang kecil, yang mengakibatkan potensi ekonomi yang ada pada sektor perikanan masih belum mampu untuk dikelola dengan optimal oleh pengusaha sektor perikanan tangkap yang ada di Indonesia.

Propinsi Jawa Timur memiliki wilayah perairan dengan luas 208.138 Km² yang meliputi Selat Madura, Laut Jawa, Selat Bali dan Samudra Indonesia dengan panjang garis pantai sepanjang 1.900 Km, merupakan salah satu sentra kegiatan ekonomi yang menghubungkan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia (Lukito, 2008). Pada wilayah pesisir selatan perairan Jawa Timur, umumnya memiliki kontur pantai yang terjal dan berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia. Dengan luas laut sekitar 142.560 Km² yang termasuk dalam ZEEI, memiliki panjang garis pantai ± 800 Km yang menyimpan banyak potensi sumber daya alam laut yang melimpah (Lukito, 2008).

Salah satu wilayah perairan yang ada di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Trenggalek yang terletak diperairan selatan Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Kabupaten Trenggalek memiliki 3 Kecamatan yang tertelak di wilayah pesisir yaitu Kecamatan Watulimo, Munjungan, dan Panggul. Wilayah pesisir Kabupaten Trenggalek memiliki potensi sumber daya alam yang beragam diantaranya, potensi tambang, hutan, perkebunan, pertanian, wisata alam dan perikanan (Kabupaten Trenggalek, 2009). Kabupaten Trenggalek memiliki luas perairan 35.558 Km² dan perairan ZEEI dengan garis pantai sepanjang 96 Km serta didukung dengan keberadaan Pelabuhan Perikanan, yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (PPN Prigi).

Selain Pantai Prigi, Kabupaten Trenggalek juga memiliki Kawasan nelayan yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai kawasan industri perikanan, kawasan tersebut adalah Pantai Munjungan dan Pantai Panggul (RPJBD Kabupaten Trenggalek, 2005 – 2025).

Telah disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia baik dari segi luas wilayah maupun jumlah pulau yang dimiliki, serta $\frac{2}{3}$ wilayah Indonesia berupa perairan laut. Berdasarkan hal tersebut “keberadaan pelabuhan perikanan menjadi penunjang untuk pembangunan perikanan nasional” (Beni. *et al*, 2012:152). Menurut Lubis (2000) yang dikutip oleh (Beni. *et la*, 2012) menyebutkan bahwa dalam usaha menunjang produksi perikanan laut, ketersediaan prasarana pelabuhan perikanan mempunyai arti penting. Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan yang menjadi pusat kegiatan penangkapan sumber daya ikan, penanganan dan pengolahan hasil produksi tangkapan serta pemasaran hasil tangkapan.

Pelabuhan perikanan merupakan kawasan yang strategis bagi pengembangan sektor industri perikanan tangkap. Pembangunan pelabuhan perikanan yang berada pada suatu daerah merupakan embrio atau pusat bagi pembangunan perekonomian di suatu daerah pelabuhan perikanan tersebut berada. Pentingnya pembangunan pelabuhan perikanan pada kegiatan sektor perikanan telah cukup jelas, yakni sebagai tempat berlabuh kapal perikanan dan tempat melakukan kegiatan bongkar muat kapal perikanan. Fungsi pelabuhan perikanan sendiri sangat luas. Seperti fungsi pelabuhan perikanan yang harus mampu mendorong terjadinya kegiatan perekonomian masyarakat nelayan disekitar

kawasan pelabuhan perikanan. Keberhasilan dalam pengembangan, pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan serta optimalisasi dalam operasionalnya merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari pembangunan perikanan tangkap (Suherman (2010) yang dikutip oleh Beni *et. La* (2012)).

PPN Prigi selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna – pengguna hasil tangkapan, baik pengguna langsung maupun tidak langsung seperti: pedagang, pabrik pengolah ikan, restoran dan lain – lain, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar PPN Prigi. Pelabuhan Perikanan Nusantara yang berfungsi dengan baik akan menguntungkan bagi kegiatan perekonomian di laut dengan kegiatan perekonomian di darat.

Kegiatan sektor perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Trenggalek tidak terlepas dari adanya pengusaha sektor perikanan. Yakni nelayan sebagai pengelola dari sektor perikanan di laut. Pada dasarnya pengusaha sektor perikanan tangkap di Indonesia masih dikelola oleh pengusaha sektor perikanan dengan skala kecil. Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Trenggalek, yang lebih tepatnya berada di Kawasan pesisir Pantai Prigi.

Kawasan pesisir Pantai Prigi, merupakan kawasan perairan yang luas di Kabupaten Trenggalek. Permasalahan yang ada pada sektor perikanan yang ada di Kabupaten Trenggalek ini adalah sebagian besar belum berdayanya masyarakat nelayan serta rendahnya kualitas masyarakat nelayan dalam melakukan pengusaha sektor perikanan tangkap dengan baik. Yang mengakibatkan kurang

optimalnya pemanfaatan sektor perikanan tangkap yang dilakukan oleh masyarakat nelayan. Serta mempengaruhi perkembangan produksi sektor perikanan pada setiap tahunnya.

Kegiatan sektor perikanan masyarakat nelayan Pantai Prigi yang dicatat di PPN Prigi, berdasarkan hasil laporan statistik PPN Prigi mulai dari tahun 2008 – 2012. Perkembangan Produksi Perikanan dan Frekuensi Kunjungan Kapal, yang mana pada kegiatan perikanan mengalami pasang surut pada setiap tahunnya. Berikut tabel Kegiatan perikanan di Kabupaten Trenggalek berdasarkan laporan statistik PPN Prigi, sebagai berikut.

Tabel 1. Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2009 - 2013

| No. | Tahun | Volume (Kg) | Keterangan |
|-----|-------|-------------|--------------|
| 1 | 2008 | 23.571.671 | - |
| 2 | 2010 | 7.676.236 | Turun 67.43% |
| 3 | 2011 | 40.896.857 | Naik 432.77% |
| 4 | 2012 | 36.735.488 | Turun 10.18% |
| 5 | 2013 | 30.509.213 | Turun 20.41% |

Sumber: laporan statistik Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 produksi perikanan yang didaratkan adalah 30.509.213 kg atau 83.856 kg/hari. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 maka jumlah produksi perikanan tahun 2013 mengalami penurunan 20.41% atau 6.226.275 kg. penurunan ini disebabkan karena musim penangkapan ikan tahun 2013 lebih singkat dibanding 2012. Yakni hanya dari bulan Agustus sampai dengan Nopember sedangkan tahun 2012 musim penangkapan ikan terjadi bulan Juli sampai dengan Desember.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada tabel perkembangan produksi perikanan pada setiap tahunnya perkembangan jumlah produksi perikanan

mengalami fluktuasi jumlah tangkapan. Hal ini disebabkan karena masyarakat nelayan tergantung dengan musim dan kondisi cuaca yang ada. Yang berarti masyarakat nelayan memiliki keterbatasan dalam melakukan penangkapan perikanan. Hal ini juga disebabkan kurang berdayanya masyarakat nelayan dalam mengantisipasi musim dan kondisi cuaca yang terjadi.

Selain kurang berdayanya masyarakat nelayan dan rendahnya kualitas masyarakat nelayan. Permasalahan dalam pengembangan sektor perikanan adalah kurangnya armada perikanan yang mampu menembus ZEEI. Selama ini armada perikanan yang ada di pesisir Pantai Prigi masih berukuran dengan kapasitas < 30 GT, sehingga armada yang ada belum mampu untuk menembus ZEEI yang sudah dipastikan bahwa pada zona tersebut hasil perikanannya melimpah. Selama ini armada perikanan hanya mampu menembus perairan pantai di beberapa perairan kabupaten terdekat dengan hasil tangkapan perikanan yang kurang optimal.

Sebagai mana yang telah dijelaskan diatas bahwa jumlah armada yang ada di pesisir Pantai Prigi masih berukuran <30 GT. Jumlah kunjungan kapal pada tahun 2013 di PPN Prigi adalah 22.095 kali. Ini berarti mengalami penurunan 931 kali bila dibandingkan tahun 2012 sebanyak 23.026 kali. Dari 674 unit armada kapal perikanan yang ada jumlah terbanyak adalah berukuran dari 10 GT yaitu 292 unit atau 43.32 % kemudian ukuran 10 < 20GT sebanyak 100 unit atau 14.84% dan ukuran 20 - <30 GT sebanyak 282 unit 41.84%. Berikut tabel frekuensi kunjungan kapal di PPN Prigi Tahun 2009 sampai 2013.

Tabel 2. Jumlah Armada berdasarkan Ukuran Kapan dan Jenis Alat Tangkap

| No | Tahun | GT | Jumlah Armada | Jenis Alat Tangkap |
|----|-------|--------------|---------------|--------------------|
| 1 | 2012 | < 10 GT | 292 | 627 |
| | | 10 - < 20 GT | 126 | 126 |
| | | 20 - < 30 GT | 304 | 152 |
| | | Jumlah | 722 | 905 |

Sumber: laporan statistik Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2013

Tabel 3. Frekuensi Kunjungan Kapal Tahun 2009 – 2013

| No | Jenis Kapal | Jumlah Kunjungan Kapal (kali) | | | | |
|----|--------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Perahu tanpa motor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | < 10 GT | 6.304 | 6.535 | 6.323 | 6.698 | 9.044 |
| 3 | 10 - < 20 GT | 2.998 | 2.410 | 2.319 | 1.378 | 2.272 |
| 4 | 20 - < 30 GT | 11.948 | 5.344 | 14.435 | 14.950 | 10.779 |
| 5 | Jumlah | 21.250 | 14.289 | 23.077 | 23.026 | 22.095 |

Sumber: laporan statistik Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan kapal yang terbanyak tahun 2013 adalah dari jenis kapal berukuran 20 – 30 GT yaitu sebanyak 10.779 kali atau sebesar 48.78% dari total kunjungan, sedangkan yang paling sedikit adalah kunjungan dari kapal berukuran 10 - < 20 GT yaitu sebanyak 2.272 kali atau 10.28% dari total kunjungan kapal.

Keterbatasan pengembangan sektor perikanan yakni disebabkan oleh kurangnya kualitas masyarakat nelayan serta belum memadainya armada perikanan dengan kapasitas besar. Hal ini yang menyebabkan terhambatnya pengembangan yang dilakukan pada sektor perikanan tangkap. Untuk meningkatkan produksi sektor perikanan tangkap perlu adanya peningkatan – peningkatan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang yang dimiliki oleh PPN

Prigi, serta pengembangan faktor – faktor lain seperti peningkatan kualitas SDM dari masyarakat nelayan. Upaya pengembangan dan peningkatan produksi sektor perikanan memerlukan strategi berupa kebijakan – kebijakan yang tepat untuk dapat mencapai pengembangan yang menjadi target dari pelabuhan perikanan. Maka dengan adanya penurunan produksi perikanan dan frekuensi kunjungan kapal, perlu adanya strategi di setiap pelabuhan perikanan khususnya pada PPN Prigi agar memiliki arah yang jelas untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan dari pelabuhan perikanan tersebut. Karena tuntutan waktu, strategi semakin diperlukan untuk mengembangkan *competitive advantage* sehingga pelabuhan perikanan tidak hanya bertahan tetapi bisa memenangkan persaingan untuk kedepannya, yang akan munculnya persaingan dalam pelabuhan perikanan secara nasional.

Keberhasilan pengembangan sektor perikanan tidak terlepas dari dukungan prasarana pendukungnya dimana dalam hal ini adalah pelabuhan perikanan. Pengembangan sarana prasaran penunjang perikanan tangkap pada pelabuhan perikanan bertujuan untuk mendukung peningkatan produksi perikanan secara terpadu dan bersinergi dengan unit pengolahan di darat yang berorientasi pasar domestik dan luar negeri, (Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Tahun 2012:1).

PPN Prigi dengan Visi dan Misi serta *Grand Strategy (The Blue Revolusioon Policies)* Kementrian Kelautan dan Perikanan, yang merupakan tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan. Maka PPN Prigi pada tahun 2012 telah terdapat pembangunan fisik fasilitas pelabuhan perikanan serta perbaikan sarana yaitu: (1) Perluasan tempat pengepakan ikan. (2) perluasan tempat penitipan kendaraan nelayan. (3) Perluasan kios tertutup sebagai mess operator sebanyak 4 unit. (4) Pembuatan *Bolder*. (5) Pembangunan garasi kendaraan dinas.

(6) Rehap dan Pemeliharaan beberapa fasilitas di pelabuhan seperti peningkatan lantai dermaga, peningkatan tempat penitipan kendaraan nelayan TPI barat, peningkatan area parkir kendaraan pengangkut ikan. Serta pada tahun 2013 PPN Prigi juga melakukan pembangunan fasilitas fisik dan pemeliharaan berupa (1) Pembangunan jembatan *Jetty*. (2) Pembangunan lampu *solar cell*. (3) Peningkatan Jalan Masuk Kawasan Pelabuhan. (4) Pembangunan gedung syahbandar. (5) Pemeliharaan beberapa fasilitas pelabuhan, seperti: pemeliharaan *cold storage*, tangga tower air, instalasi air dan listrik. Dimana pembangunan fasilitas fisik dan pemeliharaan ditunjukan untuk mengoptimalkan peranan PPN Prigi terhadap masyarakat nelayan di Pesisir Prigi.

Dari uraian diatas PPN Prigi telah melaksanakan pengembangan pelabuhan, berupa pembangunan seta perbaikan sarana dan prasarana yang ada di PPN Prigi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dengan judul “**Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Dalam Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (PPN Prigi) Kabupaten Trenggalek)**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa perumusan masalah terkait Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sebagai berikut.

1. Bagaimanakah peran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi terhadap keberdayaan masyarakat nelayan?
2. Bagaimanakah strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat nelayan?
3. Bagaimana analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap strategi pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat nelayan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi terhadap keberdayaan masyarakat nelayan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat nelayan.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - (a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan atau sumber informasi bagi pihak lain yang akan melakukan

penelitian lebih lanjut tentang strategi pengembangan pelabuhan perikanan nusantara.

- (b) Sebagai bahan kajian dan menambah wacana keilmuan bagi pengembangan ilmu administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

- (a) Diharapkan penelitaian ini memberikan wawasan dan gambaran bagi kalangan pemerintah dan pelaku (*stakeholder*) yang terlibat pada pelaksanaan pengembangan pelabuhan perikanan nusantara.
- (b) Dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai dasar, atau sebagai perbandingan bagi pelaksana penelitian lebih lanjut tentang strategi pengembangan pelabuhan perikanan dalam program selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan penelitian ini terdiri ke dalam beberapa sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematikan pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang garis besar teoritis yang menjadi dasar bagi penulis dalam memberikan alternatif solusi atas segala permasalahan yang ada di dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian, yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian dan situs penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi wilayah penelitian yang digunakan dengan mengemukakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, selanjutnya penyajian data dan tentang gambaran umum lokasi penelitian serta menginterpretasikan data tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang bab terakhir, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran – saran yang mungkin dapat penulis berikan atas adanya permasalahan – permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik dan Adminisnistrasi Pembangunan

1. Definisi Administrasi Publik

Konsep administasi publik yang ada di Indonesia pada dasarnya bukan suatu konsep yang baru, konsep administrasi publik tekah ada sejak dulu, hanya saja para pakar mengganti istilah administrasi publik menjadi administrasi negara.

Definisi administrasi publik menurut Chandler & Plano yang dikutip oleh Pasolong (2010: 7), menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditunjukkan untuk mengatur “*public affairs*” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan – perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Definisi administrasi publik lainnya juga dikemukakan oleh Marshall E Dimock, dkk yang dikutip oleh Pasolong (2010: 7), mengatakan bahwa administrasi publik adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Definisi lain tentang administrasi publik juga muncul dari pemikiran Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus yang dikutip oleh Pasolong (2010: 7), yang mendefinisikan administrasi publik meliputi:

(1) Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan perwakilan politik, (2) Koordinasi usaha – usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari – hari pemerintah. (3) Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan – kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik – teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro juga memberikan definisi administrasi publik, yang dikutip oleh Pasolong (2008: 8), mendefinisikan administrasi publik adalah:

- (1) Suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan, (2) Meliputi tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif dan hubungan diantara mereka, (3) Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan kerennanya merupakan sebagian dari proses politik, (4) Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat. (5) Dalam beberapa hal beberapa pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Pendapat lain terkait definisi administrasi publik muncul pada pemikiran Henry yang dikutip oleh Pasolong (2010: 8), mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi Publik berusaha melembagakan praktik – praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Sedangkan menurut pendapat David yang dikutip oleh Pasolong (2010: 8), menunjukkan bahwa administrasi publik merupakan pemanfaatan teori – teori dan proses – proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah dibidang legislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi – fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Dari beberapa definisi menurut para pakar administrasi publik di atas dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah suatu kerjasama pemerintah yang

dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang dalam lembaga yang melaksanakan tugas – tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

2. Definisi Admisnistrasi Pembangunan

Menurut Riggs (1986: 75). peristilahan administrasi pembangunan menunjuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan program – program atau proyek – proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan. Ungkapan peristilahan administrasi pembangunan dianalogikan dengan istilah seperti administrasi pertanian, administrasi pendidikan dan organisasi kesejahteraan sosial, yang masing – masing meliputi suatu yang terorganisir untuk melaksanakan program pertanian, pendidikan, dan program – program kesejahteraan sosial

Menurut Tjokroamidjojo (1995: 1) dalam bukunya “Pengantar Administrasi Pembangunan”, menyebutkan bahwa administrasi pembangunan belumlah diakui ataupun belum merupakan suatu disiplin ilmu yang telah berkembang. Dewasa ini perkembangan menuju ke arah itu terlihat dalam berbagai usaha dari para ahli dan penulis. Administrasi pembangunan yang diperkembangkan tersebut berasal dari disiplin ilmu yang mendahuluinya, yaitu administrasi negara.

Tjokroamijdojo (1995: 7), menyebutkan setidaknya terdapat empat kecenderungan yang mengarahkan administrasi negara kearah administrasi pembangunan, keempat kecenderungan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, perhatian administasi negara terhadap masalah – masalah pelakasnaan dan pencapaian tujuan – tujuan pembangunan. Penanggapan administrasi di sini ditunjukkan kepada pelaksanaan program – program substantif pembangunan termasuk proses perumusan kebijakan. Kedua,

dalam administrasi negara adalah pendekatan (*behavioral approach*). Didalam kecenderungan ini ditelaah sikap dan peranan birokrasi serta berbagai masalah hubungan manusia, seseorang atau kelompok dalam birokrasi. Disini juga dikembangkan penelaahan mengenai bagaimana keputusan diambil, bagaimana pengetahuan dikembangkan untuk meningkatkan *performance* tersebut. Ketiga, pendekatan manajemen dalam administrasi negara. Dalam pelaksanaan tugas administrasi negara menggunakan teknik – teknik kuantitatif dan analitis seperti *operation research, program, dan performance budgeting* dan lain – lain. Keempat, studi komparatif ilmu administrasi negara yang memberikan tekanan kepada ekologi sosial dan kultural. Kecenderungan ini lebih menekankan perhatian antar hubungan dari pada sikap administratif dan lembaga administratif dengan ekologi sosial budaya tertentu.

Sedangkan pendapat administrasi pembangunan, menurut Siagian (1983: 2) menyebutkan bahwa administrasi pembangunan sebagai suatu disiplin ilmiah merupakan orientasi baru dalam ilmu administrasi. Dikatakan suatu orientasi baru oleh karena sampai sekarang administrasi pembangunan belum secara universal diakui sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan. “Ilmu” administrasi pembangunan dewasa ini masih berada dalam tahap embrional. Meskipun perkembangan administrasi pembangunan menunjukkan bahwa semakin banyaknya ahli – ahli di samping para ahli administrasi yang menaruh perhatian terhadap administrasi pembangunan, terutama para ahli yang mengspesialisasikan dirinya dalam ilmu – ilmu politik, ekonomi, hukum, sosiologi dan sebagainya.

Siagian (1983: 2) menambahkan bahwa pengertian administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu pertama, tentang administrasi dan kedua, tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan – keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Siagian merumuskan administrasi

pembangunan dalam bukunya Bintoro Tjokroamidjojo “Pengantar Administrasi Pembangunan” (1995: 13), Ia mengemukakan bahwa Administrasi pembangunan adalah suatu usaha rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Dari beberapa definisi administrasi pembangunan di atas dapat dilakukan analisa lebih lanjut, menurut Siagian (1983) terdapat enam ide pokok yang penting diperhatikan apabila seseorang berbicara tentang pembangunan, keenam ide pokok tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, bahwa pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti suatu kegiatan yang terus menerus dilaksanakan meskipun sudah barang tentu bahwa proses itu dapat dibagi dan biasanya memang dibagi menjadi tahap – tahap tertentu yang berdiri sendiri (*independent phase of a process*). Kedua, bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidental di masyarakat, tidaklah dapat digolongkan kepada kategori pembangunan. Ketiga, bahwa pembangunan dilakukan secara terencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan. Keempat, bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas di sini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan pada pihak lain. Kelima, bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan ini bersifat multi dimensional. Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial – budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi. Keenam, bahwa kesemuanya hal yang telah disebutkan di muka ditunjukkan kepada usaha membina bangsa (*nation – building*) yang terus menerus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya. (Siagian, 1983: 3-4)

Dengan beberapa pengertian tersebut sebagai tolak ukur Siagian (1983) memberikan definisi kerja (*working definition*) dari administrasi pembangunan. Ia menyebutkan bahwa Administrasi Pembangunan adalah “seluruh usaha yang dilakukan ialah suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai

suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan”.

3. Konsep Pembangunan

Dalam bukunya Agus Suryono “Dimensi – Dimensi Prima Teori Pembangunan”, menyebutkan bahwa konsep pembangunan dapat dikaji dari dua aspek penting yakni: secara etimologik dan secara ensiklopedik.

Secara etimologik, istilah pembangunan berasal dari kata **bangun**, diberi awalan **pem -** dan akhiran **- an** guna menunjukkan perihal pembangunan. Kata bangun setidaknya – tidaknya mengandung 4 arti: (1) Bangun dalam arti sadar atau siuman (aspek fisiologi), (2) Bangun dalam arti bangkit atau berdiri (aspek perilaku), (3) Bangun dalam arti bentuk (aspek anatomi), (4) Bangun dalam arti kata kerja membuat, mendirikan, atau membina (gabungan aspek fisiologi, aspek perilaku dan aspek bentuk).

Secara ensiklopedik, kata pembangunan telah menajad bahasa dan konsep dunia, konsep ini Antara lain dianalogkan dengan konsep pertumbuhan (*growth*), rekonstruksi (*reconstruction*), perubahan sosial (*social change*), pembebasan (*liberation*), pembaharuan (*innovation*), pembangunan bangsa (*nation building*), pembangunan nasional (*national development*), pembangunan (*development*), pengembangan (*progress/developing*), dan pembinaan (*Construction*) (Suryono, 2010: 53).

Menurut Siagian (1983) yang dikutip oleh Suryono (2010: 46), menyebutkan bahwa pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dengan demikian ide pembangunan menurut Siagian (1983) mengandung makna: (a) bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir, (b) pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan secara terus menerus, (c) pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaanya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan, (d) pembangunan mengarah kepada modernitas, (e) modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi

dimensional, proses dan kegiatan pembangunan ditunjukkan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Tjokrowinoto (1987) yang dikutip Suryono (2010: 46) ia menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai citra pembangunan dalam prespektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas), sebagai berikut:

- (1) Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju tataran kehidupan masyarakat yang lebih baik.
- (2) Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga.
- (3) Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*).
- (4) Pembangunan memperoleh sifat dan konsep transcendental, sebagai alat *meta-disciplinary phenomenom*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, *the ideology of developmentalism*.
- (5) Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (*value loaded*) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut oleh suatu bangsa secara makin meningkat.
- (6) Pembangunan menjadi *culture specific*, *situation specific* dan *time specific*.

(a) Nilai – Nilai Pembangunan

Menurut pendapat ahli ekonomi Todaro yang dikutip oleh Bryant (1989: 20), menganalisis bahwa pembangunan mengandung tiga nilai utama, yakni sebagai berikut:

- (1) Menunjang kelangsungan hidup: kemampuan untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan dasar. Semua orang menyakini kebutuhan – kebutuhan dasar tertentu untuk meningkatkan kehidupan. Kebutuhan – kebutuhan “penunjang kelangsungan hidup” ini meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan rasa aman.
- (2) Harga diri: kemampuan untuk menjadi seseorang manusia, suatu pribadi komponen universal kedua dari suatu kehidupan yang baik ialah harga diri, perasaan layak dihormati diri sendiri, tidak menjadi alat orang – orang lain demi tujuan orang lain itu semata – mata.
- (3) Kemerdekaan dari penjajahan dan perbudakan: kemampuan untuk memilih. Nilai universal ketiga yang harus merupakan bagian dari makna pembangunan ialah konsep “kebebasan”. Kebebasan disini hendaknya tidak dipahamai dengan makna politik atau ideologi, melainkan dalam pengertian yang lebih mendasar mengenai kebebasan atau emansipasi dari perampasan kondisi materiil kehidupan, dari

penajajahan sosial atas manusia oleh alam, kebodohan, orang – orang lain, penderitaan, lembaga- lembaga, dan keyakinan – keyakinan dogmatik.

(b) Tipe – Tipe Pembangunan

Dalam kaitanya dengan pemahaman tentang pembangunan yang dilakukan secara berencana dan perencanaanya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan, menurut Tjokrowinoto (1980) yang dikutip oleh Suryono (2010: 47-48) menyebutkan terdapat 9 tipe pembangunan yakni,

- (1) Tipe ideal (*ideally type*) dengan ciri perencanaan yang mampu mengendalikan pertumbuhan dan perubahan sistem;
- (2) Tipe menghasilkan dalam jangka pendek (*short run pay of*) dengan ciri perencanaan yang mampu mngendalikan pertumbuhan, tetapi tidak dalam perubahan sistem;
- (3) Tipe menghasilkan dalam jangka panjang (*long run pay of*) dengan ciri perencanaan yang mampu mengendalikan perubahan sistem, tetapi tidak dalam pertumbuhan;
- (4) Tipe kegagalan (*failure*) dengan ciri adanya perencanaan, tetapi tidak mampu mengendalikan baik petumbuhan maupun perubahan sistem;
- (5) Tipe dorongan lingkungan (*encironmental stimulus*) dengan ciri lebih mengutamakan pertumbuhan;
- (6) Tipe pragmatis (*pragmatism*) dengan ciri lebih mengutamakan adanya pertumbuhan dan perubahan sistem, tetapi mengabaikan pentingnya perencanaan;
- (7) Tipe krisis (*crisis*), dengan ciri lebih mengutamakan tingkat pertumbuhan dan mengabaikan pentingnya perencanaan dan perubahan sistem;
- (8) Tipe masyarakat statis (*static society*), dengan ciri mengabaikan pentingnya semua aspek perencanaan, pertumbuhan, maupun perubahan sistem;
- (9) Tipe *chaos*, ditandai dengan fenomena masyarakat yang *confusion* / kebingungan; *hassle* / percekcoakan; *angry* / kemarahan; *obstacle* / banyak halangan, dan; *stagnan* / mandeg, jalan ditempat.

(c) Unsur Pembangunan

Menurut Siagian (1990: 3-4) Dalam setiap pelaksanaan pembangunan, didalamnya terdapat unsur – unsur pembangunan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Unsur tersebut diantaranya sebagai berikut:

- (1) Proses, bahwa pembangunan merupakan suatu proses, proses berarti suatu kegiatan yang terus menerus.
- (2) Sadar, bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilakukan.
- (3) Berencana, bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada perumbuhan dan perubahan.
- (4) Modernitas, bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas. Sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya serta kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan kepada pihak lain.
- (5) Multi – dimensional, bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi- dimensional, artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara terutama aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi.
- (6) *Nation Building*, bahwa kesemua hal tersebut diatas ditunjukkan kepada usaha membina bangsa (*nation building*) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari penjelasan unsur – unsur pembangunan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana yang mengarah kepada modernitas dan bersifat multi-dimensional yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pelaksanaan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

(d) Tujuan pembangunan

Ahli ekonomi Todaro sebagaimana yang dikutip oleh LEMHAMNAS (1997: 11) yang menyebutkan bahwa pembangunan meliputi proses memajukan mutu kehidupan manusia, *the process of improving the quality of all human lives*. Dalam pengertian ini pembangunan mencakup tiga aspek yang sama pentingnya, menurut ia pembangunan bertujuan, sebagai berikut:

(1) Mempertinggi kehidupan bangsa, yang meliputi pendapatan dan konsumsi pangan, pelayanan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya melalui pembangunan ekonomi. (2) Menciptakan keadaan yang dapat membantu pertumbuhan rasa harga diri melalui pembangunan sistem dan lembaga sosial, politik, dan ekonomi yang dapat mengembangkan rasa harga diri dan rasa hormat terhadap kemanusiaan. (3) Mengembangkan kebebasan untuk memilih dengan jalan memperluas kesempatan untuk memilih, misalnya dengan menambah keanekaragaman jenis barang konsumsi dan jasa yang tersedia.

Dengan demikian bahwa tujuan pembangunan tidak hanya mencakup aspek pembangunan ekonomi saja, sekaligus pembangunan ekonomi harus diakui dan mendapatkan prioritas yang tinggi.

Adapun tujuan lain dari pembangunan menurut Gant yang dikutip oleh Syamsi (1986: 5), ia berpendapat bahwa terdapat dua tahap pembangunan: tahap pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan – kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup dan bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.

(e) Sasaran Pembangunan.

Disimpulkan bahwa pembangunan merupakan bentuk kenyataan fisik dan keadaan jiwa yang diupayakan oleh masyarakat, dengan mengkombinasikan proses sosial, ekonomi dan kelembagaan untuk mencapai suatu tatanan kehidupan yang lebih baik. Todaro (1994: 92) mengemukakan bahwa pembangunan pada masyarakat paling tidak harus mempunyai 3 sasaran, ketiga sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatkan ketersediaan dan perluasan barang – barang kebutuhan pokok seperti pangan, papan, kesehatan dan perlindungan.

(2) Meningkatkan taraf hidup yaitu, selain meningkatkan pendapatan, memperluas kerja, pendidikan yang lebih baik, dan juga perhatian yang lebih besar terhadap nilai – nilai budaya dan kemanusiaan, yang keseluruhannya akan memperbaiki bukan hanya kesejahteraan material tetapi juga menghasilkan rasa percaya diri sebagai individu maupun sebagai suatu bangsa. (3) Memperluas pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi setiap orang dan setiap bangsa dengan membebaskan mereka dari perbudakan dan ketergantungan bukan dalam hubungan dengan orang dan negara lain tetapi juga terhadap kebodohan dan kesengsaraan manusia.

B. Teori Peran

Teori peran merupakan salah satu unsur – unsur dari lapisan masyarakat. Hal ini dapat dipahami bahwa untuk mewujudkan unsur – unsur lapisan masyarakat dalam teori sosial membutuhkan kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan dan peranan merupakan unsur – unsur yang baku dalam lapisan sistem masyarakat yang memiliki arti penting bagi sistem sosial. Yang artinya dalam sistem sosial terdapat pola yang mengatur hubungan timbal balik antar individu dalam masyarakat dan antar individu dengan masyarakat dan tingkah laku individu – individu tersebut (Soekanto, 2002: 27). Dalam pola hubungan timbal balik tersebut kedudukan dan peranan dalam individu memiliki arti yang penting. Karena bertahanya masyarakat tergantung kepada kedudukan dan peranan dalam masyarakat yang tergantung pada keseimbangan kepentingan pada individu tersebut. Untuk mendapatkan gambaran lebih dalam selanjutnya dijelaskan dengan terperinci antara kedudukan dan peranan dalam unsur lapisan masyarakat.

1. Kedudukan

Terkadang dijumpai perbedaan pengertian antara kedudukan (*status*) dengan kedudukan sosial (*social status*). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya

adalah tempat secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang – orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestasinya dan hak – hak serta kewajibannya (Soekanto, 2002: 239).

Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seorang dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai beberapa kedudukan oleh karena seorang biasanya ikut serta dalam berbagai pola kehidupan, pengertian tersebut menunjukkan tempatnya sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyeluruh (Soekanto, 2002: 239).

Menurut Soekanto (2002: 240-242) menyebutkan pada umumnya masyarakat mengembangkan dua macam kedudukan yaitu sebagai berikut:

- (a) *Ascribed – Status*, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan – perbedaan rahaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula, demikian pula seorang warga kasta brahmana di India memperoleh kedudukan demikian karena orang tuanya tergolong dalam kasta yang bersangkutan. Pada umumnya *ascribed – status* dijumpai pada masyarakat – masyarakat dengan sistem lapisan yang tertutup. Namun *ascribed – status* tak hanya dijumpai pada masyarakat – masyarakat dengan lapisan tertutup saja. Pada sistem lapisan terbuka mungkin juga ditemukan *ascribed – status*. Misalnya kedudukan laki – laki drama satu keluarga, kedudukannya berbeda dengan kedudukan istri dan anak – anaknya.
- (b) *Achieved – Status* adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha – usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran. Akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan masing – masing dalam mengejar serta mencapai tujuan – tujuannya. Misalnya setiap orang bisa menjadi seorang hakim asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Terserah kepada yang bersangkutan apakah mampu menjalani syarat – syarat tersebut. Apabila tidak, tidak mungkin kedudukan sebagai hakim tersebut dapat tercapai. Terkadang dibedakan satu lagi macam kedudukan, yaitu *assigned – status* yang merupakan kedudukan yang diberikan. *Assigned – status* sering mempunyai hubungan yang erat dengan *achieved – status* artinya suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Akan tetapi terkadang kedudukan tersebut diberikan karena seseorang tersebut telah lama menduduki suatu kepangkatan tertentu.

2. Peranan

Menurut Soekanto (2002: 243) Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah – pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sehingga tidak ada peranan tanpa adanya kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana kedudukan, peranan memiliki dua arti. Setia orang mempunyai macam – macam peranan yang berasal dari pola – pola pergaulan hidupnya. Berarti peran menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat serta kesempatan – kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat.

Pentingnya peranan adalah mengatur perilaku seorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas – batas tertentu dapat meramalkan perbuatan – perbuatan orang lain. Hubungan – hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antar peranan – peranan individu dalam masyarakat dan peranan diatur oleh Norma – norma yang berlaku.

Menurut Soekanto, (2002: 243-244) menyebutkan bahwa Peranan lebih banyak menunjuk kepada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi seorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan mencakup 3 hal, yakni sebagai berikut

- (a) Peranan meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan serangkaian peraturan – peraturan yang membimbing seorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- (b) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- (c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

C. Konsep Strategi

Konsep strategi selalu memberikan perhatian yang serius terhadap perumusan tujuan dan perencanaan dalam organisasi, faktor – faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahannya, serta peluang dan tantangan selalu dihadapi oleh setiap organisasi. Analisis mengenai faktor – faktor tersebut sangat berguna dalam merumuskan alternatif yang memudahkan para pengambil keputusan tertinggi dalam organisasi untuk mengambil alternatif yang terbaik. Pengambilan keputusan yang terbaik biasanya dilakukan setelah memperhitungkan konsekuensi – konsekuensi yang timbul apabila alternatif tersebut dipilih dan dilaksanakan.

Dalam setiap pengambilan alternatif diperhitungkan sejauh mana nilai kompetitif masing – masing yang menguntungkan. Menurut Hatten dan Hatten (1988) yang dikutip oleh Salusu (1996: 6) menegaskan bahwa intisari dari konsep strategi dapat diringkaskan dalam dua istilah, yaitu kompetensi distinktif (*distinctive competence*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).

Konsep – konsep strategi tersebut yang menjadi tulang punggung dari manajemen stratejik, dan perencanaan stratejik. Oleh sebab itu tidak dapat dihindari bahwa dimensi – dimensi utama dalam manajemen stratejik, keputusan stratejik dan perencanaan stratejik yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

1. Pengertian Strategi

Semua organisasi, baik organisasi publik maupun organisasi swasta atau privat, keduanya mempunyai langkah – langkah atau cara yang disusun secara sistematis dalam rangka menjalankan segala aktivitas organisasinya. Langkah –

langkah tersebut merupakan rangkaian kebijakan yang dituangkan ke dalam rumusan strategi. Jadi strategi merupakan rangkaian dari suatu perencanaan kegiatan, yang meliputi kebijakan – kebijakan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan.

Dalam beberapa tulisan pengertian strategi, memiliki pemahaman atau artian yang sama. Istilah strategi pada awalnya bersumber dari dan dipergunakan oleh kalangan militer. Istilah *strategy* berasal dari kata Yunani *strategos*, atau *strategus* dengan kata jamak strategi. *Strategos* berarti jenderal tetapi dalam Yunani kuno berarti perwira negara (*state officer*) dengan fungsi yang luas. (Salusu, 1996: 85).

Dalam arti sempit, menurut Matloff (1967) yang dikutip oleh Salulu (1996: 85), menyebutkan bahwa *strategy* berarti *the art of the general* (seni jenderal). Pengertian lain mengenai strategi muncul dari Glueck dan Jauch (1997: 12) menyebutkan bahwa strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Pengertian lain juga muncul pada pemikiran Nicholas yang dikutip oleh Salusu (1996: 92) menyatakan bahwa strategi adalah seni dalam menggunakan kecakapan dan sumber daya organisasi melalui interaksi yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan dalam upaya mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Sedangkan Menurut David (2009: 19) menyebutkan bahwa Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Selain itu strategi mempengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan, biasanya untuk lima tahun ke depan,

dan karenanya berorientasi ke masa yang akan datang. Sedangkan definisi strategi lainnya menurut Mixhael (2004: 3) strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi: strategi adalah pilihan – pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi.

Dari beberapa pengertian strategi yang telah disebutkan diatas pada hakekatnya strategi memiliki persamaan makna, bahwa yang dimaksud dengan strategi adalah sarana yang digunakan atau alat yang digunakan untuk mencapai satu tujuan yang dilakukan secara terencana yang berupa langkah – langkah yang terkonsep dan tertuang dalam bentuk program atau kebijakan yang dalam penyusunannya dilakukan pertimbangan – pertimbangan dengan cermat untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam rangka untuk mencapai satu tujuan organisasi untuk masa yang akan datang.

2. Tingkatan – Tingkatan Strategi

Menurut Higgins (1985) yang dikutip oleh Salusu (1996: 101-104), menjelaskan terdapat 4 tingkatan dalam strategi. Keempat tingkatan strategi tersebut sebagai berikut:

(a) *Entreprise Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada diluar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Kelompok – kelompok ini mempunyai interes dan tuntutan yang bervariasi terhadap organisasi, sesuatu yang perlu diperhatikan oleh para penyusun strategi. Jadi strategi *enterprise* terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga menguntungkan organisasi strategi itu juga menampakkan bahwa organisasi sungguh – sungguh bekerja dan berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuha masyarakat.

- (b) *Corporate Strategy*
Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut *grand strategy* yang meliputi bidang yang digeluti oleh organisasi.
- (c) *Business Strategy*
Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran ditengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para legislatif, para donor, para politisi, dan sebagainya. Semua itu dimaksud untuk memperoleh keuntungan – keuntungan strategik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik.
- (d) *Functional Strategy*
Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain, terdapat tiga jenis strategi fungsional, yaitu sebagai berikut.
 - (1) Strategi fungsional ekonomi yaitu mencangkup fungsi – fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.
 - (2) Strategi fungsional manajemen, mencangkup fungsi – fungsi manajemen, yaitu *planning, organizing, implementing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, representing, dan integrating.*
 - (3) Strategi isu strategik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah.

Keempat tingkatan – tingkatan tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat dan menjadi syarat dalam pengambilan keputusan pada level tertinggi, bahwa mengelola organisasi tidak boleh dilihat dari sudut kerapian administratif semata, tetapi juga harus memperhitungkan “kesehatan” organisasi dari sudut pandang ekonomi juga.

3. Tipe – Tipe Strategi

Menurut Koteen yang dikutip oleh Salusu, (1996: 104–105) menyebutkan bahwa tipe – tipe strategi dapat dibedakan menjadi empat tipe yaitu sebagai berikut:

- (a) *Corporate strategy* (strategi organisasi), strategi ini berkaitan dengan perumusan, misi, tujuan, nilai – nilai dan inisiatif strategi yang baru. Pembatasan yang diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.
- (b) *Program strategy* (strategi program), strategi ini memberikan perhatian pada implikasi – implikasi strategi pada suatu program tertentu. Apa kira – kira dampaknya apalagi suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan, apa dampaknya bagi organisasi.
- (c) *Resource report strategy* (strategi pendukung sumber daya), strategi sumber daya memusatkan perhatiannya pada memaksimalkan pemanfaatan kualitas kinerja organisasi, sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.
- (d) *Institusional strategy* (strategi kelembagaan), fokus dari strategi institusional adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif – inisiatif strategi.

Strategi merupakan tindakan yang bersifat (*incremental*) yang senantiasa meningkat dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang akan diharapkan dimasa mendatang. Dengan demikian strategi hampir selalu dimulai dari apa yang akan terjadi, bukan dimulai dengan apa yang terjadi. Satu strategi yang akan diterapkan pada organisasi harus sesuai dengan ukuran, karakter dan kemampuan organisasi tersebut.

4. Manajemen Strategik

Dalam bidang ekonomi khususnya di lingkungan badan usaha (perusahaan) yang mengembangkan manajemen secara teoritis dan praktis, manajemen strategik telah cukup lama dikenal dan dikembangkan. Berbeda dengan lingkungan organisasi non profit di bidang pemerintah. Kehadiran manajemen strategik pada dasarnya merupakan satu paradigma baru karena keberhasilan di lingkungan organisasi profit, masih harus diuji implementasinya pada lingkungan organisasi non profit.

Menurut Nawawi (2003: 145-146) menjelaskan bahwa implementasi manajemen strategik di lingkungan profit dan non profit keduanya memiliki

perbedaan. Implementasi manajemen strategik di lingkungan organisasi profit didasari oleh nilai – nilai persaingan bebas antar organisasi bisnis, melalui pendayagunaan semua sumber yang dimiliki oleh organisasi bisnis tersebut. Dengan tujuan mempertahankan dan mngembangkan resistensi masing – masing organisasi dalam jangka waktu yang panjang, melalui kemampuan meraih laba kompetitif. Sedangkan implementasi manajemen strategik di lingkungan organisasi non profit didasari dengan nilai – nilai pengabdian dan kemanusiaan untuk kepentingan hidup bersama dalam kebersamaan di lingkungan suatu masyarakat yang disebut bangsa. Pendayagunaan sumber daya yang dimiliki dengan tujuan terciptanya kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran bersama.

Perbedaan lain menurut Nawawi (2003: 146) bahwa organisasi profit memiliki otonomi dalam menjalankan manajemennya antara lain memilih pengimplementasian manajemen strategik atau manajemen lainnya yang dinilai terbaik. Berbeda dengan organisasi non profit di pemerintahan. Sebagai sebuah organisasi besar yang disebut negara. Organisasi tersebut diatur dengan manajemen umum oleh Pemerintah Pusat, yang secara terencana dan sistematis telah menetapkan berbagai peraturan yang mengikat bagi organisasi non profit yang lebih rendah sebagai bagian/bawahan, dalam memilih dan mengimplementasikan manajemen, khususnya di lingkungan masing – masing.

Menurut Nawawi (2003: 146) menjelaskan bahwa persamaan dalam mengimplemantasikan manajemen strategik di lingkungan organisasi profit dan non profit adalah pada awal dari kegiatan manajemen strategik dimulai dari kegiatan penyusunan perencanaan strategik sebagai fungsi manajemen.

Perencanaan berperan sebagai keputusan strategik dengan memuat rumusan tentang strategi pencapaian tujuan strategik organisasi.

Sejalan dengan perkembangannya di lingkungan organisasi profit dan non profit. Menurut Nawawi (2003: 148) manajemen strategik memiliki arti “proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya”. Dari pengertian tersebut terdapat beberapa aspek penting, antara lain, (a) Manajemen strategik merupakan proses pengambilan keputusan. Bagaimana prosesnya berlangsung dapat dilakukan dengan mengimplementasikan teori spektrum pengambilan keputusan yang telah diuraikan terdahulu. (b) Keputusan yang ditetapkan bersifat mendasar dan menyeluruh yang berarti berkenaan dengan aspek – aspek yang penting dalam kehidupan sebuah organisasi, terutama tujuannya dan cara melaksanakan atau cara mencapainya. (c) Pembuatan keputusan tersebut harus dilakukan atau sekurang – kurangnya melibatkan pimpinan puncak, sebagai penanggung jawab utama pada keberhasilan atau kegagalan organisasinya. (d) Pengimplementasian keputusan tersebut sebagai strategi organisasi untuk mencapai tujuan strategiknya dilakukan oleh seluruh jajaran organisasi dalam arti seluruhnya harus mengetahui dan menjalankan peranan sesuai wewenang dan tanggung jawab masing – masing. (e) Keputusan yang ditetapkan manajemen puncak yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam bentuk kegiatan / pelaksanaan pekerjaan yang terarah pada tujuan strategik organisasi.

Pengertian lain yang di jelaskan oleh Nawawi (2003: 149) mengatakan bahwa:

manajemen strategik adalah perencanaan berskala besar (disebut Perencanaan Strategik) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut VISI), dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil, agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut MISI) dalam usaha menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional untuk menghasilkan barang dan/atau jasa serta pelayanan) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan strategik) dan berbagai sasaran (tujuan operasional) organisasi.

Pengertian yang cukup luas diatas menunjukan bahwa manajemen strategik merupakan suatu sistem yang sebagai satu kesatuan memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, dan bergerak secara serentak (bersama – sama) kearah yang sama. Komponen pertama adalah perencanaan strategik dengan unsur yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan Strategik dan Strategi Utama (Induk) organisasi. Sedangkan komponen kedua adalah Perencanaan Operasional dengan unsur – unsurnya Sasaran atau Tujuan Operasional, Pelaksanan Fungsi – Fungsi Manajemen berupa Pengorganisasian, Fungsi Pelaksanaan dan Fungsi Penganggaran, Kebijakan Situasional, Jaringan Kerja (*Net Work*) Internal dan Eksternal, Fungsi Kontrol dan Evaluasi serta Umpan Balik.

5. Dimensi – Dimensi Manajemen Strategik

Berdasarkan pengertian dan karakteristiknya disimpulkan bahwa manajemen strategik memiliki dimensi atau bersifat multi dimensional. Nawawi (2003: 153) menjelaskan Dimensi – dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) Dimensi Waktu dan Orientasi Masa Depan.

Manajemen strategik dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensi suatu organisasi berpandangan jauh ke masa depan, dan berperilaku proaktif dan antisipatif terhadap kondisi masa depan yang diprediksi akan dihadapi. Antisipasi masa depan tersebut irumuskan dan ditetapkan sebagai Visi organisasi yang akan diwujudkan 10 tahun atau lebih di masa depan.

(b) Dimensi Internal dan Esternal

Dimensi Internal adalah kondisi organisasi non profit pada saat sekarang, berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan yang harus diketahui secara tepat, untuk merumuskan RENSTRA yang berjangka panjang. Dimensi lingkungan eksternal pada dasarnya merupakan analisis terhadap lingkungan sekitar organisasi non profit yang terdiri dari Lingkungan Operasional, Lingkungan Nasional, Lingkungan Global (Internasional), yang mencakup berbagai aspek atau kondisi seperti, kondisi sosial politik, sosial ekonomi sosial budaya, kependudukan, kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, agama dan lain – lain.

(c) Dimensi pendayagunaan Sumber – Sumber

Manajemen strategik sebagai kegiatan manajemen tidak dapat melepaskan diri dari kemampuan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimiliki, agar reintegrasi terimplementasikan dalam fungsi – fungsi manajemen ke arah tercapainya yang ditetapkan di dalam setiap RENOP,

dalam rangka mencapai tujuan strategik melalui pelaksanaan Misi untuk mewujudkan Visi Organisasi non profit.

(d) Dimensi Keikutsertaan Manajemen Puncak

Manajemen strategik dimulai dengan penyusunan rencana strategik merupakan pengendalian masa depan organisasi, agar eksistensi sesuai dengan visinya dapat terwujudkan, baik pada organisasi bersifat profit atau non profit. Keikutsertaan pimpinan puncak dalam merumuskan RENSTRA dan RENOP sangat penting. Karena realisasinya sangat tergantung pada wewenang dan tanggung jawabnya, baik di dalam maupun di luar organisasi termasuk hubungan internasional. Untuk itu manajemen puncak sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya harus mampu memprediksi bahwa RENSTRA dan RENOP dapat dilaksanakan.

(e) Dimensi Multi Bidang

Manajemen strategik sebagai sistem pengimplementasiannya harus didasari dengan menempatkan organisasi sebagai satu sistem. Dengan demikian organisasi akan dapat menyusun RENSTRA dan RENOP jika tidak memiliki keterkaitan atau ketergantungan sebagai bawahan pada organisasi lain sebagai atasan. Di lingkungan organisasi non profit bidang pemerintahan, berarti RENSTRA dan RENOP hanya dapat dibuat pada tingkat Departemen yang tidak memiliki organisasi atasan. Walaupun dapat ipecahkan dengan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya kepada Ditjen, Sekejen, dan Itjen sesuai bidang masing – masing dalam penyusunan RENSTRA dan RENOP.

D. Konsep Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial.

Secara harfiah pengertian kesejahteraan mengandung arti yang luas dan dalam yang mencakup berbagai segi pandangan atau ukuran – ukuran tertentu tentang suatu hal yang menjadi ciri utama istilah tersebut. Demikian pula dengan istilah “kesejahteraan sosial”.

Kesejahteraan (sejahtera) mempunyai arti aman sentosa, makmur selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Istilah sosial oleh Dr. J.A. Ponsioen dikatakan mempunyai dua arti yang berbeda. Pertama “sosial” diartikan sebagai suatu indikasi daripada kehidupan bersama makhluk manusia, umpamanya dalam kebersamaan rasa, berfikir, bertindak dan dalam hubungan antar manusia. Yang kedua, sejak abad ke 19 istilah sosial mempunyai konotasi yang berbeda, lebih sentimental dan karena itu agak kabur seperti beberapa istilah yang serupa yang dikaitkan dengan persoalan kemiskinan dan ketelantaran orang. Meskipun demikian dari konotasi ini kemudian berkembang dalam segala arah yang bersangkutan paut dengan pembaharuan masyarakat yang bertujuan menanggulangi kemiskinan dan ketelantaran.

Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan – kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik – baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak serta kewajiban manusia dengan pancasila. Pemerintah dan DPR RI (1983) yang dikutip oleh Suud (2006: 4-5).

Menurut Segal dan Brzuzy (1998) yang dikutip oleh Suud (2006: 5), kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan

sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Sedangkan Midgley (1995) yang dikutip oleh Suud (2006:) menjelaskan bahwa:

...suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun dari tiga unsur sebagai berikut adalah, Pertama, setinggi apa masalah – masalah sosial dikendalikan. Kedua, seluas apa kebutuhan – kebutuhan dipenuhi dan terakhir setinggi apa kesempatan – kesempatan untuk maju tersedia. Tiga unsur ini belaku bagi individu – individu, keluarga – keluarga, komunitas – komunitas dan bahkan seluruh masyarakat.

Pendapat dari PBB sebagaimana yang dikutip oleh Sumarnonugroho (1984: 31-32) memberikan pengertian kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan kondisi yang penuh baik jasmani, mental maupun sosial dan bukan hanya keburukan sosial saja. PBB sebagai lembaga yang bersifat praktis daripada akademis, pada tahun 1959 mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial adalah:

...suatu kegiatan yang terorganisir dengan tujuan membantu penyesuaian timbal balik antar individu – individu dengan lingkungan sosial mereka. Tujuan ini dicapai secara seksama melalui teknik – teknik dan metode dengan maksud agar supaya memungkinkan individu – individu, kelompok – kelompok maupun komunitas – komunitas memenuhi kebutuhan – kebutuhan dan memecahkan masalah – masalah penyesuaian diri mereka terhadap perubahan pola – pola masyarakat, serta melalui tindakan kerja sama untuk memperbaiki kondisi – kondisi ekonomi dan sosial.

Dalam pengertian yang lebih luas, sebagai suatu koreksi terhadap ruang lingkup definisi yang dibuat oleh PBB pada tahun 1959 diatas, PBB masih sebagaimana yang dikutip oleh Sumarnonugroho (1991: 33). Menyebutkan bahwa.

... kesejahteraan sosial sebagaimana suatu fungsi terorganisir adalah kumpulan – kumpulan kegiatan – kegiatan yang bermaksud untuk memungkinkan individu – individu, keluarga, kelompok – kelompok dan komunitas – komunitas menaggulangi masalah sosial yang diakibatkan oleh perubahan kondisi – kondisi. Tetapi di samping itu, secara luas, kesejahteraan sosial mempunyai fungsi terhadap pelayanan – pelayanan

khusus, kesejahteraan sosial mempunyai fungsi lebih lanjut ke bidang yang lebih luas di dalam pembangunan sosial suatu negara.

Di Indonesia, pengertian kesejahteraan sosial telah dituangkan ke dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang ketentuan – Ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial, pasal 2 (1), sebagaimana yang dikutip oleh Sumarnonugroho (1984: 34-35) yang berbunyi:

“kesejahteraan Sosial” ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun sprirituil yang meliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan keteraturan lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan – kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik – baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi baik – baik azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

Perumusan konsepsi kesejahteraan sosial di Indonesia bersumber pada falsafah dan ideologi negara pancasila serta berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945.

2. Tujuan Kesejahteraan Sosial.

Sumarnonugroho (1984: 37-39) menjelaskan untuk mencapai penyesuaian diri yang baik, menggali sumber – sumber daya, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. Leonard Schneiderman berdasarkan rumusan atau pendapat dari PBB dan beberapa ahli bidang kesejahteraan sosial, secara terperinci mengurai tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yakni *system maintenance*, *system control* dan *system change*.

(a) *System maintenance*

Menurut Schneiderman, bahwa tujuan sistem ini mencakup memelihara dan menjaga kesinambungan atau kelangsungan keberadaan serta tatanan nilai – nilai sosial, yang dalam hal ini berhubungan dengan:

- (1) Pengertian dasar tentang arti dan tujuan kehidupan.
- (2) Motivasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup individu dan kelompok.
- (3) Norma – norma untuk menampilkan peranan berdasarkan umur dan jenis kelamin.
- (4) Norma – norma yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang serta pelayanan.
- (5) Norma – norma tentang pemecahan konflik, dan sebagainya.

Untuk mencapai tujuan ini dapat di laksanakan kegiatan yang berupa:

- (1) Kegiatan – kegiatan untuk mensosialisasikan anggota – anggota masyarakat agar dapat menerima nilai – nilai yang berlaku.
- (2) Peningkatan kesadaran untuk memahami sumber – sumber daya dan kesempatan – kesempatan melalui saluran – saluran informasi, nasehat serta bimbingan.
- (3) Pemberian kompensasi pada tingkat residua untuk mengisi atau mengimbangi kekurangan yang ada (*system deficiencies*).

(b) System control

Tujuan sistem ini mengadakan kontrol secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai – nilai sosial yang ada.

Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan.

- (1) Intersifikasi fungsi – fungsi pemeliharaan yang berupa kompensasi, resosialisasi, dan penyadaran terhadap kelompk – kelompok penduduk yang berperilaku menyimpang agar supaya dapat mengembangkan pengawasan diri.
- (2) Menggunakan prosedur – prosedur hukum dan peraturan – peraturan untuk meningkatkan pengawasan eksternal dari perilaku yang meyimpang.
- (3) Merupakan kombinasi dari nomor 1 dan nomor 2.

(c) System change

Schneiderman mengutarakan bahwa tujuan sistem ini adalah mengadakan perubahan kearah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Dalam hal ini sistem kesejahteraan merupakan alat

(instrumen) untuk menghilangkan hambatan – hambatan terhadap terwujudnya:

- (1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan (*decision making*) secara penuh dan lebih adil.
- (2) Distribusi sumber – sumber yang lebih adil dan merata.
- (3) Penggunaan kemungkinan – kemungkinan yang ada dalam struktur sistem secara lebih banyak dan lebih adil.

Beberapa gabungan daripada tujuan yang telah diuraikan diatas dapat ditemui bahwa dalam semua program kesejahteraan sosial. Selanjutnya untuk mencapai terwujudnya tujuan kesejahteraan tersebut perlu disusun berbagai program dan kegiatan yang disebut usaha - usaha kesejahteraan sosial. Terkadang pemakaian istilah kesejahteraan sosial dan usaha kesejahteraan sosial disamakan, hal ini karena kesejahteraan yang diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan yang meliputi pula kegiatan pelayanan – pelayanan. Dengan demikian pengertian kesejahteraan sosial sudah termasuk mencakup usaha – usaha kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Undang – Undang R.I Nomor 6 tahun 1974 sebagaimana yang dikutip oleh Sumarnonugroho (1984: 39) secara terpisah memberikan batasan pada yang dimaksud dengan “kesejahteraan sosial” dengan ”usaha kesejahteraan sosial”, yang dimaksud dalam undang – undang ini dengan “usaha – usaha kesejahteraan sosial” ialah semua upaya, program, dan kegiatan yang ditunjukkan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan.

3. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Sistem kesejahteraan sosial merupakan subsistem dari masyarakat yang lebih besar yang memberikan sanksi – sanksi dan dukungan – dukungan terhadap kesejahteraan sosial. Sebagai subsistem, kesejahteraan sosial mempunyai fungsi khusus yakni menagatasi masalah yang ada kaitanya dengan penyesuaian – penyesuaian sosial dan relasi – relasi sosial. Hal ini seperti yang diuraikan dalam Penjelasan atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1974, bahwa usaha – usaha kesejahteraan sosial mempunyai ruang lingkup yang khusus tertuju kepada manusia sebagai perseorangan, manusia dalam kehidupan masyarakat, karena faktor – faktir dalam dirinya sendiri atau faktor – faktor dari luar, mengalami kehilangan kemampuan melaksanakan peranan sosialnya (disfungsi) sosial.

PBB sebagaimana yang dikutip oleh Sumarnonugroho (1984: 42) memberikan pengertian yang sama untuk istilah kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial mengedepankan lima fungsi pokok kesejahteraan sosial, yaitu:

- (1) Perbaikan secara progresif daripada kondisi – kondisi kehidupan orang.
- (2) Pengembngan sumber – sumber daya manusia.
- (3) Berorientasi orang terhadap perubahan sosial dan penyesuaian diri.
- (4) Penggerakan dan penciptaan sumber – sumber komunitas untuk tujuan – tujuan pembangunan, dan.
- (5) Penyediaan struktur – struktur institusional untuk berfungsinya pelayanan – pelayanan yang terorganisir lainnya.

Dari uraian – uraian baik berdasarkan fungsi khusus maupun dalam ruang lingkup yang lebih luas, maka Sumarnonugroho (1984: 43) dapat menyimpulkan fungsi kesejahteraan sosial, sebagai berikut:

- (1) Fungsi penyembuhan dan pemulihan
Fungsi pemulihan (rehabilitatif) terutama untuk menanamkan dan menumbuhkan fungsionalitas kembali dalam diri seorang maupun anggota masyarakat. Fungsi penyembuhan dapat bersifat represif

artinya bersifat menekan agar masalah sosial yang timbul tidak makin parah dan tidak menjarar.

(2) Fungsi pencegahan

Dalam hal ini meliputi langkah – langkah untuk mencegah agar jangan sampai timbul masalah sosial yang baru, juga langkah – langkah untuk memelihara fungsional seseorang maupun masyarakat.

(3) Fungsi pengembangan

Untuk mengembangkan kemampuan orang maupun masyarakat agar dapat lebih meningkatkan fungsional mereka sehingga dapat hidup secara produktif.

(4) Fungsi penunjang

Fungsi ini menompang usaha – usaha lainya agar dapat lebih berkembang. Meliputi kegiatan – kegiatan yang dapat memperlancar kebersihan program – program lainya seperti bidang kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, pertanian dan sebagainya.

E. Pemberdayaan

1. Konsep Pemberdayaan

Berdasarkan asal katanya pemberdayaan dan memberdayakan, secara harfiah berasal dari kata *empowerment* dan *empower*, artinya *to give power or authority to* serta *to give ability to enable*. (AS Hornby, Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English) pengertian pertama mengandung makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, sedangkan pengertian kedua mengandung makna sebagai upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan atau *empowerment* berdasarkan makna katanya diartikan sebagai kekuatan yang berasal dari “dalam“ yang dapat diperkuat dengan unsur – unsur dari “luar” (Kartasasmita, 1997: 16).

Konsep pembangunan yang terpusat pada manusia merupakan sumber munculnya strategi pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan yang diimplementasikan dan dikembangkan dalam rangka kegiatan pembangunan pada negara sedang berkembang. Paradigma pemberdayaan

mempunyai asumsi bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun sumber daya yang ada di masyarakat. Dengan, mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang mereka miliki serta berupaya untuk berkembang. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Pemberdayaan diperlukan langkah – langkah yang lebih positif, selain menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Penguatan ini membutuhkan langkah – langkah yang nyata, dan menyangkut berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. (Kartasmita, 1996)

Friedmann menyebutkan pemberdayaan sebagai sebuah alternatif akibat adanya kegagalan dari teori pembangunan yang terlah ada, pendapat tersebut penulis kutip secara dari Tesis Yulita Indah Prasetiari, halaman 66-67, dimana Friedmann menyatakan bahwa:

“An alternative development is centered on the people and their environment rather than production and profit. And just as the paradigm in dominance approaches the question of economic growth from the perspective of the firm. Which is the foundation of neoclassical economics, so an alternative development, based as it must be on the life spaces of civil society, approaches the question of an improvement in the condition of live and livelihood from a perspective of the household”.

Pernyataan Friedmann ini muncul akibat adanya kegagalan model – model pembangunan ekonomi yang tidak dapat mengurangi kesenjangan, untuk itu dibuatlah konsep pemberdayaan yang memasukan nilai - nilai demokrasi

persamaan *gender*, persamaan antar generasi, pertumbuhan yang disertai dengan redistribusi dan pembangunan yang *sustainable*. Konsep perberdayaan sebagai suatu alternatif pembangunan yang pada intinya memberikan tekanan pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandas pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi) demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Pemberdayaan merupakan suatu konsep pembangunan pada masyarakat dalam bidang ekonomi dan politik yang bercirikan *people centered*, *participatory*, *empowering* dan *sustainable*. Dengan asumsi dasar bahwa setiap manusia memiliki potensi, memiliki daya untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik, dengan demikian pada dasarnya manusia bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan dirinya.

Menurut Kartasmita (1996: 3) terdapat tiga hal pokok yang menjadi perhatian dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- (1) Upaya ini harus terarah (*targeted*), ini yang secara populer disebut pemihakan yang ditunjukkan secara langsung kepada yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran, dengan tujuan yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemauan dan kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dan merancang, melaksanakan, mengelola, mempertanggung jawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.
- (3) Menggunakan pendekatan kelompok, karena cara sendiri – sendiri masyarakat sulit dapat memecahkan masalah – masalah yang dihadapinya. Disamping itu lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanggulangan dilakukan secara individu.

Konsep pemberdayaan lahir sebagai analitis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak kepada rakyat mayoritas.

Munurut Priyono dan Pranaka (1996: 1-4) konsep pemberdayaan dibangun dari kerangka logika sebagai berikut:

- (1) Bahwa proses pemusatan kekuatan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi.
- (2) Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerjaan dan masyarakat yang pengusaha pinggiran.
- (3) Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi yang manipulasi untuk memperkuat dari legitimasi.
- (4) Sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.

Dalam konsep pemberdayaan, menurut Priyono dan Pranaka (1996: 4), menyebutkan bahwa manusia adalah subjek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses konsep ini sesungguhnya juga merupakan hasil kerja proses interaktif baik pada tataran ideologis maupun pada tataran implementasi. Friedmann (1992) yang dikutip oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, (2007: 60) menjelaskan pada tataran ideologis, konsep “*empowerment*” merupakan hasil interaksi antara konsep “*top down*” dan “*bottom-up*”, antara “*growth strategy*” dan “*people centered strategy*”. Sedangkan pada tataran implementasi, interaktif akan terjadi lewat pertarungan antar otonomi.

Keberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pematapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi. Dalam hal ini Pemikiran dari Friedmann yang dikutip oleh Bashith (2012: 28), yang menyatakan bahwa:

The powerment approach, which is fundamental to alter-native development, places the emphasis on autonomy in decision making of territorially organized communities, lo-cal self-reliance (but not autarchy), direct (participatory) democracy and experiential social learning.

Selanjutnya Friedmann (Soetrino, 1995) sebagaimana dikutip oleh Bashith (2012: 29), ia mengingatkan bahwa sangat tidak realistis apabila kekuatan – kekuatan ekonomi dan struktur – struktur kekuatan masyarakat madani diabaikan dalam penilaian keberdayaan. Oleh karena itu menurut Friedmann, keberdayaan tidak hanya sebatas ekonomi saja namun juga secara politis. Hal ini yang menjadikan masyarakat memiliki posisi tawar menawar yang kompetitif, baik secara nasional maupun internasional. Pemikiran tersebut muncul karena keberdayaan tersebut ditunjukkan untuk mengubah kondisi yang serba sentralistik ke situasi yang lebih otonom. Dimana kelompok miskin diberikan kesempatan untuk merancang kemudian melaksanakan program pembangunan yang telah dipilih oleh kelompok tersebut. Serta mereka diberikan kesempatan untuk mengelola dana pembangunan baik berasal dari pemerintah maupun pihak luar. Konsep dasar pemberdayaan tersebut, oleh Friedmann yang dikutip oleh Bashith (2012: 29) disebut sebagai: *alternatif development* (pembangunan alternatif) yang menghendaki “*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equality*” demokrasi inklusif, pertumbuhan ekonomi yang memadai, kesetaraan gender dan persamaan antar generasi).

Keberdayaan merupakan perwujudan dari rekonstruksi (*breakdown*) hubungan antara subyek dan obyek. Dalam proses ini mensyaratkan adanya pengakuan subyek atas kemampuan (*power*) yang dimiliki obyek. Secara garis besar proses ini dilihat dari transfer kekuatan (*flow of power*) dari subyek ke obyek. Dengan kata lain pemberian kesempatan untuk meningkatkan hidup dengan memakai sumber daya tersebut. Dalam pengertian yang luas, hasil akhir

dari proses keberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula obyek menjadi subyek (baru). Ini yang menyebabkan realisasi antar subyek (lama) dengan subyek (baru) yang lain. Dengan kata lain keberdayaan merupakan proses mengubah pola realisasi lama subyek – subyek menjadi realisasi subyek – subyek.

Menurut Chrales Elliot (1997) yang dikutip oleh Bashith (2012: 34), pemahaman terhadap keberdayaan (*powerment*) dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni sebagai berikut:

- (a) *The Welfare Approach* (pendekatan kesejahteraan). Pendekatan ini mengarah pada pendekatan manusia dan bukan untuk memperdayakan (melemahkan) masyarakat dalam menghadapi proses politik dan pemiskinan rakyat. Akan tetapi justru memperkuat keberadaan masyarakat dalam pendekatan *sentrum of power* (pusat kekuasaan) yang dilator belakangi dengan kekuatan potensi lokal masyarakat.
- (b) *The Development Approach* (pendekatan perkembangan). Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan guna meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
- (c) *The Powerment Approach* (pendekatan keberdayaan). Pendekatan ini melihat bahwa kemiskinan adalah sebagai akibat dari politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat.

Selanjutnya pendapat diatas dipertegas oleh Hulme dan Tuner (1990) yang dikutip oleh Bashith (2012: 35) menyatakan bahwa keberadaan masyarakat pada umumnya dibatasi oleh dikotomi subyek – obyek. Dikotomi ini terjadi karena

kekuatan (*power*) yang mempengaruhi subyek dan obyek melalui pendekatan dengan *sentrum of power*. Hal ini menyebabkan kemampuan, status, kepemilikan, dan kedudukan masyarakat terikat pada kekuatan (*power*) tersebut. Semakin dekat dengan *sentrum of power* maka daya/kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat juga semakin banyak.

2. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan.

Untuk mengatasi sejumlah permasalahan terkait kemiskinan nelayan, maka menurut Arif Satria dalam tulisannya yang berjudul “Kemiskinan dan Modal – Modal Nelayan” yang dikutip dari buku Pengentasan Dari Kemiskinan, Kementerian Pendidikan Nasional 2010 Halaman 111. Ia mengemukakan terdapat tiga agenda pokok yang dapat menjadi pilar penting bagi pemberdayaan masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan mendatang, ketiga agenda tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, mengembangkan lembaga pembiayaan perikanan (LPP) non-bank sebagai alternatif sumber pembiayaan usaha perikanan skala mikro. Ini penting mengingat sumber – sumber pembiayaan berbasis perbankan konvensional selama ini kurang menunjang usaha kecil perikanan. Kredit usaha rakyat (KUR) yang tujuannya untuk meningkatkan usaha kecil perikanan belum mampu menjangkau sentra – sentra produksi perikanan dan juga ternyata kurang cocok dengan karakteristik usaha kecil perikanan. KUR masih mengacu pada mekanisme perbankan konvensional dimana fleksibilitasnya sangat rendah. Misalnya, sulit bagi bank pelaksana untuk memberikan pelayanan malam hari sebagaimana dikehendaki nelayan.

Kedua, meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidayaan ikan melalui jaminan harga ikan, diversifikasi teknologi dan usaha, serta perbaikan infrastruktur. Harga ikan bisa menjadi nol rupiah ketika terjadi *over supply*, dan hingga saat ini belum ada mekanisme penjaminan harga untuk mengatasi permasalahan tersebut. Akibat rendahnya harga ikan tersebut bisa membuka peluang banyak ikan dibuang kembali ke laut. Bila ini terjadi maka tidak saja masalah ekonomi nelayan yang terpuruk, tetapi juga sumberdaya ikan makin menipis akibat praktek pembuangan ikan (*dicard fishing*). Salah satu instrumen yang bisa dikembangkan adalah dengan pembangunan *cold – storage* mini di sentra – sentra produksi perikanan. Oleh karena itu *cold – storage* disediakan untuk nelayan kecil di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang bisa dikelola koperasi perikanan.

Ketiga, meningkatkan perlindungan terhadap nelayan dan pembudidayaan ikan dalam akses pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya, serta perdagangan. Banyak tantangan yang selama ini berpotensi mempersempit akses, seperti kegiatan industri yang mencemari perikanan yang kemudian menyebabkan wilayah tersebut tidak layak untuk kegiatan perikanan. Juga kegiatan wisata bahari dan konservasi yang sebenarnya justru untuk kelestarian sumberdaya tetapi sering kali justru menghambat akses nelayan. Di dalam Undang – Undang Nomor 27 tahun 2007 telah mulai mengakui hal masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya. Ini merupakan perlindungan yang sangat positif. Namun disisi lain terdapat kekhawatiran tentang Hak Pengusahaan Perikanan Pesisir (HP3) untuk swasta.

Dari ketiga agenda yang dikemukakan oleh Arif Satria dalam tulisannya yang berjudul “Kemiskinan dan Modal – Modal Nelayan” sebagaimana di kutip dari buku Pengentasan Dari Kemiskinan, Kementerian Pendidikan Nasional 2010 tersebut setidaknya dapat dijadikan pilar penting bagi pemberdayaan masyarakat persisir atau masyarakat nelayan yang akan datang. Ketiga agenda tersebut menjadi penting untuk menunjang misi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

F. Pelabuhan Perikanan

1. Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan adalah fasilitas di ujung samudra, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat – alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal – kapal yang berlabuh. Pelabuhan juga dapat didefinisikan sebagai daerah perairan yang terlindungi dari gelombang laut dan di lengkapi dengan fasilitas yang meliputi:

- (1) Dermaga, tempat di mana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang.
- (2) *Crane*, untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat barang.
- (3) Gudang laut tempat untuk menyimpan muatan dari kapal atau yang akan dipindah ke kapal.

2. Pengertian Pelabuhan Perikanan Nusantara

Menurut PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan, yang dimaksud dengan Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis

perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara menurut PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara, adalah Pelabuhan Perikanan kelas B, yang skala layanannya sekurang – kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah laut teritorial dan Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

3. Fungsi Pelabuhan Perikanan

Fungsi Pelabuhan Perikanan menurut PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan, yaitu:

- (a) Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- (b) Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- (c) Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- (d) Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- (e) Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- (f) Pelaksanaan kesyahbandaran;
- (g) Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- (h) Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- (i) Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
- (j) Pemantauan wilayah pesisir;
- (k) Pengendalian lingkungan;
- (l) Kepabeanan; dan/atau
- (m) Keimigrasian.

4. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Menurut PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan dapat dibedakan menjadi 4

tipe yang didasarkan pada besar, wilayah operasional, dan jumlah kapal perikanan yang berlabuh, diantaranya.

(1) Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS). Berdasarkan kriteria teknis dan operasionalnya, yaitu meliputi

(a) Kriteria teknis terdiri dari:

- (1) Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan diperairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas;
- (2) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang – kurangnya 60 GT;
- (3) Panjang dermaga sekurang – kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;
- (4) Mampu menampung kapal perikanan sekurang – kurangnya 100 unit atau jumlah keseluruhan sekurang – kurangnya 6.000 GT; dan
- (5) Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang – kurangnya 20 ha.

(b) Kriteria operasional terdiri dari

- (1) Ikan untuk tujuan ekspor.
- (2) Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 50 ton per hari; dan
- (3) Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

(2) Pelabuhan Perikanan kelas B, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN). Berdasarkan kriteria teknis dan operasionalnya, yaitu meliputi

(a) Kriteria Teknis terdiri dari:

- (1) Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan ZEEI.
- (2) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang – kurangnya 30 GT.
- (3) Panjang dermaga sekurang – kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m.

- (4) Mampu menampung kapal perikanan sekurang – kurangnya 75 unit atau jumlah keseluruhan sekurang – kurangnya 2.250 GT, dan
 - (5) Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang – kurangnya 10 ha.
- (b) Kriteria Operasional terdiri dari:
- (1) Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata – rata 30 ton per hari, dan.
 - (2) Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.
- (3) Pelabuhan Perikanan kelas C, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Berdasarkan kriteria teknis dan operasionalnya, yaitu meliputi
- (a) Kriteria Teknis terdiri dari:
- (1) Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
 - (2) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang – kurangnya 10 GT;
 - (3) Panjang dermaga sekurang – kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang – kurangnya minus 2 m.
 - (4) Mampu menampung kapal perikanan sekurang – kurangnya 30 unit atau jumlah keseluruhan sekurang – kurangnya 300 GT; dan.
 - (5) Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang – kurangnya 5 ha.
- (b) Kriteria Operasional terdiri dari:
- (1) Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata – rata 5 ton per hari; dan
 - (2) Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.
- (4) Pelabuhan Perikanan kelas D, yang selanjutnya disebut Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Berdasarkan kriteria teknis dan operasionalnya, yaitu meliputi
- (1) Kriteria Teknis terdiri dari:

- (1) Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia.
 - (2) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang – kurangnya 5 GT.
 - (3) Panjang dermaga sekurang – kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang – kurangnya minus 1 m.
 - (4) Mampu menampung kapal perikanan sekurang – kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang – kurangnya 75 GT; dan.
 - (5) Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang – kurangnya 1 ha.
- (2) Kriteria Operasional yaitu, Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari.

5. Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Fasilitas pelabuhan perikanan (PP) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Indonesia telah berkembang dengan baik atas dukungan pemerintah melalui APBD dan APBN. Menurut PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan. Fasilitas Pelabuhan Perikanan setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.

- (1) Fasilitas Pokok
 - (a) Penahan gelombang (*breakwater*), turap (*revetment*), dan groin.
 - (b) Dermaga.
 - (c) *Jetty*.
 - (d) Kolam pelabuhan.
 - (e) Alur pelayanan.
 - (f) Jalan komplek dan drainase, dan
 - (g) Lahan.
- (2) Fasilitas Fungsional
 - (a) Tempat pemasaran ikan (TPI).
 - (b) Navigasi pelayanan dan komunikasi, seperti telepon, internet, radio komunikasi, rambu – rambu, lampu suar, dan menara pengawas.
 - (c) Air bersih, instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM), es, dan instalasi listrik.

- (d) Tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti *dockslipway*, bengkel dan tempat perbaikan jarring.
 - (e) Tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan, seperti *transit shed* dan laboratorium pembinaan mutu.
 - (f) Perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan perbankan.
 - (g) Transportasi seperti alat – alat angkut ikan.
 - (h) Kebersihan dan pengolahan limbah seperti Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL), Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan
 - (i) Penanganan kawasan seperti pagar kawasan.
- (3) Fasilitas Penunjang
- (a) Balai pertemuan nelayan.
 - (b) Mess operator.
 - (c) Wisma nelayan.
 - (d) Fasilitas sosial dan umum, seperti tempat peribadatan dan Mandi Cuci Kakus (MCK).
 - (e) Pertokoan.
 - (f) Pos jaga.

G. Masyarakat Nelayan

Secara geografis, yang disebut dengan masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dikawasan pesisir, yakni kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori – kategori sosial yang membentuk kesatuan social (Kusnadi, 2009: 27). Selain itu masyarakat nelayan juga mempunyai kebudayaan – kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat sosial yang lainnya.

Kusnadi (2009: 38) mengelompokan masyarakat pesisir menjadi tiga bagian yang dilihat dari aspek interaksi masyarakat interaksi masyarakat dengan sumber daya ekonomi yang tersedia dikawasan pesisir, sebagai berikut.

- (1) Pemanfaatan langsung sumber daya lingkungan, seperti nelayan (yang pokok), pembudidayaan ikan perairan pantai (dengan jaring apung atau keramba) pembudidaya rumput laut/mutiara, dan penambak.
- (2) Pengolah hasil ikan atau hasil laut lainnya, seperti pemindang, pengering ikan, pengasap, pengusaha terasi / kerupuk, ikan / tepung ikan, dan sebagainya.

- (3) Penunjang kegiatan ekonomi perikanan seperti. Seperti pemilik toko garau warung, pemilik bengkel (montir / tukang las), pengusaha angkutan, tukang perahu dan buruh kasar.

Chartles (2001) yang dikutip oleh Widodo (2006) dalam artikel (<http://gracelliaraystika.wordpress.com/2013/01/17/nelayan-sebagai-masyarakat-pesisir>) membagi kelompok nelayan dalam empat kelompok, yakni sebagai berikut:

- (1) Nelayan subsistem (*subsistence fishers*), yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- (2) Nelayan asli (*native / indigenenous / aboriginal fishers*), yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil.
- (3) Nelayan rekreasi (*recreational / sport fishers*), yaitu orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekedar untuk kesenangan atau berolahraga, dan.
- (4) Nelayan komersial (*commercial fishers*), yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Kelompok nelayan ini dibagi dua, yaitu nelayan skala kecil dan skala besar.

Dari keempat pengelompokan tersebut sudah sangat sulit menemukan dua kelompok yang pertama. Sementara kelompok ketiga walaupun di beberapa negara maju berbagi kegiatannya telah terdokumentasi dengan baik namun di beberapa negara berkembang seperti Indonesia misalnya, sangat sulit ditemukan. Disamping pengelompokan tersebut, terdapat terminologi yang sering digunakan untuk menggambarkan kelompok nelayan, seperti nelayan penuh untuk mereka yang menggantungkan keseluruhan hidupnya dari menangkap ikan.

Disamping pembagian diatas, Widodo (2006) yang dikutip dari artikel (<http://gracelliaraystika.wordpress.com/2013/01/17/nelayan-sebagai-masyarakat-pesisir>) juga mengemukakan beberapa pembagian lain seperti daya jangkau

armada perikanan dan juga lokasi penangkapan ikan. Dapat disebut dengan nelayan pantai atau biasanya disebut, sebagai berikut:

- (1) Perikanan pantai untuk usaha perikanan skala kecil dengan armada yang didominasi oleh perahu tanpa motor atau kapal motor tempel,
- (2) Perikanan lepas pantai untuk perikanan dengan kapasitas perahu rata-rata 30 GT, dan
- (3) Perikanan samudera untuk kapal-kapal ukuran besar misalnya 100 GT dengan target perikanan tunggal seperti tuna.

Perhatian yang lebih besar sering dipusatkan pada perikanan skala kecil dibandingkan dengan perikanan skala besar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut menurut Widodo (2008: 31), adalah sebagai berikut:

- (1) Perikanan skala kecil umumnya memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada sumber daya perikanan sebagai mata pencaharian utama dan usaha ini hampir seluruhnya berbasis di daerah pantai. Dengan karakter seperti ini pengelolaan perikanan menjadi faktor kunci untuk menjamin keberlangsungan sumber daya dan usaha pemanfaatannya.
- (2) Nelayan dalam kelompok ini merupakan nelayan yang memiliki keterbatasan akses terhadap pekerjaan lain dan mereka pada umumnya adalah masyarakat dengan tingkat penghasilan yang rendah. Kalangan sumber daya ikan akan langsung berimplikasi terhadap kehidupan sehari – hari masyarakat ini.
- (3) Perikanan skala kecil ini juga memiliki sumber teknologi seperti kapal dan alat tangkap yang umumnya terbatas baik dari segi jumlah maupun kapasitas. Sehingga untuk mengembangkan usaha perikanan dan memperluas daerah penangkapan ke laut lepas sangat sulit dilakukan.
- (4) Secara tradisional perikanan skala kecil umumnya berada di luar pusat kekuasaan baik politik maupun ekonomi, sehingga nelayan kelompok ini sering memiliki posisi tawar (*bagaining position*) yang sangat lemah.
- (5) Perikanan skala kecil sangat rentan terhadap pengaruh faktor eksternal dan membutuhkan berbagai upaya perlindungan.

Dengan karakter perikanan skala kecil seperti yang diuraikan di atas berbagai upaya pengelolaan sering sulit disusun dan dilakukan dan memerlukan beberapa inovasi dalam pendekatannya dengan melalui pendekatan partisipatif. Disamping memusatkan pada perikanan skala kecil. Masyarakat nelayan juga

menghadapi beberapa permasalahan politik, sosial, ekonomi yang kompleks menurut Kusnadi (2009: 27-28) permasalahan – permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan – tekanan ekonomi yang akan datang.
- (2) Keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar sehingga mempengaruhi dinamika usaha.
- (3) Kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada.
- (4) Kualitas SDM yang rendah sebagai alat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik.
- (5) Degradasi sumber daya lingkungan, baik dikawasan pesisir, laut maupun pulau – pulau kecil.
- (6) Belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan guna mendapatkan suatu yang dilakukan secara sistematis, terencana dan mengikuti konsep ilmiah yang ada. Penelitian pada dasarnya mempunyai tujuan dengan cara – cara tertentu untuk memahami suatu fenomena yang ada. Uraian yang jelas dan sistematis atas data – data yang dikumpulkan diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal sehingga dapat dikategorikan sebagai tulisan yang mempunyai nilai ilmiah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan metode deskriptif bersifat memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Menurut Nazir (2005: 54) Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. menurut Menurut Whiney (1990) yang dikutip oleh Nazir (2005: 4) menyebutkan bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Secara harfiah, metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar berkala. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis,

faktual dan kuat mengenai fakta – fakta serta hubungan antar fenomena (Nazir, 2005:54)

Pemilihan pendekatan kualitatif dimaksudkan agar dalam menjawab pertanyaan – pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah dapat terjawab melalui observasi langsung dilapangan. Disamping itu melalui metode penelitian deskriptif kualitatif hasil dari penelitian ini bersifat holistik dan memiliki kedalaman data yang valid melakukan penyajian argumen yang didapatkan langsung dari intertaksi dengan reponden dan narasumber yang bersangkutan. Selain itu pemilihan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang leebih kaya makna daripada hanya sekedar data yang berbentuk angka. Pemilihan pendekatan kualitatif ini dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut.

1. Metode kualitatif lebih mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Metode kualitatif menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden.
3. Metode kulaitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola – pola nilai yang dihadapi.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2007: 237), penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Penetapan fokus membatasi studi berarti bahwa dengan adanya fokus penentuan tempat pendirian menjadi layak.

2. Penetapan fokus secara efektif menetapkan criteria untuk menyaring informasi yang mengalir masuk.

Melalui penetapan fokus penelitian akan dapat membatasi studi agar penelitian lebih terarah dan fokus pada permasalahan. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi di Kabupaten Trenggalek Yang dirinci sebagai berikut:

1. Peran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi keberdayaan nelayan
 - (a) Sebagai Penyedia layanan dasar
 - (b) Sebagai penyuluh atau sosialisasi perikanan
2. Strategi pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.
 - (a) Peningkatan sumber daya manusia.
 - (b) Peningkatan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Nusantara.
3. Analisis Stategi pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
 - (a) Kekuatan (*strengths*).
 - (b) Kelemahan (*weaknesses*).
 - (c) Peluang (*opportunities*) dan
 - (d) Ancaman (*theats*).

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan ruang dimana peneliti akan melakukan sebuah penelitian. berdasarkan lokasi penelitian ini, peneliti dapat memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Adapun lokasi penelitian ini terletak di wilayah Jawa Timur yakni di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

dengan alasan di Kabupaten Trenggalek telah memperoleh program pemberdayaan yang berupa Proyek Pembangunan Masyarakat Pantai dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (PMP2SP) yang dimulai pada Tahun Anggaran 1998 sampai dengan Tahun Anggaran 2003. Dengan situs penelitian Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dengan pertimbangan bahwa di Kabupaten Trenggalek terdapat sarana pelabuhan perikanan yang menunjukkan aktivitas dari masyarakat nelayan serta Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi merupakan salah satu penyedia layanan – layanan terkait dengan perikanan dan kelautan.

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh hasil yang baik tentunya harus ditunjang dengan adanya data yang akurat sesuai apa yang hendak diketahui. Data tersebut digali dari sumber – sumber yang terlibat dalam masalah yang diteliti. Sumber data sendiri merupakan seorang yang bertindak sebagai informan yang sesuai untuk dijadikan dan dipilih sebagai sumber guna memperoleh data yang relevan dengan penelitian. Sedangkan data – data tersebut harus digali dan diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data dari penelitian ini terdapat dari dua jenis data yakni sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini sumber data primer peneliti terdapat pada dua lokasi, yakni pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi langsung dari Kepala Tata Usaha PPN Prigi Bapak Hartono, SE. Kepala Seksi Operasional PPN Prigi Ibu Erawati Wulandari, S.Pi, MP. Kepala Seksi Pengembangan PPN Prigi Ibu Ir. Rini Wahjoeningtias serta beberapa

pegawai PPN Prigi. Sedangkan pada tempat kedua Tempat Pelangan Ikan PPN Prigi langsung dari petugas TPI Bapak Edi Yusuf. Serta beberapa nelayan yang berada di TPI.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara: data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Tahun Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2012 dan tahun 2013. Kepmen Kelautan dan Perikanan KEP.10/MEN/2004 tentang Kepelabuhan, Permen Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan. Jurnal nasional Analisis Indeks Kinerja Pengelolaan dan Indeks Kepuasan Pengguna di Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman Jakarta. Jurnal Perikanan dan Kelautan bulan Desember Volume 3 nomor 4, Jurnal nasional Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Dasar dan fungsional Dalam Strategi Peningkatan Produksi di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kota Tegal Jawa Tengah. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*. Volume 2, Nomor 1. Skripsi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Universitas Brawijaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Kualitas data yang didapat tergantung pada kualitas alat yang digunakan untuk mengukur atau mengambil data serta kualifikasi orang yang mengambil data. Sumber data atau informasi dapat diambil langsung oleh peneliti atau diambil dari dokumen – dokumen yang telah dikumpulkandan disusun oleh pihak lain.

Peneliti harus menerima apa adanya. Dalam penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan adalah, sebagai berikut.

1. Wawancara / *Interview*

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan petunjuk umum wawancara.

Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok – pokok yang akan ditanyakan dalam proses wawancara dengan sumber. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagaimana pada lampiran yang ditunjukkan kepada Pegawai PPN Prigi, Petugas TPI serta Nelayan

2. Observasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung untuk melihat kejadian – kejadian yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas nelayan di TPI PPN Prigi selama 3 hari mulai tanggal 5, 6, 7 April 2014

3. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang berupa rekaman atas suatu hal tertentu dari pihak yang menjadi fokus penelitian. Dalam dokumentasi ini peneliti dalam dokumentasi menggunakan media kamera digital dengan hasil berupa foto – foto kegiatan dari nelayan di kawasan sekitar PPN Prigi. Foto – foto tersebut terlampir pada lampiran.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk menggali data dalam penelitian, sehingga kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sugiyono (2011:222) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Dalam hal ini instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri, yaitu dengan menggunakan panca indra untuk menyaksikan secara langsung fenomena-fenomena yang diteliti. Serta terlibat langsung dalam fenomena tersebut, dalam rangka pengumpulan data untuk dianalisis nantinya.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), merupakan petunjuk atau pedoman yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan wawancara langsung dengan informan, terkait dengan masalah yang diteliti.
3. Catatan lapangan (*field note*), berisi tentang pokok-pokok informasi yang diperoleh selama peneliti melakukan wawancara dan observasi.

G. Analisa Data

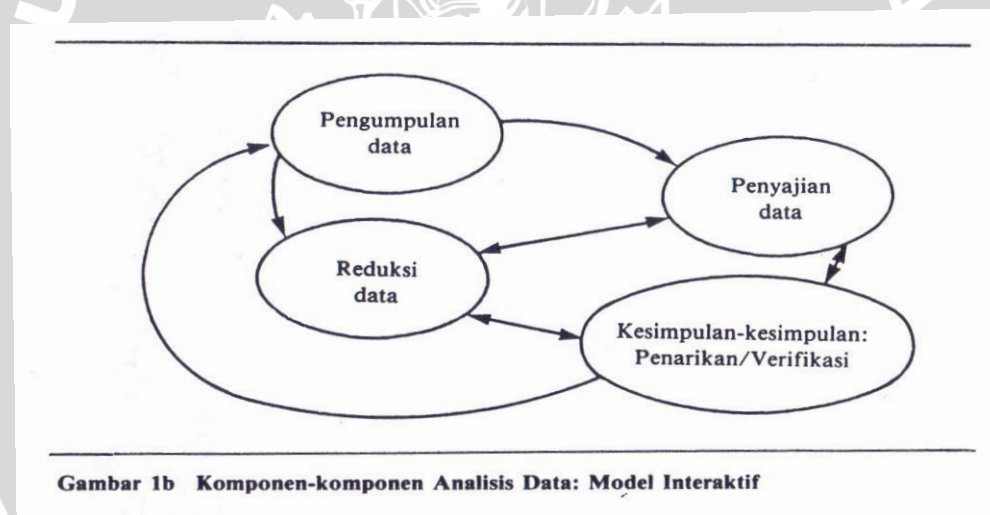
Analisa data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses penelitian, hal ini sangat penting karena analisa data menyangkut kekuatan analisa dan kemampuan dalam mendeskripsikan data situasi, peristiwa, dan konsepsi yang merupakan bagian dari obyek penelitian. Dengan analisa, data

dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah. Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, analisa data dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman (1992: 16-19), terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data penyajian data, penarikan kesimpulan / verifikasi. Pembahasan ketiga alur tersebut sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*) diartikan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan – catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, meringkas, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa hingga kesimpulan – kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian data (*data display*), penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian – penyajian akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh untuk menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian – penyajian tersebut. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif berbentuk teks naratif.

3. Menarik kesimpulan atau memverifikasi (*conclusion drawing or verifying*), kegiatan ini memberi makna yaitu mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab atau akibat proporsi. Verifikasi berarti meninjau ulang catatan-catatan lapangan, bertukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubyektif. Maka yang muncul harus diuji kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya, inilah yang bersifat validitas. Berikut ini alur analisa data model interaktif yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman.



Gambar 1b Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif

Gambar 1. Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif

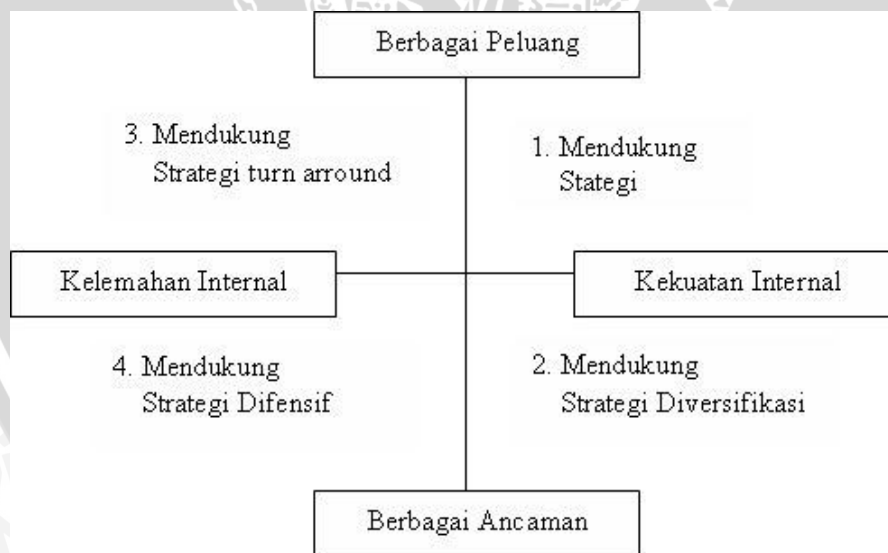
Sumber: Miles dan Huberman (1992:20)

1. Analisis SWOT

Menurut Rangkuni (2005: 18–19) menjelaskan bahwa dalam menganalisa strategi memerlukan alat untuk menganalisa strategi – strategi yang diterapkan pada organisasi. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang

dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*), dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan. Dengan demikian untuk perencanaan strategis harus menganalisis faktor – faktor strategis (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

Analisis SWOT merupakan singkatan dari lingkungan internal *strengths* dan *weaknesses* serta lingkungan eksternal *opportunities* dan *threats*. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang (*opportunities*) dan Ancaman (*threats*) dengan faktor internal Kekuatan (*strengths*) dan Kelemahan (*weaknesses*) (Rangkuni, 2005: 19 – 20).



Gambar 2. Diagram Analisis SWOT

Sumber: Rangkuni, (2005: 19)

Kuadrat 1: Merupakan situasi yang sangat menguntungkan perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam konteks ini

adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).

Kuadrat 2: Meskipun menghadapi berbagai ancaman, masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diverifikasi (produk/pasar).

Kuadrat 3: Fokus strategi ini adalah meminimalkan masalah – masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik.

Kuadrat 4: Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana dalam hal ini menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

2. Matrik SWOT

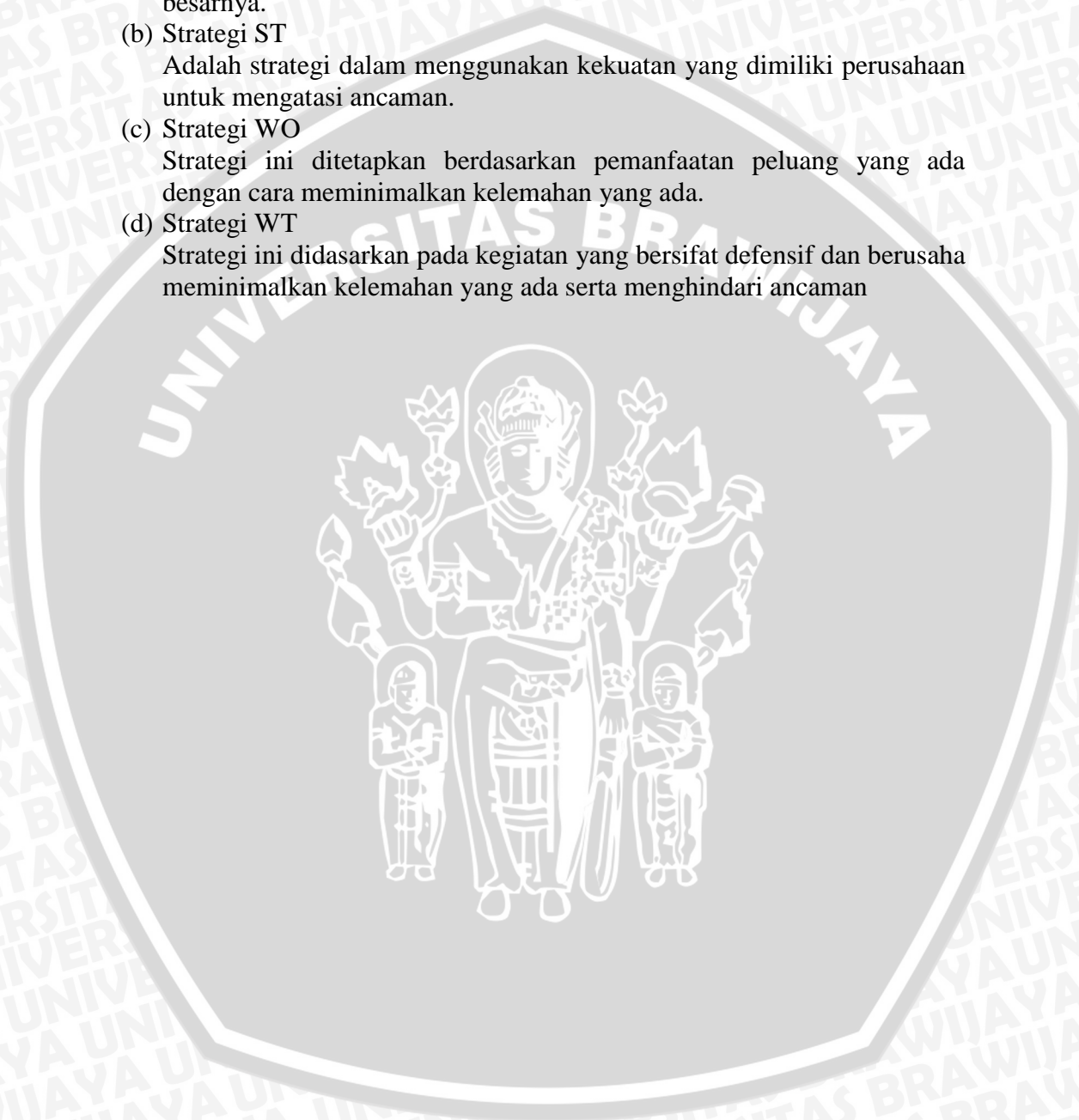
Menurut Rangkuni (2005: 31–32) menjelaskan bahwa matrik SWOT merupakan alat yang dipakai untuk menyusun faktor – faktor strategis perusahaan. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis.

Tabel 4. Matrik SWOT

| | | |
|--|---|--|
| IFAS | STRENGTHS (S) | WEAKNESSES (W) |
| EFAS | - Tentukan 5 – 10 faktor – faktor kekuatan internal | - Tentukan 5 – 10 faktor – faktor kelemahan internal |
| OPPRTUNIES (O) | STRATEGI (SO) | STRATEGI (WO) |
| - Tentukan 5 – 10 faktor peluang eksternal | Ciptakan strrtagei yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang | Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang |
| TREATHS (T) | STRATEGI (ST) | STRATEGI (WT) |
| - Tentukan 5 – 10 faktor ancaman internal | Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman | Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang |

Sumber: Rangkuni, (2005: 31)

- (a) Strategi SO
Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar – besarnya.
- (b) Strategi ST
Adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.
- (c) Strategi WO
Strategi ini ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
- (d) Strategi WT
Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan Topografis Desa Tasikmadu - Trenggalek

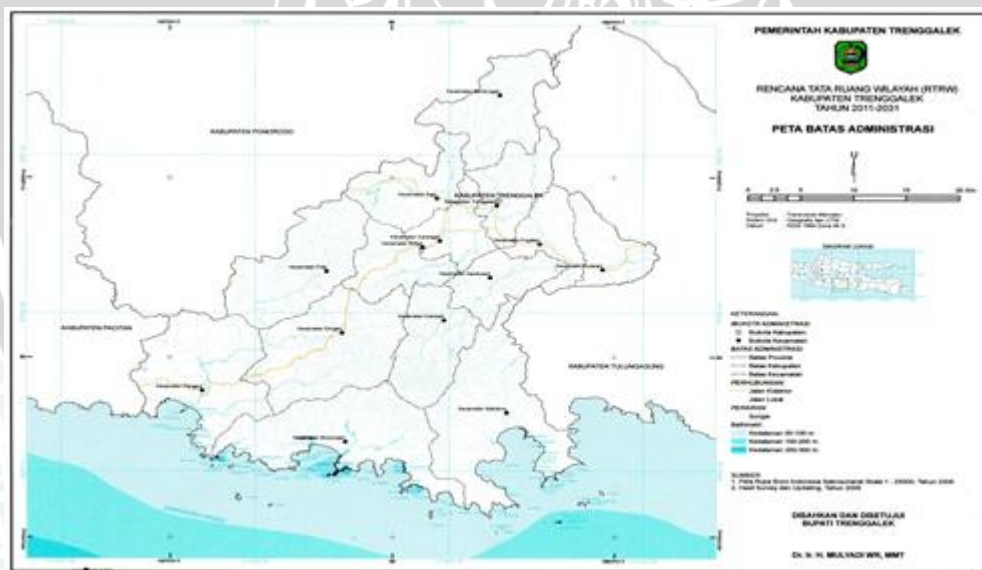
Trenggalek adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan berada di Trenggalek Kota. Kabupaten ini menempati wilayah seluas 1.205,22 km² yang dihuni oleh ± 700.000 jiwa. Kabupaten Trenggalek berada di pesisir selatan Jawa Timur. ± 180 km arah barat daya Surabaya, terletak pada koordinat 7° 53 - 8° 34 LS dan 111° 24 -122° 11 BT dengan luas total ± 1.261 km² dengan batas wilayah sebagai berikut:

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Sebelah Utara | : Kabupaten Tulungagung dan Ponorogo |
| Sebelah Timur | : Kabupaten Tulungagung |
| Sebelah Selatan | : Samudra Hindia |
| Sebelah Barat | : Kabupaten Pacitan |

Luas wilayah Kabupaten Trenggalek secara topografi sebagian besar wilayah $\frac{2}{3}$ merupakan dataran tinggi dan sebagian kecil $\frac{1}{3}$ bagian lainnya merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian berkisar 0 sampai dengan 1.5000 m dari permukaan laut. Tinggi dari permukaan laut pada beberapa wilayah di Kabupaten Trenggalek sekitar ± 150 – 450 m terdapat pada Kecamatan Panggul, Munjungan, Watulimo bagian tengah, Kampak bagian timur, Gandusari, Karang Barat Daya, dan sebagian Kecamatan Bendungan.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 Kecamatan dimana ketiga diantaranya mempunyai wilayah pesisir yakni, Watulimo, Panggul dan Munjungan. Munjuangan yang mempunyai wilayah paling luas yakni \pm 15.480 ha. Sedangkan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Pogalan seluas \pm 4.180 ha.

Wilayah pesisir Trenggalek membentang sepanjang \pm 96 km dan sebagian besar membentuk teluk, Seperti Teluk Prigi (Kecamatan Watulimo), Teluk Panggul (Kecamatan Panggul), dan Teluk Sumbreng (Kecamatan Munjungan). Dimana ketiganya, kawasan Teluk Prigi yang paling besar perkembangan perikanan tangkapnya yang ditunjang dengan beragam sarana prasarana.



Gambar 3. Peta Administratif Kabupaten Trenggalek

Sumber: Google.com

Kecamatan Watulimo terletak pada 111° - 112° BT dan 7° - 8° LS, secara administratif berbatasan dengan wilayah lain, diantaranya:

Sebelah Utara : Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kampak dan Kabupaten Trenggalek.

Sebelah Timur : Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung.

Sebelah Selatan : Samudra Hindia.

Sebelah Barat : Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Kampak.

Kecamatan Watulimo memiliki wilayah seluas ± 15.444 ha yang terdiri dari 12 desa diantaranya Desa Tasikmadu, Desa Prigi, Desa Margamulyo, Desa Sawahan, Desa Dukuh, Desa Slawe, Desa Gemaharjo, Desa Pakel, dan Watuagung.

Kecamatan Watulimo merupakan daerah berbukit, berada pada ketinggian 5 sampai 1.000 meter di atas permukaan laut (DPL), dengan kemiringan $> 40\%$. Sumberdaya hutan merupakan potensi dominan bagi penduduk setempat mencapai areal ± 13.000 ha. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir ke wilayah Teluk Prigi mencapai tangkapan (*catchment*) sekitar ± 11.041 ha dari wilayah Watulimo. Masalah utama pada daerah ini adalah erosi dan lahan kritis. Kegiatan penduduk pada wilayah dataran tengah adalah nelayan dan pariwisata. Sedangkan pada daerah yang lebih tinggi, usaha lahan kering dan kehutanan merupakan bagian dari ketinggian penduduk. Sektor unggulan yang dikembangkan untuk daerah ini adalah pariwisata dan perikanan laut.

Panjang pantai selatan Kabupaten Trenggalek ± 96 km dimana sebagian besar pantainya berbentuk teluk, antara lain: Teluk Panggul, Teluk Munjungan, dan yang paling besar adalah Teluk Prigi. Luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Kabupaten

Trenggalek adalah 35.424 km² yang merupakan wilayah laut yang biasanya dieksploitasi oleh nelayan.

Teluk Prigi yang ada di Kecamatan Watulimo memiliki 3 pantai, yaitu Pantai Damas di Desa Karangandu, Pantai Prigi di Desa Tasikmadu, dan Pantai Karangongso termasuk Pantai Pasir Putih terletak di Dusun Karangongso. Di Desa Tasikmadu panjang total garis Pantai Prigi Mencapai \pm 25,6 km, dengan garis pantai landai sepanjang 11,15 km dan sisanya (14,45 km) adalah tepian yang curam dan saat ini sudah abrasi dan kikisan laut.

Desa Tasikmadu terletak pada koordinat 8°17'43" - 8°24'25" LS dan 111°43'08" - 111° 45' 08" BT. Secara administratif Desa Tasikmadu memiliki batasan wilayah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Desa Tanggul Kundung Kecamatan Besuki, dan Kabupaten Tulungagung. |
| Sebelah Selatan | : Samudra Hindia. |
| Sebelah Barat | : Desa Prigi. |
| Sebelah Timur | : Samudra Hindia. |

Luas Wilayah Desa Tasikmadu sekitarnya \pm 26.980.474 km², yang terdiri dari 3 dusun yakni Ketawang, Gares, dan Karangongso, 6 RW dan 37 RT. Ketinggian tempat 6 meter diatas permukaan laut (DPL) dengan curah hujan rata- rata 2.110 mm/tahun. Jenis tanah dari ordo tanah entisol berjenis *rigosol*, *alluvia* pasir dan *litosol*. Kawasan Tasikmadu dialiri 2 (dua) sungai yang mengalir sepanjang tahun yang digunakan untuk irigasi.

Secara umum. Kondisi topografi Desa Tasikmadu adalah perpanjangan lereng pengunungan kapur selatan dengan rata – rata ketinggian 3 m diatas permukaan laut (DPL). Struktur tanah sangat bagus untuk tanaman jati dan terdapat area persawahan yang cukup luas. Perairan Desa Tasikmadu merupakan perairan berbentuk teluk dengan dasar lumpur bercampur pasir dan sedikit berbatu karang. Teluk ini mempunyai kedalam 6 – 45 meter yang dinamakan Teluk Prigi.

(a) Kondisi Sosial Masyarakat Desa Tasikmadu

Jumlah penduduk Desa Tasikmadu pada tahun 2009 sebanyak 12.025 jiwa yang terdiri dari 6.078 penduduk laki – laki dan 5.947 penduduk perempuan dengan jumlah KK sebanyak 3.434 KK. Penduduk Desa Tasikmadu mempunyai pencaharian sebagai petani dan nelayan sekitar 3.343 orang, pedagang sekitar 512 orang. Berdasarkan mata pencaharian penduduk terlihat bahwa sektor perikanan dan pertanian merupakan sektor yang penting menjadi tulang punggung penggerak perekonomian desa. Sektor perikanan menjadi motor penggerak utama masyarakat Desa Tasikmadu yang didukung dengan adanya Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN Prigi). Selain fasilitas pelabuhan juga terdapat KUD Mina, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), *Cold Storage*, pabrik tepung ikan dan fasilitas lain sebagai penggerak perekonomian masyarakat Desa Tasikmadu.

Mata pencaharian penduduk Desa Tasikmadu bervariasi dan perikanan bukanlah profesi yang dominan di Desa Tasikmadu, meskipun merupakan desa pesisir. Hal ini disebabkan karena masyarakat Desa Tasikmadu juga berprofesi

sebagai petani baik pemilik, penggarap maupun buruh tani pada musim tanam dan menjadi nelayan pada saat musim ikan. Selain menjadi anak buah kapal (ABK) yang istilah lokal ialah ngadim, mata pencaharian masyarakat di kawasan ini adalah kuli angkut maupun pedagang.

Secara umum penduduk Desa Tasikmadu Jumlah penduduk berjenis kelamin pria lebih dominan daripada jumlah wanita. Sebagaimana terangkum pada table, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin berupa angka.

Tabel 5. Populasi Penduduk Desa Tasikmadu Berdasarkan Jenis Kelamin

| NO | JENIS KELAMIN | JUMLAH | % |
|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 1 | Pria | 6078 | 51% |
| 2 | Wanita | 5947 | 49% |
| JUMLAH | | 12025 | 100% |

Sumber: Kantor Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo, 2011

Dari tabel diatas dapat menjelaskan bahwa popolasi berjenis kelamin pria berjumlah 6087 jiwa (51%), sedangkan jumlah wanita 5947 jiwa (49%), dapat disimpulakn bahwa, di Desa Tasikmadu peran pria lebih dominan dalam pembangunan desa, akan tetapi melihat jumlah wanita yang jumlahnya hampir mendekati 50% namun peran wanita dalam pembangunan desa tidak sedikit dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Usia produktif merupakan jangka waktu usia seorang manusia untuk melakukan upaya produktif. Di Indonesia usia produktif berkisar antara 18-64 tahun. Usia penduduk yang masih produktif di Desa Tasikmadu masih sangat

dominan daripada populasi penduduk non produktif sebagaimana tersebut pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Jumlah Populasi Penduduk Desa Tasikmadu Berdasarkan Usia Produktif

| NO | JENIS KELAMIN | JUMLAH | % |
|---------------|----------------------|--------------|-------------|
| 1 | Usia Tidak Produktif | 2887 | 24% |
| 2 | Usia Produktif | 9138 | 76% |
| JUMLAH | | 12025 | 100% |

Sumber: Kantor Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo, 2011

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk yang berada dalam usia produktif berjumlah 9138 jiwa (76%), sedangkan dalam usia tidak produktif berjumlah 2887 jiwa (24%). Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Desa Tasikmadu masih berpotensi besar dalam proses pembangunan perekonomian desa.

Proses pembangunan wilayah pesisir seperti yang terjadi di Desa Tasikmadu sering tidak menuai keberhasilan. Permasalahan yang banyak timbul bersumber dari rendahnya tingkat pendidikan penduduk di wilayah pesisir. Tingkat pendidikan Desa Tasikmadu sebagaimana terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 7. Jumlah Populasi Penduduk Desa Tasikmadu Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| NO | JENIS PENDIDIKAN | JUMLAH | % |
|---------------|--|--------------|----------------|
| 1 | SD/SEDERAJAT | 5681 | 47,31% |
| 2 | SLTP/SEDERAJAT | 1968 | 16,34% |
| 3 | SLTA/SEDERAJAT | 1188 | 9,88% |
| 4 | DIPLOMA I/II, AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA | 56 | 0,45% |
| 5 | DIPLOMA IV/STRATA I, II/III | 114 | 0,95% |
| 6 | Belum Tamat SD/SEDERAJAT | 954 | 7,90% |
| 7 | Tidak/Belum Sekolah | 2064 | 17,16% |
| JUMLAH | | 12025 | 100,00% |

Sumber: Kantor Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo, 2011

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk yang tamat SD mencapai 4048 jiwa (33,65%). SLTP/Sederajat berjumlah 1968 jiwa (16,34%), SLTA/Sedarajat berjumlah 1188 jiwa (9,88%), Akademi/Diploma III/Sarjana Muda berjumlah 34 jiwa (0,28%), Diploma I/II 22 jiwa (0,18%), Diploma IV/Strata I berjumlah 103 jiwa (0,86%), Strata II/III berjumlah 11 jiwa (0,09%), belum tamat SD/Sederajat 954 jiwa (7,90%), tidak/belum sekolah berjumlah 2064 jiwa (17,16%) dan tidak ada keterangan berjumlah 1633 jiwa (13,66%). Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan dan fasilitas pendidikan di Desa Tasikmadu dikatakan relatif baik, akan tetapi perlu adanya peningkatan pendidikan, agar tingkat kesejahteraan penduduk dapat meningkat pula.

Berdasarkan data kependudukan Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo, diperoleh data tentang mata pencaharian atau pekerjaan penduduk Desa Tasikmadu yang bervariasi, mulai dari nelayan, perkebunan, pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berikut tabel

populasi penduduk Desa Tasikmadu berdasarkan mata pencaharian, sebagai berikut:

Tabel 8. Jumlah Populasi Penduduk Desa Tasikmadu Berdasarkan Pekerjaan

| NO | JENIS PEKERJAAN | JUMLAH | % |
|---------------|----------------------------|--------------|-------------|
| 1 | Petani / Perkebunan | 1458 | 12% |
| 2 | Belum / Tidak Bekerja | 1750 | 15% |
| 3 | TKI | 100 | 1% |
| 4 | Pelajar / Mahasiswa | 1774 | 15% |
| 5 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 150 | 1% |
| 6 | Nelayan/ Perikanan | 1885 | 16% |
| 7 | Perdagangan | 512 | 4% |
| 8 | Mengurus Rumah Tangga | 1931 | 16% |
| 9 | Lain – lain | 2465 | 20% |
| JUMLAH | | 12025 | 100% |

Sumber: Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo, 2011

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa selain profesi sebagai nelayan, penduduk Desa Tasikmadu juga melakukan pekerjaan – pekerjaan lain sebagai Petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pedagang. Dengan bervariasinya pekerjaan yang digeluti menandai telah adanya perubahan pola pikir masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

(b) Potensi Kegiatan Perikanan

Desa Tasikmadu merupakan daerah pusat sentra perikanan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Hal ini didukung oleh keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (PPN Prigi) yang di bangun diatas lahan seluas 27,5 ha dengan luas tanah 11,5 ha dan luas kolam labuh 16 ha, sebagai sentra kegiatan perikanan dan perekonomian yang tepatnya terletak di Teluk Prigi pada

koordinat 111° 43' 58" BT dan 08° 17' 22" LS, Desa Tasikamadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Propinsi Jawa Timur.

PPN Prigi merupakan sentra kegiatan perikanan dan perekonomian masyarakat. Dimana dapat menjaring nelayan yang berkerja di sekitar lokasi pelabuhan. Kelompok nelayan adalah kelompok nelayan yang dominan yang merupakan ujung tombak dari kegiatan perikanan tangkap. Nelayan bebas yang mendaratkan hasil tangkapannya di sekitar PPN Prigi tercatat 5342 orang baik sebagai anak buah kapal (ABK) maupun pemilik modal. Pada tabel disajikan jumlah nelayan menurut alat tangkap PPN Prigi Tahun 2009 – 2013.

Tabel 9. Jumlah Nelayan menurut Alat Tangkap PPN Prigi Tahun 2009 - 2013

| NO | Jenis Alat Tangkap | Jumlah Nelayan | | | | |
|----|--------------------|----------------|-------|-------|------|------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Pukat Cincin | 3.750 | 3.925 | 3.975 | 3800 | 3525 |
| 2. | Pancing Tonda | 360 | 430 | 430 | 395 | 315 |
| 3. | Jaring Insang | 129 | 129 | 129 | 111 | 81 |
| 4. | Payang | 608 | 608 | 456 | 160 | 150 |
| 5. | Pancing Prawe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pukat Pantai | 1.008 | 984 | 950 | 0 | 0 |
| 7. | Pancing Ulur | 542 | 542 | 542 | 867 | 876 |
| 8. | Jaring Klitik | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 6.503 | 6.724 | 6.588 | 5342 | 4947 |

Sumber: Laporan Tahunan PPN Prigi Tahun 2013

Jumlah nelayan pada tahun 2013 berkurang menjadi 4947 orang dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu 5342 orang, hal ini disebabkan berkurangnya armada perikanan seperti alat tangkap Pukat Cincin dari 152 unit

menjadi 141 unit, jaring insang dari 37 unit menjadi 27 unit, pancing tonda dari 79 unit menjadi 63 unit.

Upaya peningkatan produksi perikanan terus diupayakan baik melalui kegiatan penyuluhan maupun kegiatan lain yang mendukung peningkatan produksi perikanan. Produksi hasil tangkap yang didaratkan pada PPN Prigi tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012. Penurunan tersebut dikarenakan musim penangkapan ikan tahun 2013 lebih singkat dibandingkan tahun 2012 yakni hanya dari bulan Agustus sampai dengan Nopember sedangkan tahun 2012 musim penangkapan ikan terjadi pada bulan Juli sampai Desember. Selengkapnya data tentang perkembangan perikanan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 10. Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2009 – 2013

| No. | Tahun | Volume (Kg) | Keterangan |
|-----|-------|-------------|--------------|
| 1 | 2009 | 23.571.671 | - |
| 2 | 2010 | 7.676.236 | Turun 67,43% |
| 3 | 2011 | 40.896.857 | Naik 432,77% |
| 4 | 2012 | 36.735.488 | Turun 10,18% |
| 5 | 2013 | 30.509.213 | Turun 20,41% |

Sumber: Laporan Tahunan PPN Prigi Tahun 2013

Produksi perikanan yang didaratkan selama tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11. Pendaratan Ikan di PPN Prigi Tahun 2013

| No. | Bulan | Produksi (kg) | Nilai Produksi (Rp.) |
|---------------|-----------|-------------------|------------------------|
| 1 | Januari | 85.587 | 784.040.425 |
| 2 | Pebruari | 135.940 | 1.018.809.100 |
| 3 | Maret | 206.606 | 1.982.181.100 |
| 4 | April | 1.314.249 | 7.374.444.800 |
| 5 | Mei | 1.089.395 | 8.371.929.650 |
| 6 | Juni | 363.294 | 3.643.980.250 |
| 7 | Juli | 276.622 | 3.579.326.000 |
| 8 | Agustus | 3.495.222 | 24.141.686.700 |
| 9 | September | 7.635.773 | 41.758.773.800 |
| 10 | Oktober | 5.953.441 | 26.948.215.450 |
| 11 | Nopember | 8.255.686 | 17.343.739.300 |
| 12 | Desember | 1.697.398 | 4.292.983.950 |
| Jumlah | | 30.509.213 | 141.240.110.525 |

Sumber: Laporan Tahunan PPN Prigi Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa musim penangkapan ikan terjadi pada bulan Agustus sampai Nopember dengan puncak musim penangkapan ikan pada bulan Nopember. Pada bulan Nopember produksi ikan yang didaratkan mencapai 8.255.686 kg atau 27.05% dari total pendaratan ikan. Sedangkan pendaratan ikan yang paling sedikit terjadi pada bulan Januari yaitu 85.587 kg atau 0.28%.

Volume jenis ikan yang terbanyak didaratkan di PPN Prigi adalah ikan Tongkol Lisong, Ubur – Ubur, Layang Deles, Tongkol Krai, dan Lemuru. Jumlah produksi jenis ikan dominan adalah Tongkol Lisong 12.611.154 kg atau 41,50% dengan nilai produksi Rp. 66.535.760.500,-, Ubur – Ubur 7.122.460 kg atau 23,35% dengan nilai Rp. 5.904.660.000,-, sedangkan sisanya atau ikan

jenis lainya adalah sebesar 10.725.599 kg atau 35,15% dengan nilai produksi 68.799.690.025,-. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 12. Jenis Ikan terbanyak di PPN Prigi Tahun 2013

| No. | Jenis Ikan | Volume (kg) | Nilai (Rp.) |
|-------------|----------------|-------------|-----------------|
| 1. | Tongkol Lisong | 12.661.154 | 66.535.760.500 |
| 2. | Ubur - ubur | 7.122.460 | 5.904.660.000 |
| 3. | Layang Deles | 5.496.542 | 30.308.560.700 |
| 4. | Tongkol Krai | 2.187.316 | 13.575.029.500 |
| 5. | Lemuru | 1.219.545 | 3.896.106.900 |
| 6. | Ikan lainya | 1.822.196 | 21.019.992.925 |
| J u m l a h | | 30.509.213 | 141.240.110.525 |

Sumber: Laporan Tahunan PPN Prigi Tahun 2013

Produksi perikanan pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012, kondisi ini disertai pula dengan penurunan nilai produksi perikanan. Nilai produksi perikanan di PPN Prigi pas tahun 2013 adalah Rp. 141.240.110.525,- lebih kecil dibandingkan nilai produksi tahun 2012 yaitu Rp.152.149.219.200,-.

2. Gambaran Umum Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (PPN Prigi).

Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan ditetapkan bahwa Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan

yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

PPN Prigi adalah pelabuhan perikanan pada salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan dari wilayah Propinsi Jawa Timur yakni berada di Kabupaten Trenggalek Kecamatan Watulimo Desa Tasikmadu. Tepatnya berada di Teluk Prigi. Berikut disajikan lokasi PPN Prigi:



Gambar 4. Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (PPN Prigi)

Sumber: Google.com

(a) Kedudukan dan Fungsi Pelabuhan Nusantara Prigi

Sesuai dengan Undang – Undang Noor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan perlabuhan perikanan, yang menyebutkan bahwa pelabuhan perikanan memiliki fungsi yang terkait dengan kesejahteraan nelayan diantaranya, sebagai berikut:

- (1) Pelayanan Tambat labuh dan kapal perikanan.

- (2) Pelayanan bongkar muat.
- (3) Pelayanan pembinaan mutu dan pengelolaan hasil perikanan.
- (4) Pemasaran dan distribusi ikan.
- (5) Pengumpulan data tangkap perikanan dan hasil perikanan.
- (6) Tepat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan
- (7) Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan, dan
- (8) Pelaksanaan kesyabandaran.

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 menyebutkan bahwa Pelabuhan Perikanan sebagai pendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan, dan pemasaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

(1) Fungsi Pemerintahan

Merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan.

Fungsi pemerintah meliputi:

- (a) Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan.
- (b) Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan.
- (c) Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan.
- (d) Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan.
- (e) Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan.
- (f) Pelaksanaan kesyahbandaran.
- (g) Tepat pelaksanaan fungsi karantina ikan.
- (h) Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan.
- (i) Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan.
- (j) Pemantauan wilayah pesisir.
- (k) Pengendalian lingkungan.
- (l) Kepabeanan dan/atau.

(m) Keimigrasian.

Selain memiliki fungsi pemerintahan diatas, pelabuhan perikanan dapat melaksanakan fungsi pemerintahan lainnya yang terkait dengan pengelolaan perikanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

(2) Fungsi pengusaha

Fungsi pengusaha meliputi:

- (a) Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan.
- (b) Pelayanan bongkar muat ikan.
- (c) Pelayanan pengolahan hasil perikanan.
- (d) Pemasaran dan distribusi ikan.
- (e) Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan.
- (f) Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan.
- (g) Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan.
- (h) Wisata bahari; dan/atau
- (i) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

(b) Dasar Hukum

Perundang – undangan dan peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum pengelolaan PPN Prigi adalah:

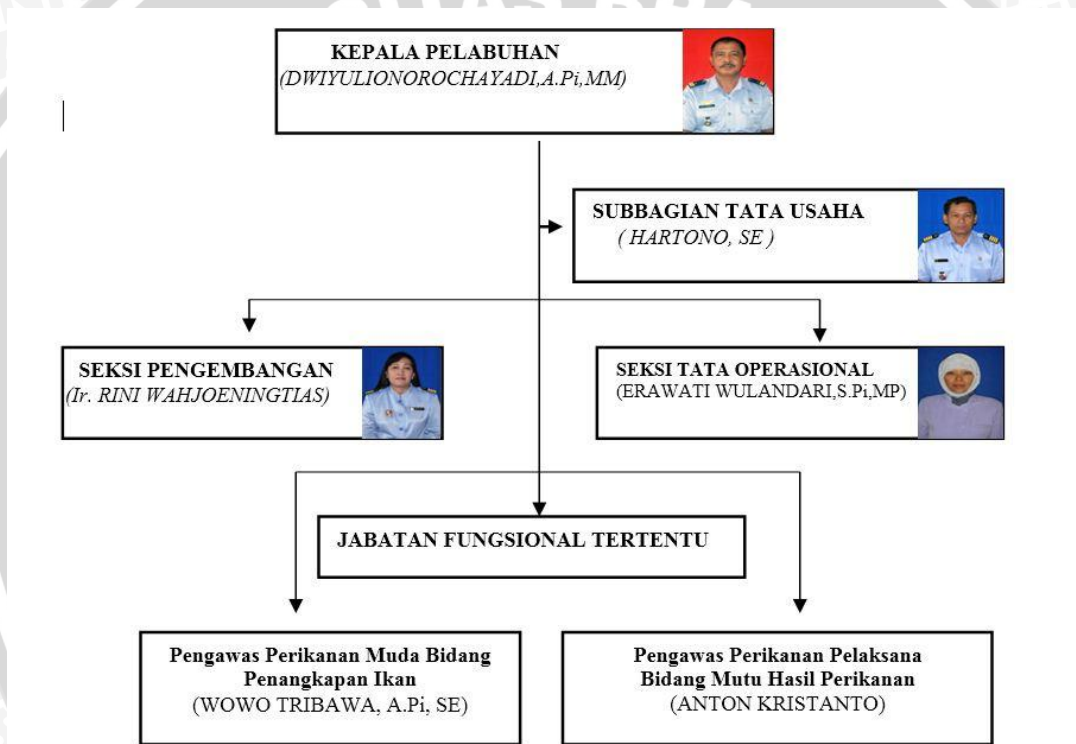
- (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan;

- (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- (7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.06/MEN/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan sebagaimana diubah dengan PER.19/MEN/2008 tanggal 6 Oktober 2008 diubah lagi dengan PER.29/MEN/2010 yang kemudian diubah lagi PER.39/MEN/2013 tanggal 27 Desember 2013;
- (8) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.05/MEN/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.49/MEN/2011 dan diubah kembali dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI;
- (9) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan;
- (10) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.09/MEN/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- (11) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.19/SJ-KKP/KP.430/2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengangkatan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.
- (12) Surat Keputusan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Nomor B.634/PPNP/OT.200/IV/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Revisi SK Nomor 09/PPNP/OT.200/I/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Struktur Organisasi, Personalia, Uraian Tugas dan Tata Kerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

(c) Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.06/MEN/2007 tanggal 25 Januari sebagaimana diubah dengan PER.19/MEN/2008 tanggal 6 Oktober 2008 yang diubah lagi dengan PER.29/MEN/2010 yang kemudian diubah lagi PER.39/MEN/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan maka Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi termasuk dalam kriteria pelabuhan

perikanan yang diusahakan dimana terdapat dua kepemilikan aset yaitu yang dikelola oleh PPN Prigi dan Perum Perikanan Indonesia (Perindo) cabang Prigi. Pelabuhan Perikanan Nusantara adalah Unit Pelaksana Teknis di Bidang pelabuhan perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Gambar 5. Struktur Organisasi Pelabuhan Nusantara Prigi Tahun Anggaran 2013

Sumber: Laporan Tahunan PPN Prigi Tahun 2013

(d) Jumlah Pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Dalam menetapkan jumlah pegawai, PPN Prigi berpedoman kepada struktur organisasi yang dirinci ke dalam jenis dan sifat pekerjaan serta beban kerja dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan ini ditempuh guna meningkatkan

efisiensi dan efektivitas pegawai di lingkungan PPN Prigi. Jumlah pegawai PPN Prigi pada tahun 2013 sebanyak 89 orang terdiri dari 60 orang PNS dan 29 orang tenaga lepas. Tenaga lepas ini dikontrak selama satu Tahun Anggaran (Januari – Desember 2013) dengan berbagai latar belakang pendidikan untuk ditempatkan pada berbagai bidang antara lain petugas administrasi, pramudi, petugas pelayanan jasa, petugas kebersihan serta petugas keamanan. Data perkembangan jumlah dan komposisi pegawai PPN Prigi dalam kurun 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13. Perkembangan Jumlah Pegawai Tahun 2009 - 2013

| No. | Tahun | PNS | CPNS | Tenaga Harian Lepas | Jumlah |
|-----|-------|-----|------|---------------------|--------|
| 1. | 2009 | 61 | 2 | 22 | 85 |
| 2. | 2010 | 57 | 2 | 27 | 86 |
| 3. | 2011 | 59 | 4 | 27 | 90 |
| 4. | 2012 | 60 | - | 30 | 90 |
| 5. | 2013 | 60 | - | 29 | 89 |

Sumber: Laporan Tahunan PPN Prigi Tahun 2013

B. Penyajian Data

1. Peran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Terhadap Nelayan

Pelabuhan perikanan tangkap yang pada hakekatnya ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan sekaligus untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan serta lingkungannya dan merupakan basis utama kegiatan perikanan tangkap yang dapat menjamin suksesnya aktivitas perikanan tangkap di laut. Pelabuhan perikanan berperan sebagai terminal bagi pelaku usaha yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dengan di darat ke dalam suatu sistem

usaha dan berdayaguna. Aktivitas penangkapan ikan di laut, yang dimulai dari keberangkatan kapal perikanan tangkap dari pelabuhan perikanan harus dilengkapi dengan bahan bakar (Solar atau Premium), perbekalan es (pengawet), perbekalan makanan bagi anak buah kapal (ABK) dan persiapan lainnya.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. yang menjelaskan bahwa pelabuhan perikanan, bahwa pelabuhan perikanan memiliki fungsi yang terkait dengan kesejahteraan nelayan diantaranya, sebagai berikut:

- (1) Pelayanan Tambat labuh dan kapal perikanan.
- (2) Pelayanan bongkar muat.
- (3) Pelayanan pembinaan mutu dan pengelolaan hasil perikanan.
- (4) Pemasaran dan distribusi ikan.
- (5) Pengumpulan data tangkap perikanan dan hasil perikanan.
- (6) Tepat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan
- (7) Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan, dan
- (8) Pelaksanaan kesyabandaran

Melihat fungsi – fungsi pelabuhan perikanan pada Undang – Undang Nomor Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang 31 tahun 2004 tersebut, maka pelabuhan perikanan menduduki posisi yang strategis dalam mengupayakan peningkatan produksi perikanan tangkap yang berimplikasi kepada peningkatan pendapatan negara, pemerintah daerah maupun peningkatan kepada kesejahteraan masyarakat nelayan.

Pembangunan pelabuhan perikanan dimaksudkan untuk menjadi salah satu motor penggerak utama bagi perekonomian masyarakat nelayan. Sehingga diharapkan akan berdampak positif bagi pertumbuhan perekonomian wilayah dan

kesejahteraan masyarakat nelayan. Oleh karena itu pengembangan pelabuhan perikanan dalam pengembangannya harus berdasarkan pada:

- (1) Adanya ketersediaan sumberdaya ikan secara berkesinambungan (*Resource based*).
- (2) Hasil tangkapan yang didaratkan haruslah memiliki nilai ekonomi dan pengolahan memberikan nilai tambah (*Market oriented*).
- (3) Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pemanfaatan, sehingga memberikan manfaat yang sebesar – besarnya terhadap masyarakat dan lebih khusus kepada *stakeholder*. (*Community based development*).
- (4) Keterkaitan antar sektor, dimana pelabuhan perikanan harus memberikan *multiplier effect* secara lintas sektor, lintas layah dan lintas pelaku bagi pengembangan baik pada industri hulu sampai pada industri hilir, sehingga keberadaanya akan mampu mendorong pertumbuhan industri perikanan yang bermanfaat bagi devisa negara.

Sebagai pusat aktifitas perekonomian industri perikanan, pelabuhan perikanan selayaknya mampu menghasilkan pendapatan untuk pelabuhan itu sendiri. Pendapatan tersebut berasal dari pemberian jasa pelayanan pelabuhan perikanan. Imbalan dari pelayanan jasa ini dapat perada dari penggunaan fasilitas, jasa dan barang yang dihasilkan dari pelabuhan perikanan. Selain pelabuhan perikanan dapat menghasilkan pendapatan bagi pelabuhan perikanan sendiri, disamping itu pelabuhan perikanan juga dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat nelayan di sekitar

pelabuhan perikanan dengan terbukanya atau adanya usaha akibat aktifitas perekonomian di pelabuhan perikanan.

Pelabuhan perikanan sebagai pusat kehidupan masyarakat nelayan dan pusat kegiatan industri perikanan, memiliki beberapa peranan, yakni:

- (1) Peranan yang berkaitan dengan aktivitas produksi perikanan, antara lain:
 - (a) Sebagai tempat mendaratkan hasil tangkapan perikanan.
 - (b) Sebagai tempat persiapan operasi perikanan tangkap.
 - (c) Sebagai tempat berlabuh kapal perikanan tangkap.
- (2) Peranan yang berkaitan dengan aktivitas distribusi perikanan, antara lain:
 - (a) Sebagai tempat transaksi jual beli hasil tangkapan perikanan.
 - (b) Sebagai terminal mendistribusikan hasil tangkapan perikanan.
 - (c) Sebagai terminal hasil tangkapan perikanan.
- (3) Peranan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat nelayan, antara lain:
 - (a) Kehidupan nelayan.
 - (b) Pengembangan ekonomi masyarakat nelayan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.
 - (c) Lalu lintas jaringan informasi antar nelayan dengan pihak luar.

Dari uraian terkait peran pelabuhan perikanan sebagaimana tersebut diatas berdasarkan peraturan perundang - undangan, maka untuk mengetahui peranan pelabuhan perikanan lebih lanjut terhadap masyarakat nelayan sekitar. Maka peneliti melakukan penelitian langsung berupa wawancara terhadap salah satu nelayan Bapak Sarno yakni anak buah kapal (ABK) dari nelayan di Prigi, menyatakan bahwa.

“dengan adanya dermaga ini mas, sekarang sangat membantu kami nelayan dan pengurus dalam menyiapkan berbekalan dan bongkar muat ikan, beda dengan jaman dulu harus berenang ke tengah untuk berangkat atau pada saat bongkar muat, dan dengan adanya dermaga untuk bongkar muat menjadi aman dari gelombang”. (Wawancara pada tanggal 7 April 2014 di Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa PPN Prigi berperan untuk mempermudah akses dan memberikan kemudahan pelayanan seperti persiapan bagi kapal perikanan untuk melaut dan mempermudah kapal perikanan untuk bongkar muat kapal dan memberikan rasa keamanan dalam berkerja.

Pelabuhan Perikanan Nusantara secara klasifikasinya merupakan Pelabuhan Perikanan Kelas B yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Departemen Kelautan dan Perikanan di bidang sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2004 Tentang Pelabuhan Perikanan, menyatakan bahwa ruang lingkup penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan sebagai prasarana perikanan meliputi perencanaan dan penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengusaha, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian.

Mengenai hal tersebut diatas tentang peranan atau lingkup pelabuhan perikanan untuk lebih jelasnya peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan di PPN Prigi yakni Kepala Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Bapak Hartono. SE, mengungkapkan bahwa:

“Pelabuhan Perikanan Nusantara ini memiliki peranan yang penting bagi nelayan, dimana pelabuhan menyediakan beberapa fasilitas yang dibutuhkan oleh nelayan untuk memajukan perikanan yang ada. Seperti adanya gedung TPI Barat dan TPI Timur, pabrik tepung ikan, *cold storage*, pabrik ikan, SPDN, kios semua itu disediakan oleh pelabuhan untuk kepentingan nelayan agar bisa maju”. (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2014 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, dapat dipahami bahwa peran pelabuhan adalah sebagai penyedia fasilitas sarana dan prasana yang diperuntukkan kepada nelayan agar nelayan dapat mengoptimalkan hasil perikanan yang ada di wilayah Pantai Prigi. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu Ir. Rini Wahjoeningtias selaku Kepala Bagian Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, ia menyatakan bahwa:

“Ruang likup kerja PPN yaitu memfasilitasi nelayan dengan menyediakan sarana dan prasarana perikanan bagi nelayan, seperti kami memfasilitasi nelayan dengan beberapa fasilitas yang dimiliki pelabuhan, selain itu pelabuhan juga memberikan pengawasan mutu apakah ada ikan hasil perikanan itu mengandung formalin atau tidak, sosialisasi atau penyuluhan, pengarahan, pengawasan kepada nelayan agar nelayan mendapat pengetahuan dan dapat berkembang yang nanti pada hasilnya juga akan mengarah kepada kesejahteraan nelayan itu sendiri”. (Wawancara pada tanggal 2 April 2014 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi).

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang menguatkan pernyataan Kepala Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Menjadikan pemahaman yang jelas terkait dengan peran pelabuhan perikanan kepada nelayan. Seperti yang telah disebutkan bahwa pelabuhan perikanan menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang diperuntukkan kepada nelayan seperti adanya dermaga pelabuhan yang memudahkan nelayan untuk persiapan penangkapan dan pembongkaran hasil tangkapan serta

mengamankan kapal perikanan dari gelombang laut, tersedianya gedung Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebanyak 2 unit yakni berada di wilayah barat pelabuhan dan timur pelabuhan, tersedianya SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan), tersedianya tempat pengepakan hasil tangkapan perikanan, tersedianya pabrik ikan dan tepung ikan, tersedianya gedung *cold storage*.

Semua fasilitas yang ada di PPN Prigi dapat terpenuhi demi membantu dan melayani masyarakat nelayan agar dapat berkembang dan menjadi maju. Selain itu Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi juga memberikan kegiatan penyuluhan, sosialisasi kepada kelompok masyarakat nelayan agar nelayan memiliki pengetahuan lebih agar masyarakat nelayan dapat mengoptimalkan hasil perikanan dan menjadi maju. Kegiatan penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat nelayan ini berupa pengendalian mutu hasil tangkapan ikan seperti pengawasan apakah ikan hasil tangkapan perikanan mengandung bahan berbahaya atau tidak seperti pemakaian bahan kimia formalin, kelengkapan dokumen kapal, dan sosialisasi peraturan pemerintah lainnya.

Kegiatan penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat nelayan tidak berhenti hanya pada para bapak – bapak nelayan saja tetapi juga kepada istri nelayan dengan mengadakan pelatihan pengolahan hasil tangkapan perikanan. Pengolahan hasil perikanan tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai jual dari hasil tangkapan perikanan, pengolahan hasil perikanan tersebut diolah menjadi produk – produk yang lebih modern dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi seperti pembuatan produk bakso ikan, nugget ikan, tempura ikan, *Ice Cream* ikan, dll. Dari usaha pengelolaan

tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai jual dari hasil perikanan dan dapat membantu memberdayakan istri – istri nelayan untuk mendapatkan lapangan kerja serta dan membuat lapangan kerja yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan yang ada yang ada di wilayah Pantai Prigi. Berikut disajikan data kelompok pengelolaan hasil perikanan, sebagai berikut:

Tabel 14. Kelompok Pengolah Hasil Perikanan

| NO | Nama Kelompok | Bidang / Usaha | Komoditas |
|----|--------------------|----------------|---|
| 1 | LMDH Gunung madu | Pengasap Ikan | Ikan Asap |
| 2 | Langgeng Jaya | Pengasap Ikan | Ikan Asap |
| 3 | Tuna | Pengasap Ikan | Ikan Asap |
| 4 | Mina Lestari | Pengasap Ikan | Ikan Asap |
| 5 | Bina Lestari | Pengasap Ikan | Ikan Asap |
| 6 | Cakalang | Pengasap Ikan | Ikan Asap |
| 7 | Cakalang 02 | Pengasap Ikan | Ikan Asap |
| 8 | Mina 7 | Pengolah Ikan | Abon, Nugget, Kaki Naga, Rolaade, Tahu Bakso, Bakso Pastel ikan |
| 9 | Citra Bahari | Pengolah Ikan | Otak – otak, Bakso, Abon, Kerupuk |
| 10 | Mina Prigi Lestari | Pemindang | Ikan Pindang |
| 11 | Mawar Melati | Pengering | Ikan Kering |
| 12 | Pasir Bahari | Pengasap Ikan | Ikan Asap |
| 13 | Mina Prima Mandiri | Pengolah Ikan | Nugget, Kaki Naga, Roallade, Bakso, Siomay, Samosa, Otak – otak, Abon, Stik Ikan, Pastel, Keripik Pisang Balado Ikan. |
| 14 | Ulam Sari | Pengolah Ikan | Abon, Pastel, Bakso, Kerupuk, Stik Ikan |
| 15 | Aroma Bahari | Pengolah Ikan | Ikan Bakar, Kerupuk Ikan |
| 16 | Sumber Pangan | Pengolah Ikan | Kerupuk |
| 17 | Al Mubarak | Pengolah Ikan | Nugget |
| 18 | Fawwas | Pengolah Ikan | Nugget |
| 19 | Teluk Prigi | Pengolah Ikan | Nugget, Samosa, Sringroll, Bakso |
| 20 | Harapan | Pengolah Ikan | Bakso, Kaki Naga, Nugget |
| 21 | Karangmadu | Pengolah Ikan | Bakso Ikan |

Sumber: POS Penyuluhan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2014

Dari tabel diatas dapat diketahui terdapat beberapa kelompok pengolah hasil tangkapan mulai dari yang tradisional yakni bidang pengasap ikan dengan hasil olahan ikan asap, sampai pada kelompok pembuatan produk modern dengan hasil olahan seperti Nugget, Kaki Naga, Stik Ikan, Bakso Ikan, dll. Dengan adanya kelompok pengolah seperti pada tabel diatas, menunjukkan bahwa PPN Prigi tidak hanya fokus kepada para bapak – bapak nelayan tetapi juga memberikan fokus kepada para istri nelayan yang berada di luar pelabuhan untuk bisa mengembangkan diri dengan membuat olahan – olahan dari hasil perikanan yang memiliki nilai ekonomis dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Peran pelabuhan perikanan seperti yang telah dijelaskan diatas, peran pelabuhan perikanan lain yang berkaitan dengan peredaran uang yang ada di wilayah pelabuhan perikanan. Telah dijelaskan bahwa pelabuhan perikanan merupakan tempat berkumpulnya seluruh aktifitas perekonomian masyarakat nelayan, mulai dari aktifitas produksi, pengelolaan, perbekalan, perbaikan maupun aktifitas yang lainnya yang berkaitan dengan aktifitas perikanan. Peredaran uang yang terjadi di pelabuhan perikanan berlangsung antara pelaku – pelaku usaha yang bergerak pada aktifitas perikanan. *Stakeholder* yang terlibat dalam peredaran uang dipelabuhan perikanan diantaranya, pengelola pelabuhan perikanan, nelayan, pedagang ikan, pengusaha pengelola, pengusaha perbekalan, pengusaha transportasi.

Nelayan mengalirkan dananya kepada pengusaha perbekalan dalam bentuk pembelian kebutuhan penangkapan perikanan, seperti bahan bakar, es, alat penangkap dan pengusaha perbengkelan sebagai imbalan atas perbaikan unit penangkapan. Bakul

mengalirkan dananya kepada nelayan dalam bentuk pembelian hasil tangkapan perikanan. Pengusaha transportasi untuk jasa angkutan perikanan atau pelaku usaha perikanan. Pengusaha perbekalan dalam bentuk pembelian es untuk penanganan atau untuk menjaga kesegaran hasil tangkapan perikanan. Pengusaha pengolahan mengalirkan dananya kepada pedagang ikan dalam bentuk pembelian bahan baku industri berupa ikan atau hasil perikanan lainnya. Pengusaha perbekalan dalam bentuk pembelian bahan yang akan digunakan dalam proses produksi seperti bahan bakar dan es. Dan kepada pengusaha transportasi sebagai imbalan atas jasa untuk mendistribusikan produk yang dihasilkan kepada konsumennya. ke semua pelaku usaha tersebut mengalirkan dananya kepada pihak pengelola pelabuhan perikanan yang merupakan imbalan jasa bagi penggunaan fasilitas, barang dan pelayanan yang disediakan oleh pihak pengelola perikanan.

Perhitungan jumlah uang yang beredar di PPN Prigi ini hanya terbatas pada sektor penangkapan yaitu mulai dari persiapan penangkapan, pendaratan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sampai ke kendaraan pengangkut atau pengelola hasil tangkap perikanan. Perhitungan jumlah uang beredar yang terbatas pada sektor penangkapan dimaksudkan sebagai gambaran bahwa perputaran uang disektor penangkapan cukup besar, yakni sebagai berikut:

- (1) Biaya operasional kapal meliputi biaya bahan bakar, anak buah kapal (ABK) dan perbekalan (air dan es). Biaya ini setiap kapal perikanan berbeda – beda tergantung jenis kapal yang digunakan.

- (2) Nilai produksi ikan. Nilai ini dipengaruhi oleh produksi ikan dan harga ikan.
- (3) Biaya pengangkutan, meliputi biaya tukang pikul muali pendaratan hasil tangkap dari kapal ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengangkutan ikan dari TPI ke kendaraan pengangkut atau ke pengelola ikan.
- (4) Biaya pengelolaan ikan, meliputi biaya pengelolaan ikan pindang dan ikan asin.
- (5) Biaya jasa fasilitas. Biaya ini dihasilkan dari pemanfaatan fasilitas di lingkungan pelabuhan seperti jas pas masuk area pelabuhan perikanan, pengelolaan gedung, MCK, jasa kebersihan, tambat labuh, instalasi listrik, air dan lain lain.

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait peredaran uang yang ada di lingkungan PPN Prigi. Maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada Kepala Bagian Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Ibu Ir. Rini Wahjoeningtias,

“Peredaran uang di pelabuhan didukung oleh banyak pihak, seperti nelayan, pedagang, pembeli, tukang pikul, tukang becak, kendaraan pengangkut, pengusaha perputaran uang berada disitu. Dan berbicara jumlah uang yang beredar di pelabuhan, pada setiap bulannya mengalami fluktuasi atau tidak tetap karena produksi dan penangkapan ikan sangat dipengaruhi oleh musim dan kondisi cuaca. Jadi kalau kondisi musim dan cuaca tidak bagus peredaran uang di pelabuhan juga turun dan sebaliknya. (Wawancara pada tanggal 2 April 2014 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi)

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat dipahami bahwa peredaran uang yang ada di PPN Prigi berada pada nelayan, pedagang, pembeli, tukang pikul, tukang becak dan pengusaha lainnya yang berkaitan dengan industri perikanan. Dan

peredaran uang yang ada di wilayah PPN Prigi tergantung pada musim dan kondisi cuaca. Seperti hasil wawancara peneliti kepada salah satu nelayan penguras Pak Toni yang peneliti temui dislokasi penelitian, ia mengatakan bahwa:

“Kalo bicara uang mas ya, kalo pas musim ikan kayak sekarang kami orang banyak duit mas dan kami orang ini jadi sibuk sibuknya di sini kami Gag ada yang kerja nganggur mulai dari nelayan, penguras, tukang pikul, mobil yang angkut ikan, pengrajin tempat ikan pindang semua kalo musim ikan kayak ini semua kerja. Tapi mas bagi nelayan sekarang pas musim ikan masukan mereka banyak beda dengan kami orang penguras Gag seperti dulu pendapatan kami turun, soalnya pembagian hasil ikan gag sama kayak dulu, sekarang sudah diawasi ketat oleh pelabuhan”. (Wawancara pada tanggal 7 April 2014 di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Untuk mengetahui jumlah uang yang beredar di PPN Prigi berikut disajikan data tabel jumlah uang yang beredar dilingkungan PPN Prigi selama tahun 2013

Tabel 15. Jumlah Uang Beredar di PPN Prigi Tahun 2013

| Bulan | Jumlah Uang Beredar Tiap Kegiatan (Rp.) | | | | Total Uang Beredar (Rp.) |
|---------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| | Biaya Operasional Kapal | Nilai Produksi Ikan | Biaya Pengangkutan | Biaya Jasa Fasilitas | |
| Januari | 353.950.000 | 784.040.425 | 2.137.500 | 268.956.205 | 1.409.084.130 |
| Pebruari | 531.200.000 | 1.018.809.100 | 3.397.500 | 215.367.325 | 1.768.773.925 |
| Maret | 768.650.000 | 1.982.181.100 | 5.175.000 | 236.409.344 | 2.992.415.444 |
| April | 2.741.900.000 | 7.374.444.800 | 32.850.000 | 491.372.516 | 10.640.567.316 |
| Mei | 2.534.800.000 | 8.371.929.650 | 27.225.000 | 526.183.796 | 11.460.138.446 |
| Juni | 1.154.500.000 | 3.643.980.250 | 9.075.000 | 268.906.326 | 5.076.461.576 |
| Juli | 1.397.500.000 | 3.579.326.000 | 6.925.000 | 246.654.748 | 5.230.405.748 |
| Agustus | 4.430.050.000 | 24.141.686.700 | 87.375.000 | 2.310.078.218 | 30.969.189.918 |
| September | 1.238.260.000 | 41.758.773.800 | 190.900.000 | 2.512.720.124 | 45.700.653.924 |
| Oktober | 800.280.000 | 26.948.215.450 | 148.825.000 | 2.519.459.359 | 30.969.189.918 |
| Nopember | 3.771.780.000 | 17.343.739.300 | 206.400.000 | 2.382.795.246 | 23.704.714.546 |
| Desember | 950.550.000 | 4.292.983.950 | 42.425.000 | 489.364.921 | 5.775.323.871 |
| Jumlah | 20.673.420.000 | 141.240.110.525 | 762.710.000 | 12.468.268.128 | 175.144.508.653 |

Sumber: Laporan Tahunan PPN Prigi Tahun 2013

Dari tabel jumlah uang beredar di PPN Prigi tahun 2013 dapat diketahui bahwa jumlah uang beredar di PPN perigi selama tahun 2013 adalah Rp. 175.090.263.155,-

atau mengalami penurunan sebesar Rp. 13.504.393.311,- bila dibandingkan pada Hun 2012 yaitu Rp. 188.594.656.466,-, hal ini karena pengaruh nilai produksi ikan pada tahun 2013 mengalami penurunan. Dapat diketahui bahwa penangkapan perikanan yang ada di Prigi tergantung pada musim dan kondisi cuaca. Yang berarti jumlah uang yang beredar di PPN Prigi pada setiap tahunnya mengalami fluktuasi atau ketiak tetapan, yang dikarenakan produksi perikanan ikan sangat di pengaruhi oleh musim dan kondisi cuaca. Seperti yang terlihat pada tabel diatas jumlah uang yang beredar mengalami tingkat tertinggi pada bulan September dan Nopember, hal ini disebabkan bahwa bulan tersebut merupakan puncak dimana musim penangkapan ikan diterangi dengan tingginya jumlah produksi yang didaratkan.

2. Startegi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Pengembangan industrialisasi perikanan Indonesia sudah dimuali sejak tahun 2012 oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan semakin fokus dilaksanakan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam menyukseskan kegiatan tersebut 400 dari 816 pelabuhan di Indonesia dijadikan sebagai kawasan industrialisasi perikanan terpadu, hal ini dilakukan dalam melaksanakan upaya peningkatan keberdayaan masyarakat nelayan, membuka kesempatan kerja dan menekan angka kemiskinan.

Terdapat tiga faktor penunjang yang menjadi perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai mesin penggerak industrialisasi perikanan tangkap agar berjalan secara optimal, ketiga faktor penunjang tersebut adalah peningkatan nilai tambah, peningkatan produktivitas usaha, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya ikan.

Keberhasilan pengembangan sektor perikanan tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana, dalam ini pelabuhan perikanan. Pengembangan sarana prasarana dalam pelabuhan perikanan ini adalah sebagai pejuang peningkatan produksi perikanan secara terpadu dengan unit pengolahan didarat yang berorientasi pasar domestik dan luar negeri.

Dalam mengembangkan pelabuhan perikanan, terdapat *Grand Strategy (The Blue Revolution Policies)* Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan sesuai dengan visi dan misi yaitu:

- (1) Meningkatnya peranan sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan.
- (2) Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan garam rakyat.
- (3) Meningkatnya pendapatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya Nilai Tukar Nelayan/Pembudidayaan Ikan.
- (4) Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya konsumsi ikan per kapita.

- (5) Meningkatnya branding produk perikanan dan *market share* di pasar luar negeri. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan.
- (6) Meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah menurunnya jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra.
- (7) Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah tugas Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola secara berkelanjutan.
- (8) Meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah jumlah pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar yang dikelola.
- (9) Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparaturngawas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah persentase wilayah perairan bebas *illegal fishing* dan kegiatan yang merusak SDKP.

Untuk terwujudnya visi dan misi *Grand Strategy (The Blue Revolution Policies)* Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat beberapa kebijakan yang ditempuh oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, antara lain adalah:

- (1) Penciptaan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Pengembangan infrastruktur.

- (3) Pembinaan manajemen.
- (4) Peningkatan kualitas SDM nelayan dan aparatur.

Sesuai dengan visi dan misi tersebut diatas, maka Pembangunan Pelabuhan

Perikanan Nusantara adalah:

- (1) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan.
- (2) Meningkatkan kualitas pelayanan fungsi pelabuhan perikanan.
- (3) Implementasi bisnis Perikanan Terpadu di Pelabuhan Perikanan.
- (4) Optimalisasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP).
- (5) Mengembangkan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.
- (6) Memperluas dukungan lintas sektor dan subsektor.
- (7) Meningkatkan mutu dan nilai tambah hasil perikanan.

PPN Prigi dalam statusnya sebagai UPT pusat yang operasionalnya berada di daerah, maka sudah seharusnya arah dan aktifitas organisasi diupayakan untuk senantiasa memperhatikan kebutuhan riil yang ada pada masyarakat, serta berupaya menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan daerah. Sehingga akan terdapat sinergi program dan kegiatan yang nantinya akan bermuara pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan.

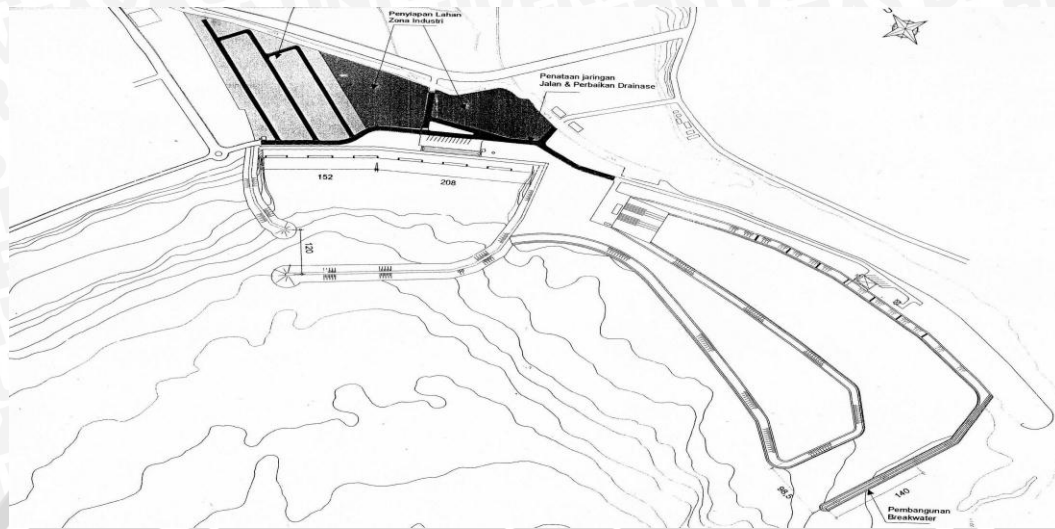
Dalam upayanya untuk mengembangkan PPN Prigi sesuai *Grand Strategy (The Blue Revolution Policies)* Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka diperlukan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPN Prigi. Oleh karena itu PPN Prigi melakukan pengembangan wilayah yang dimulai dari tahun 2003 sampai 2020 yang bertujuan untuk mendukung terwujudnya *Grand Strategy (The Blue Revolution*

Policies), oleh karena itu PPN Prigi melaksanakan pengembangan wilayah Pelabuhan Perikanan yang telah dimulai sejak tahun 2003 dan akan berakhir pada tahun 2020 yang dilakukan secara Bertahap yakni jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Berikut disajikan peta pengembangan wilayah PPN Prigi berdasarkan Masterplan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tahun 2003.



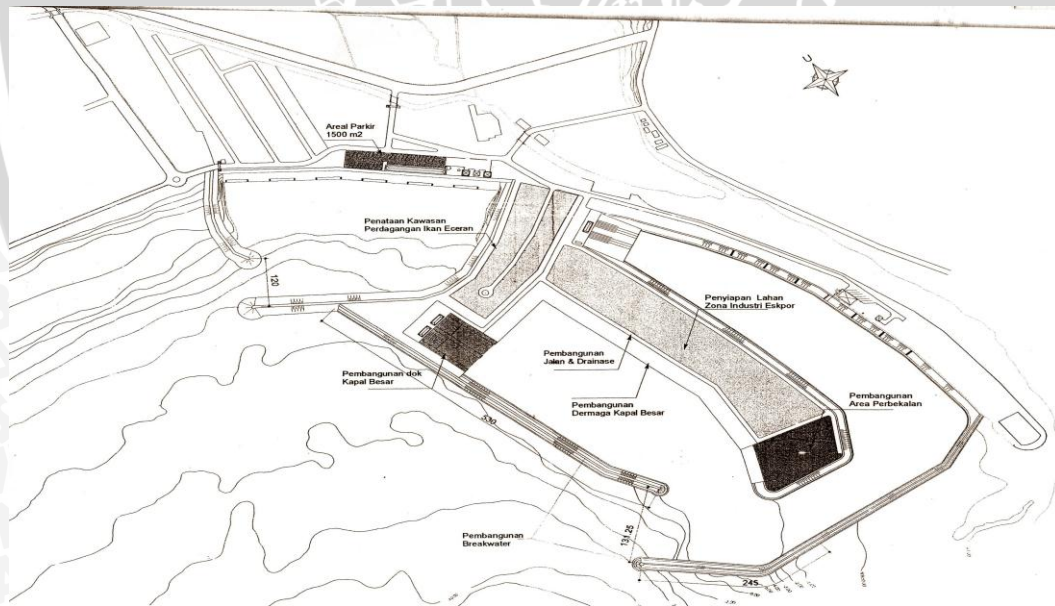
Gambar 6. Gambar Rencana Jangka Pendek Pengembangan Pelabuhan Perikanan Prigi

Sumber: Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2014



Gambar 7. Gambar Rencana Jangka Menengah Pengembangan Pelabuhan Perikanan Prigi

Sumber: Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2014



Gambar 8. Gambar Rencana Jangka Panjang Pengembangan Pelabuhan Perikanan Prigi

Sumber: Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2014

Dalam menjalankan Rencana Pengembangan Pelabuhan Perikanan di lakukan dengan bertahap yang dimulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2020 untuk pembangunan tahap akhir. Dalam rencana pengembangan jangka pendek (tahun 2003 – 2005) fasilitas yang dibangun adalah areal parkir seluas 1.200m² di zona kapal sedang. Selain itu pada tahun 2003 – 2005 dilakukan penyiapan untuk kawasan perumahan dan perkantoran sekuas 1.600 m².

Untuk pengembangan jangka menengah (tahun 2005 – 2010), dilakukan penataan jaringan jalan masuk. Serta perpanjangan *breakwater* untuk area timur sepanjang 140 meter. Untuk pengembangan jangka panjang yakni pembangunan tahap terakhir pengembangan (2010 – 2020) dilakukan perluasan areal parkir seluas 1.500 m² di dekat area TPI zona kapal sedang. Penyempurnaan jaringan jalan. Pada tahap terakhir telah dilakukan penyiapan lahan untuk zona industri ekspor. Serta dibangun *breakwater* memanjang dari barat ke timur sepanjang 530 yang digunakan untuk kolam kapal – kapal besar.

Dalam pengembangan pelabuhan perikanan maka PPN Prigi sebagai UPT pusat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengembangan perikanan dengan membuat program dan rencana strategis demi kelancaran pengembangan pelabuhan perikanan untuk mendukung *Grand Strategy (The Blue Revolution Policies)* . Berdasarkan RENSTRA lima tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi 2010 – 2014 terdapat 5 strategi pengembangan PPN Prigi yaitu meliputi:

(1) Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Ikan (SDI)

Kebijakan dan program yang bertalian dengan upaya optimalisasi antara ketersediaan sumber daya (stok) ikan dengan tingkat penangkapan pada setiap wilayah penangkapan ikan (*fishing ground*) adalah sangat penting untuk menjamin sistem usaha perikanan tangkap yang efisien (menguntungkan / *profitable*) secara berkelanjutan. Pengembangan PPN Prigi antara lain untuk meningkatkan rasionalisasi pemanfaatan SDI yang lebih merata sesuai daya dukung SDI – Noya Peningkatan fasilitas dan peningkatan manajemen operasional PPN Prigi, berpotensi untuk merangsang pertumbuhan yang lebih besar dengan memanfaatkan peluang mengeksplorasi SDI. Pengembangan PPN Prigi akan membuka lapangan kerja baru bagi nelayan.

(2) Penyediaan Fasilitas Yang Memenuhi Standar Internasional

dengan adanya tuntutan pasar tradisional mengharuskan pelabuhan perikanan menciptakan penyediaan fasilitas yang memadai untuk daya saing sehingga menarik para investor asing untuk masuk melakukan kegiatan di Indonesia. Dengan demikian akan membantu pemerintah dalam mengatasi kondisi krisis ekonomi dengan ikut mengerakkan sektor riil. Kualitas produk yang dihasilkan dituntut memenuhi standar internasional, oleh karenanya bahan baku dituntut untuk lebih berkualitas.

(3) Pemeliharaan Dan Perbaikan Fasilitas Operasional PPN Prigi

Untuk memperlancar aktivitas perikanan tangkap, khususnya usaha penangkapan ikan di laut, perlu memelihara fasilitas operasional PP. Dalam

upaya mengembangkan PPN Prigi sebagai kawasan pengembangan ekonomi berbasis perikanan tangkap, diperlukan pemeliharaan fasilitas operasional. Diharapkan pengelola PPN Prigi dapat melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas operasional, sehingga kapal-kapal dan nelayan serta stakeholders lainnya yang melakukan aktivitas di PPN Prigi akan mendapatkan pelayanan prima.

(4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Kelembagaan pada PPN Prigi yang masih menjadi UPT Pusat sudah mengalami penataan dan secara umum sudah dapat berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun demikian, kelembagaan PPN Prigi masih perlu penataan lebih lanjut untuk peningkatan kapasitas kelembagaan. Peningkatan kapasitas kelembagaan PPN Prigi tersebut antara lain meliputi : status hukum, kewenangan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta pemberdayaan lebih lanjut dari lembaga dimaksud. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dapat dimulai dengan melakukan inventarisasi keragaan, evaluasi, formulasi, penetapan dan sosialisasi untuk implementasinya.

(5) Pengembangan usaha perikanan tangkap dan pemberdayaan ekonomi nelayan dan pelaku ekonomi lainnya di PPN Prigi

Keberadaan PPN Prigi sebagai salah satu lingkungan kerja diharapkan akan mampu menjadi pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan berbasis perikanan tangkap yang pada gilirannya diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan

ekonomi secara keseluruhan. Di samping itu, PPN Prigi juga mengemban tugas sebagai pusat pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan. Strategi ini dilakukan untuk menjaga kelestarian SDI.

Penyusunan RENSTRA PPN Prigi Tahun 2010 – 2014 sebagaimana yang telah disebutkan diatas dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan PPN Prigi yang akan dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

(a)Peningkatan Sumber Daya Manusia

Kegiatan pengembangan pelabuhan perikanan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui keberdayaan yang dilakukan oleh PPN Prigi. PPN Prigi dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat nelayan. PPN Prigi menggunakan strategi jemput bola dimana pihak PPN Prigi turun langsung dalam melayani masyarakat nelayan, sebagaimana penjelasan Kasi Tata Operasional PPN Prigi Ibu Erawati Wulandari,S.Pi, MP, mengatakan Bahwa:

“Dalam hal memberikan pelayanan publik kepada nelayan, pelabuhan menggunakan prinsip jemput bola ke nelayan, karena strategi ini yang kami rasa paling tepat. kerena nelayan di sini masih menganggap kalau ini daerahnya sendiri jadi tidak taat aturan. Nelayan disini bisa disebut masyarakat nelayan tradisional atau artisanal, jadi kami yang turun untuk memberikan pelayanan. Dengan sendirinya nanti nelayan akan sadar kalau semua ada aturanya”.(Wawancara pada tanggal 24 Maret 2014 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi).

Dari hasil pernyataan tersebut, terlihat bahwa PPN Prigi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat nelayan prigi menggunakan strategi jemput bola. Dikarenakan pola pikir masyarakat nelayan di Prigi masih beranggapan bahwa mereka berada di daerahnya sendiri yang mengakibatkan masyarakat nelayan tersebut tidak peduli dengan adanya peraturan yang telah dikeluarkan atau ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu strategi jemput bola yang digunakan dalam pengembangan PPN Prigi yang nantinya bertujuan untuk menyadarkan atau merubah pola pikir masyarakat nelayan Prigi. Agar semua masyarakat nelayan Prigi sadar akan aturan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana pernyataan Kasi Tata Operasional, yang mengatakan bahwa: “pengembangan yang dilakukan oleh pelabuhan dalam hal pelayanan, masih pada proses penyadaran kepada nelayan”.(Wawancara pada tanggal 24 Maret 2014 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi).

Salah satu tugas pelabuhan perikanan adalah melakukan kegiatan penyuluhan perikanan kepada masyarakat nelayan atau kelompok nelayan, kegiatan penyuluhan perikanan merupakan upaya dari pihak pelabuhan perikanan melalui cara memberdayakan masyarakat nelayan. Seperti yang diungkapkan oleh Kasi Tata Operasional PPN Prigi Ibu Erawati Wulandari, S.Pi, MP. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh PPN Prigi masih mengarah ke arah penyadaran kepada masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan kembali oleh petugas penyuluh Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Ibu Galuh, mengatakan bahwa:

“Penyuluhan yang berkaitan dengan pengembangan pelabuhan selama ini adalah penegakan aturan, selama ini masih banyak nelayan – nelayan yang belum taat aturan, seperti masa dokumen kapal, ketertiban itu masih belum sesuai. Oleh karena itu kami di penyuluhan melakukan sosialisasi dengan tatap muka dengan nelayan di sekitar pelabuhan, namun untuk mendukung itu kami tidak hanya melakukan sosialisasi disekitar pelabuhan tetapi juga datang ke kelompok nelayan (pertemuan kelompok rumah masing – masing kelompok). Hal ini merupakan salah strategi kami agar bisa dekat dengan nelayan dan hal itu merupakan salah satu pengembangan pelabuhan perikanan dalam rangka mensejahterakan nelayan, seperti juga kelompok pengolahan perikanan juga kami kunjungi karena kelompok pengolahan ini berada diluar pelabuhan”. (Wawancara pada tanggal 26 Maret 2014 di Pos Pelayanan Penyuluhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi).

“Penertiban nelayan yang sudah ada outputnya adalah penertiban wilayah TPI Timur yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan pemakai atau nelayan, penertiban ini masih banyak terdapat pendaratan ikan liar, oleh karena itu strategi dari kami adalah menata mereka dulu dengan membuat kesepakatan atau kearifan lokal yang dekat dengan kehidupan mereka tapi tetap dengan pengawasan dari pihak Pelabuhan”. (Wawancara pada tanggal 26 Maret 2014 di Pos Pelayanan Penyuluhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diartikan bahwa pengembangan yang dilakukan oleh PPN Prigi melalui kegiatan penyuluhan adalah proses penyadaran taat aturan dan menata masyarakat nelayan yang menggunakan fasilitas dari pelabuhan perikanan agar menjadi tertib dan bisa terkontrol dengan baik.

Kegiatan penyuluhan perikanan yang telah dilaksanakan oleh PPN Prigi antara lain adalah pertemuan kelompok nelayan sebanyak 55 kali dengan agenda dokumen dan perijinan kapal perikanan, perijinan usaha perdagangan untuk usaha pemindang, administrasi kelompok, menjalin kerjasama dengan instansi terkait, pengolahan hasil perikanan dan pengemasan, Pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan, analisis usaha / kelayakan usaha, pembukuan

sederhana bagi usaha mikro, pelebelan pangan. Anjongsana sebanyak 572 kali dengan agenda dokumen dan perijinan kapal perikanan, usaha pengolahan perikanan, kartu nelayan, jaminan kecelakaan kerja, fasilitasi normalisasi sungai Wancir, penanganan ikan diatas kapal, histamin, faktor kemunduran mutu ikan dan pengendaliannya, sanitasi *higiene* dalam penanganan hasil perikanan, bahaya penggunaan bahan kimia dan bahan tambahan pangan terlarang, nilai tambah (*value added*) produk olahan perikanan, demonstrasi (variasi jenis olahan hasil perikanan).

Adapun penyuluhan yang dicapai oleh PPN Prigi adalah sebagai berikut
Dokumen kapal yang diajukan sebanyak 15 kapal, 9 orang pemindang mengajukan ijin usaha perdagangan pindang, KUB Tuna Jaya meraih juara III Tingkat Propinsi Jawa Timur, Pengolah mampu menerapkan peningkatan nilai ekonomis ikan, Meningkatnya kesadaran nelayan tentang pemanfaatan ikan secara berkelanjutan, Pemilik kapal mengajukan dokumen perijinan sebanyak 304 orang, Pemindang yang mengajukan Ijin Usaha Perdagangan berjumlah 9 orang, Nelayan yang mengajukan kartu nelayan sebanyak 800. Realisasi normalisasi Sungai Wancir, Peningkatan pengetahuan dan kesadaran pelaku utama tentang jaminan keamanan pangan produk perikanan, Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku utama dalam pengelolaan bahan baku sehingga dapat memberikan nilai tambah pada produk.

Kegiatan penyuluhan perikanan, dengan harapan bahwa masyarakat nelayan dapat berdaya dalam melaksanakan eksploitasi pemanfaatan sumber

daya ikan. Dengan penyuluhan seperti proses mengubah pola pikir dari masyarakat nelayan, mensosialisasikan peraturan – peraturan pemerintah baik kabupaten maupun nasional, mensosialisasikan manajemen rantai dingin hasil tangkapa, memberdayakan masyarakat nelayan seperti memberikan pelatihan – pelatihan pengelolaan hasil tangkapan untuk dijadikan hasil olahan yang memilik nilai jual yang tinggi. Dari semua kegiatan yang dilakukan oleh PPN Prigi dimaksudkan untuk membantu nelayan dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan yang ada.

(b)Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Selain kegiatan penyuluhan yang ada di PPN Prigi. PPN Prigi juga melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, diantaranya adalah kegiatan penyebaran dan respons balik peta daerah penangkapan. Peta daerah penangkapan (*fishing ground*) merupakan peta perkiraan penyebaran ikan pada perairan laut dalam jangka waktu tertentu yang diperoleh dengan bantuan satelit. Peta ini diperoleh dari Badan riset Keluatan dan Perikanan (BRKP) yang di perbaruhi setiap Minggu yang akan diteruskan kepada nelayan untuk memudahkan nelayan menuju sasaran daerah penangkapan. Kegiatan ini merupakan strategi pengembangan yang dilakukan oleh PPN Prigi dalam membantu nelayan untuk mengarahkan atau menghantarkan nelayan pada sasaran penangkapan ikan dengan hasil tangkapan yang optimal.

Namun dari peta *fishing ground* yang disampaikan kepada nelayan ternyata belum dapat dimanfaatkan secara optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, sebagai berikut:

- (1) Kapal nelayan masih berukuran kecil yakni < 30 GT sehingga daerah penangkapan yang bisa dijangkau tidak jauh dan masih melakukan penangkapan dengan cara *one day fishing*.
- (2) Kapal nelayan sebagian belum terlengkapi dengan peta perairan, seperti *fish finder* dan alat GPS (*Global Position System*).
- (3) *Fishing master* / nakhoda kapal belum dapat membaca data dan peta secara tepat.

Pengembangan selanjutnya yang dilakukan oleh PPN Prigi adalah kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Peningkatan Mutu. Pembinaan Peningkatan Mutu Perikanan ini sangat penting, karena harga jual hasil perikanan ditentukan dari mutu hasil perikanan tersebut. Pelabuhan perikanan merupakan infrastruktur fungsional perikanan yang memiliki peranan yang strategis dalam pemasaran produk perikanan. Hal ini terkait dengan proses dan kerangka pengembangan produk perikanan yang menempatkan kualitas produk sebagai titik sentral pengelolaan. Pelabuhan menjadi titik awal pengembangan kualitas produk yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk baik dalam kualitas produk segar maupun produk olahan (*Processed*). Sebagaimana penjelasan Kepala Tata Usaha Bapak Hartono, SE menjelaskan bahwa:

“Kegiatan pengolahan mutu hasil perikanan yang dilakukan oleh PPN Prigi antar lain penyempurnaan sistem inspeksi pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan dalam mendukung program pelaksanaan Sertifikasi Kelaikan Penanganan dan Penyimpanan Ikan (SKPPI) di kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan, pembinaan Peningkatan mutu ini dilaksanakan dalam Pelaksanaan Bimbingan teknis dalam rangka Sosialisasi dan Operasional ‘Prosedur Operasi Standar Sanitas (*Standard Sanitation Operating Procedure / SSOP*) dan cara penanganan ikan yang baik (*Good handling Practices / GHDP*) yang dilakukan secara berkala dan konsisten”. (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2014 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi).

Selain pengembangan kegiatan penyebaran dan respons balik peta daerah penangkapan, pelaksanaan pembinaan mutu, PPN Prigi dalam pengembangan fisik, pelabuhan perikanan telah menambah SPDN (*Solar Packed Dealer Nelayan*) menjadi 2 unit stasiun SPDN yang diperuntukkan kepada nelayan Prigi. Pembangunan Jembatan *Jetty* yang diperuntukkan untuk persiapan perbekalan kapal perikanan yang berukuran besar. Normalisasi sungai Wancir yang bertujuan untuk mempermudah nelayan dalam perbaikan kapal nelayan, pemeliharaan fasilitas yang telah ada. Sebagaimana penjelasan Kepala Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Bapak Hartono. SE menjelaskan bahwa:

“Pengembangan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh PPN Prigi yang pertama adalah pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada, pelabuhan juga telah membangun jembatan jetty untuk memudahkan operasional kapal dengan ukuran besar, pelabuhan juga telah mengadakan SPDN untuk melayani bahan bakar nelayan dan pelabuhan juga koordinasi normalisasi sungai wancir yang nantinya akan mempermudah nelayan dalam perbaikan”. (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2014 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi).

Dari hasil wawancara diatas tersebut, PPN Prigi berupaya untuk meningkatkan peranya terhadap nelayan dengan pengembangan – pengembangan yang dilakukan oleh PPN Prigi. Dengan pengembangan – pengembangan yang telah dilakukan oleh pihak pelabuhan perikanan diharapkan nelayan menjadi dipermudah dalam mendapatkan pelayanan dari PPN Prigi.

Selain pengembangan berupa pembangunan, pemeliharaan fasilitas pelabuhan yang dilakukan oleh pihak PPN Prigi maupun pihak investor yang masuk ke dalam wilayah PPN Prigi. Pengembangan lainya yang dilakukan adalah peningkatan kelembagaan antara pihak – pihak yang terkait dengan sektor perikanan. Dalam hal koordinasi masalah regulasi dan tata undang – undang antar instansi terkait diantaranya: Dinas Kelautan dan Perikanan, karantina Ikan, Depkes, Polri, TNI AL, ASPEL, BAPEDALDA, P2SDKP, Bea Cukai, Imigrasi dan BMG yang diharapkan dengan terjadinya peningkatan kapasitas kelembagaan tersebut, dapat meningkatkan sektor perikanan dan dapat memberikan hasil yang baik terhadap peningkatan – peningkatan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan seperti kesejahteraan masyarakat nelayan.

Serta pengembangan untuk mengembangkan usaha perikanan dan memberdayakan ekonomi nelayan dan pelaku lainya. PPN Prigi di dalam proses penyuluhan kepada nelayan mensosialisakan manajemen rantai dingin dimana dengan manajemen rantai dingin, diharapkan hasil tangkapan perikanan memiliki nilai jual yang tinggi mulai di laut sampai pada pasar. Karena

keberadaan PPN Prigi diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan berbasis perikanan tangkap. Yang pada hasil akhirnya untuk peningkatan kualitas masyarakat nelayan.

3. Faktor – Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Dalam Strategi

Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Untuk mengetahui kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*theats*) dalam strategi pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi maka dalam penyajian data ini peneliti mengumpulkan terlebih dahulu faktor – faktor pendukung dan penghambat yang ada berdasarkan data – data lapangan yang diperoleh dalam penelitian langsung di PPN Prigi. Nantinya faktor pendukung dan penghambat yang ada dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan posisi dan analisis dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dan menganalisis yang ada dalam strategi pengembangan yang dilakukan oleh PPN Prigi dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat nelayan. Berdasarkan data lapangan selama melakukan penelitian pada PPN Prigi. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat baik internal maupun eksternal dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dalam meningkatkan keberberdayaan masyarakat nelayan.

Berikut faktor – faktor pendukung dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi:

(a) Faktor Pendukung

(1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada di PPN Prigi yakni pegawai PPN Prigi. PPN Prigi memiliki sumber daya manusia dengan jumlah yang cukup dan mampu melayani masyarakat perikanan dengan baik, khususnya masyarakat nelayan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Bapak Hartono, SE mengatakan bahwa:

“PPN Prigi telah di bantu oleh pegawai sebanyak 90 pegawai dengan jumlah pegawai sekian, dan pegawai yang kami miliki sudah mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat perikanan, masyarakat perikanan disini maksudnya adalah pengguna sarana dan prasarana yang ada di PPN”. (Wawancara pada tanggal 25 Maret 2014 di rumah Bapak Hartono, SE).

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dalam SDM internal PPN Prigi telah didukung dengan adanya pegawai sebanyak 90 orang dengan berbagai latar pendidikan yang sesuai dan pegawai PPN Prigi telah cukup dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada masyarakat nelayan, seperti penyuluhan kepada nelayan, pengawasan mutu perikanan, perijinan kapal perikanan,

(2) Sarana dan Prasana

Untuk mempermudah operasional nelayan, PPN Prigi telah dilengkapi dengan fasilitas pokok pelabuhan perikanan, yaitu Dermaga, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Tempat pengepakan ikan, Bengkel, SPDN, Balai

Penyuluhan, *Cold Storage*, Dengan fasilitas yang ada dapat membantu operasional dari nelayan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Bapak Hartono,SE mengatakan bahwa: “Seperti yang kita ketahui, sarana dan prasarana yang ada di pelabuhan, semua itu di tunjukan untuk membantu mempermudah operasional dari nelayan”. (Wawancara pada tanggal 25 Maret 2014 di rumah Bapak Hartono, SE).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana di bangun untuk mempermudah operasional nelayan, dan PPN Prigi seiring dengan waktu berusaha untuk menyempurnakan fasilitas – fasilitas yang ada maupun yang belum ada, sesuai yang diperlukan untuk masyarakat nelayan pada masa yang akan datang.

Selain sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh PPN Prigi yang notabene adalah penyedia sarana dan prasarana untuk masyarakat nelayan, sarana dan prasarana yang dibangun di luar PPN Prigi merupakan salah satu faktor pendukung untuk pengembangan pelabuhan perikanan dari luar kewenangan PPN Prigi, seperti telah adanya SPBU, SPBN, telah dibangunnya pabrik tepung ikan, pabrik ikan, *cold storage*, pabrik es. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Bapak Hartono, SE mengatakan bahwa: “selain sarana san prasarana yang telah disediakan oleh PPN, sarana dan prasarana lain juga dibangun oleh beberapa investor yang masuk ke PPN dengan melakukan pembangunan seperti SPBN, Pabrik

Tepung ikan, pabrik ikan, *cold storage*, pabrik es". (Wawancara pada tanggal 25 Maret 2014 di rumah Bapak Hartono, SE).

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa pembangunan sarana dan prasarana tidak selalu dari pihak PPN Prigi dalam penyediaan sarana dan prasana. PPN Prigi menyediakan lahan bagi para investor yang mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan sektor perikanan yang ada di Prigi, seperti pembangunan SPBU dan SPBN yang dilakukan oleh investor yang bertujuan untuk mengurangi biaya pembelian bahan bakar nelayan, yang sebelum adanya pembangunan SPBU dan SPBN nelayan harus membeli ke luar daerah Desa Tasikmadu yang membutuhkan pengeluaran lebih. Serta pembangunan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kualitas sekot perikanan di Prigi.

(3) Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam di kabupaten Trenggalek yang utama meliputi sektor perikanan laut, peternakan, pertanian pangan dan perkebunan, pertambangan dan pariwisata. Khusus sumber daya perikanan laut yang ada di kabupaten Trenggalek masih memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan memiliki laut seluas 35.558 Km² ZEE dengan garis pantai 96 KM menjadikan wilayah perairan di kabupaten Trenggalek sangat berpotensi untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan di pesisir pantai prigi. Karena sumber daya laut yang terjadi pada saat ini belum dapat dieksploitasi secara optimal.

(4) Kelembagaan yang menunjang Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Pengembangan kelembagaan merupakan salah satu faktor penting bagi pengembangan PPN Prigi dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. PPN Prigi dalam pengembangannya didukung dengan keberadaan Perum Pengusahaan Pemasaran Ikan, Polair, UPTD, TPI, PSDKP. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Bapak Hartono, SE mengatakan bahwa: “dalam pengembangan pelabuhan, kami pihak PPN Prigi berkerjasama dengan lembaga – lembaga yang terkait dengan perikanan, seperti Perum Perusahaan Pemasaran Ikan, Polair, UPTD dan mereka menjadi penunjang pengembangan pelabuhan perikanan”. (Wawancara pada tanggal 25 Maret 2014 di rumah Bapak Hartono, SE).

Berdasarkan hasil wawancara, PPN Prigi bekerjasama dengan pihak – pihak terkait dengan perikanan yang bertujuan untuk pengembangan pelabuhan perikanan, terutama pengembangan sektor perikanan yang ada serta keamanan yang ada di lingkungan perairan teluk Prigi.

Selain faktor – faktor yang mendukung adanya pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, juga terdapat faktor yang menjadi penghambat terjadinya pengembangan pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, faktor – faktor tersebut adalah sebagai berikut:

(b) Faktor Penghambat

(1) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana juga merupakan faktor penghambat dalam pengembangan pelabuhan perikanan. Di PPN Prigi sarana dan prasarana memang sudah dapat terpenuhi dengan baik, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang belum dimiliki oleh PPN Prigi, hal ini yang menyebabkan perkembangan sektor perikanan masih kurang optimal, seperti belum tersedianya kolam labuh untuk kapal perikanan dengan kapasitas 30 GT, selama ini yang ada di PPN Prigi hanya kapal dengan kapasitas dibawah 30GT. Dengan kapal dibawah 30 GT kapal perikanan tersebut belum mampu mengoptimalkan SDI yang ada di Prigi karena daya jelajah kapal dibawah 30 GT tidak memadai. Serta belum tersedianya fasilitas *Docking* / galangan untuk perbaikan kapal, selama ini untuk perbaikan kapal nelayan harus tergantung pada sungai yang tergantung pada pasang surut air laut untuk bisa menggunakan sungai untuk galangan perbaikan kapal. Sesuai dengan pernyataan Kepala Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Bapak Hartono, SE mengatakan bahwa “jika dilihat sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pelabuhan saat ini dapat dibilang sudah baik, namun ada beberapa yang belum tersedia di pelabuhan, seperti kolam labuh untuk kapal dengan kapasitas 30 GT, belum adanya fasilitas *Docking* untuk perbaikan kapal nelayan”. (Wawancara pada tanggal 25 Maret 2014 di rumah Bapak Hartono, SE).

(2) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan motor penggerak dalam pengembangan pelabuhan perikanan, khususnya masyarakat nelayan yang menjadi objek dari pengembangan pelabuhan perikanan sebagai pemakai sarana dan prasana, sumber daya manusia dalam hal ini nelayan yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan pelabuhan perikanan, hal ini dikarenakan masyarakat nelayan yang ada di wilayah pesisir pantai Prigi merupakan nelayan tradisional dengan skala kecil dan hanya bisa memanfaatkan pada perairan pantai. Kebanyakan nelayan yang ada di wilayah pesisir Prigi memiliki latar belakang pendidikan yang sebagian besar hanya lulusan dari SD atau SMP bahkan ada yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan. Hal ini yang menyebabkan pengetahuan dan kemampuan diri pada nelayan dinilai rendah dan pola pikir dari masyarakat nelayan yang masih tradisional. Serta belum mampu melakukan manajemen penanganan hasil perikanan dengan baik. Sesuai dengan pernyataan Kepala Tata Usaha Pelabuhan Perikanan Bapak Hartono, SE mengatakan bahwa

“Salah satu faktor untuk pengembangan pelabuhan adalah nelayannya sendiri, nelayan di sini merupakan nelayan tradisional dengan latar pendidikan yang bisa dibilang rendah, serta kemampuan kapal yang mereka miliki belum mampu menembus ZEEI dan belum dapat menjalankan manajemen penanganan ikan rantai dingin”. (Wawancara pada tanggal 25 Maret 2014 di rumah Bapak Hartono, SE).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa untuk pengembangan pelabuhan peran dari nelayan juga terlibat. namun dengan

kondisi nelayan yang ada merupakan nelayan tradisional hal ini menjadikan pengembangan menjadi sedikit berat karena masyarakat nelayan dengan latar pendidikan yang bisa dikatakan rendah terlihat tidak peduli akan pengembangan sektor perikanan dan nelayan yang ada di Prigi mereka mudah puas dengan hasil tangkapan yang ada. Dan masyarakat nelayan belum sepenuhnya mampu menerapkan manajemen penanganan ikan rantai dingin untuk menjaga kualitas hasil tangkapan. Hal ini merupakan tantangan bagi PPN Prigi serta pihak terkait untuk melakukan pengembangan pelabuhan serta pengembangan SDM yang ada di Prigi.

(3) Armada Perikanan

Armada perikanan merupakan hal yang terpenting dalam kegiatan penangkapan perikanan, sesuai dengan pengamatan langsung di PPN Prigi terdapat faktor penghambat pengembangan pelabuhan terkait dengan armada perikanan. Armada perikanan yang ada saat ini masih belum tersedianya kapal perikanan dengan ukuran 30 GT yang mampu menjelajah pada kawasan ZEEI, sebagian besar armada perikanan yang ada di PPN Prigi berukuran < 30 GT, yang menyebabkan kapal < 30GT tidak bisa menjelajah untuk wilayah ZEEI.

(4) Permodalan dan Harga Jual Hasil Tangkapan

Permodalan merupakan hal yang terpenting dalam menjalankan operasional perikanan, permodalan ini menjadi faktor penghambat karena permodalan nelayan tergantung kepada pemilik modal atau kepada pedagang oleh karena itu nelayan menjadi terikat dengan pemilik modal atau pedagang,

serta nilai jual hasil perikanan ditentukan oleh pedagang yang pada kenyataan pendang memperlakukan nilai jual ikan.

Seperti yang di ungkapkan bapak Edi Yusuf pegawai

“Bicara harga dek, TPI tidak bisa menentukan harga tapi pedagang yang menentukan, nelayan tergantung pada pedagang yang aslinya pedagang itu memperlakukan nilai jual hasil tangkapan nelayan, kalau saja nilai jual di kembalikan pada TPI dengan lelang saya yakin nilai jualnya tinggi”. (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2014 di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi).

Pernyataan lain di katakan oleh Bapak Toni yang mengatakan ”Kalau modal untuk berlayar, kita orang hutang dulu mas ke yang punya modal, kayak pedagang yang nanti kami harus jual ikan ya ke orang yang kasih modal, dengan harga sesuka yang punya modal”. (Wawancara pada tanggal 7 April 2014 di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi).

Pernyataan lain juga di katakan oleh bapak Sarno, yang mengatakan “Selama ini harga jual mengikuti tergantung seberapa beraninya pedagang membeli hasil tangkapan kita, kalau nilai jual ikan dikembalikan pada proses lelang oleh TPI mungkin pemasukan kami akan menjadi lebih baik”. (wawancara pada tanggal 7 April 2014 di tempat parkir Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi).

Berdasarkan penyajian data yang berupa faktor pendukung internal dan faktor penghambat diatas dapat ditarik menjadi beberapa faktor – faktor untuk menganalisis kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*theats*) dari strategi pengembangan PPN Prigi dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat nelayan. Karena faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan PPN Prigi merupakan permasalahan yang dihadapi oleh PPN prigi dalam melakukan pengembangan pelabuhan perikanan, berikut disajikan faktor – faktor sebagai berikut:

- (1) Kekuatan (*strengths*) yang meliputi potensi sumber daya perikanan, komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan sektor perikanan, tersedianya SDM dalam jumlah yang memadai, tersedianya sarana dan prasarana yang terus berkembang, tersedianya prasarana pengawasan perikanan di PPN Prigi.
- (2) Kelemahan (*weaknesses*) meliputi kemampuan nelayan yang belum memadai dalam memanajemen hasil tangkapan perikanan, terdapat beberapa fasilitas yang belum dibangun di PPN Prigi, terbatasnya biaya pemeliharaan, belum adanya layanan satu atap terkait pengurusan dokumen kapal dan perijinan usaha di PPN Prigi, belum optimalnya informasi perikanan, terbatasnya BBM yang ada di kawasan PPN Prigi.
- (3) Peluang (*opportunities*) meliputi Kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan investasi, penguatan nilai tukar rupiah dapat mendorong nilai ekspor dan penerimaan devisa, meningkatnya kesadaran konsumen akan pangan dari perikanan, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

nelayan, terciptanya inovasi baru dalam pengelolaan hasil perikanan yang lebih modern.

- (4) Ancaman (*theats*) meliputi Kebijakan pemerintah dalam penentuan harga BBM, tidak tersedianya modal operasional nelayan, Maraknya Illegal, Unreported Unregulated (IUU) Fishing, perusahaan perikanan masih di dominasi oleh nelayan tradisional dengan skala kecil dan terbatas pada perairan pantai, rendahnya kualitas SDM perikanan atau nelayan, rendahnya tingkat pendidikan nelayan, rendahnya kualitas mutu hasil perikanan.

C. Analisis Data

Setelah Peneliti menyajikan data mengenai peran PPN Prigi terhadap nelayan, strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, serta faktor – faktor kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*theats*) yang dimulai dengan penyajian tentang pendukung dan penghambat dalam strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat nelayan, maka selanjutnya dalam penulisan ini disajikan analisis data dari penyajian data yang pada akhirnya dengan adanya sajian analisis data dapat ditarik kesimpulan yang sesungguhnya mengenai fokus yang sudah disebutkan sebelumnya, analisis data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Terhadap Nelayan.

Dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan secara teori membutuhkan 3 peran aktor yang menjadi kunci yang

menentukan keberhasilan dari upaya memberdayakan masyarakat. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus kepada 1 pihak yakni Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dengan melihat upaya – upaya yang dilakukan oleh PPN Prigi dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat nelayan. Pada analisis yang pertama dalam penelitian ini menganalisis peranan PPN Prigi terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan di sekitar pelabuhan perikanan.

Secara pengertian, yang dimaksud dengan pelabuhan adalah fasilitas yang berada di ujung samudra, sungai atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang, pelabuhan juga dapat diartikan sebagai daerah perairan yang terlindung dari bahaya gelombang laut dan dilengkapi dengan fasilitas seperti dermaga, *Crane*, Gudang laut (*transito*). Berdasarkan PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 menyebutkan bahwa yang disebut pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas – batas tertentu sebagai kegiatan pemerintahan dan kegiatan bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelayaran perikanan. Sehingga pelabuhan perikanan adalah satu tempat yang terdiri dari daratan yang terletak disekitar perairan yang digunakan sebagai kegiatan bisnis perikanan seperti tempat kapal bersandar, berlabuh serta bongkar muat hasil perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan kerja.

Sebagaimana konsep pembangunan menurut Siagian (1983) yang dikutip oleh Suryono (2010:46), yang menyebutkan bahwa pembangunan merupakan usaha atau

rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Berarti pembangunan – pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut merupakan usaha untuk menumbuhkan dan merubah satu bangsa untuk menjadikan bangsa tersebut menjadi sesuatu yang maju dan menuju modernitas.

Hal ini sesuai dengan latar belakang pembangunan pelabuhan perikanan, dimana kesadaran dari pihak pemerintah untuk membangun pelabuhan perikanan yang bertujuan untuk membangun masyarakat nelayan serta meningkatkan sektor perikanan Indonesia. Pada awal pembangunan pelabuhan perikanan yang ada di Prigi hanya berfokus kepada pembangunan sumber daya manusia yang ada disekitar pelabuhan perikanan, yakni masyarakat nelayan yang menjadi focus dari awal pembangunan pelabuhan perikanan, namun seiring dengan perkembangan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat nelayan, selanjutnya pemerintah melakukan pembangunan - pembangunan fisik berupa pelabuhan perikanan. Dimana dengan adanya pembangunan pembangunan SDM dan pembangunan fisik pelabuhan diharapkan terjadinya perubahan menuju modernitas pada masyarakat nelayan.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari pembangunan yang dikemukakan oleh ahli ekonomi Todaro yang dikutip oleh LEMHAMNAS (1997:11) yang menyebutkan bahwa, *the process of improving the quality of all human live* (pembangunan meliputi proses memajukan mutu kehidupan manusia). Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa pembangunan pelabuhan perikanan merupakan cara atau proses untuk memajukan mutu kehidupan manusia. Dalam konteks ini pembangunan

pelabuhan perikanan ditunjukkan untuk meningkatkan SDM yakni masyarakat nelayan di sekitar pelabuhan perikanan. Dengan adanya pembangunan pelabuhan perikanan tersebut mempunyai tujuan utama yakni untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat nelayan, dengan begitu kemiskinan secara perlahan dapat terhapuskan.

Hal tersebut sesuai pendapat Gant yang dikutip oleh Syamsi (1986:5) yang mengemukakan bahwa terdapat dua tahap pembangunan: Tahap pertama, pada hakekatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan – kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup dan bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Sebagaimana pendapat Gant bahwa dengan adanya pembangunan pelabuhan perikanan tingkat kemiskinan yang ada pada masyarakat nelayan secara perlahan bisa terhapuskan sehingga masyarakat nelayan dapat melanjutkan hidupnya dengan layak dan terpenuhi kebutuhannya.

Keberadaan dari pembangunan pelabuhan perikanan dapat menjadikan motor penggerak bagi perekonomian masyarakat nelayan. Pada hakekatnya pembangunan pelabuhan perikanan ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan pada khususnya kepada kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan serta lingkungannya dan merupakan basis utama kegiatan perikanan tangkap yang dapat menjamin suksesnya aktivitas perikanan tangkap di laut oleh karena itu memberdayakan masyarakat nelayan adalah hal yang penting untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Pelabuhan perikanan berperan sebagai terminal bagi pelaku usaha yang

menghubungkan kegiatan usaha di laut dengan di darat ke dalam suatu sistem usaha dan berdayaguna. Yang dimulai dari aktivitas penangkapan ikan di laut, mulai dari keberangkatan kapal perikanan tangkap dari pelabuhan perikanan sampai pada kegiatan bongkar muat hasil perikanan. Jelas bahwa peran pelabuhan perikanan adalah sebagai penyedia sarana dan prasarana kegiatan perikanan yang ada di Prigi. Sarana dan prasarana yang ada di Prigi merupakan fasilitas dari PPN Prigi, fasilitas yang tersedia meliputi: Gedung Tempat Pelelangan Ikan (TPI), *Cold storage*, tempat pengepakan ikan, SPDN (*Solar Packed Dealer* Nelayan). Serta fasilitas yang dibangun oleh investor yang masuk ke PPN Prigi seperti Pabrik tepung ikan, pabrik ikan, Pabrik es, SPBN.

Sebagaimana tiga hal yang mencangkup peranan menurut Soekanto (2002) yang menyebutkan bahwa.

- (1) Peranan meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan serangkaian peraturan – peraturan yang membimbing seorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Peranan merupakan satu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- (3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

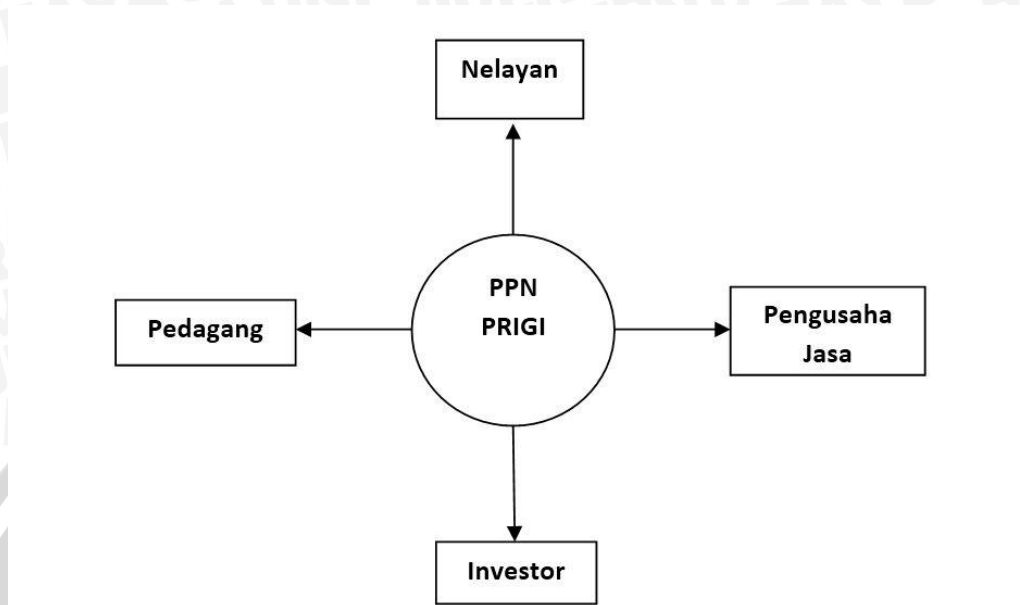
Tiga hal yang mencangkup peranan menurut Levinson dapat dicocokkan dengan peranan yang dimiliki oleh PPN Prigi, pada peranan. Pertama menyebutkan bahwa

peranan dalam arti ini merupakan serangkaian peraturan – peraturan yang membimbing dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini sesuai dengan peranan PPN Prigi, PPN Prigi memiliki serangkaian peraturan – peraturan yang membimbing dalam kehidupan masyarakat nelayan. Terlihat dari peranan penyediaan fasilitas yang ada di PPN Prigi yang digunakan oleh masyarakat nelayan dengan peraturan – peraturan yang membimbing masyarakat nelayan, seperti hasil penelitian yang telah dilakukan adanya peraturan bahwa masyarakat nelayan harus menurunkan hasil perikanan melalui prosedur yang telah ditentukan oleh pihak PPN Prigi agar penangkapan dapat terkontrol dan dapat terdokumentasi dengan baik, Hal ini membuktikan bahwa peranan merupakan serangkaian peraturan yang membimbing kehidupan kemasyarakatan, khususnya masyarakat nelayan.

Kedua, peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dalam hal ini individu dapat dianalogikan kepada PPN Prigi. Dimana PPN Prigi memiliki peranan yang dapat dilakukan oleh PPN Prigi terhadap masyarakat sebagai organisasi, hal ini terlihat tentang apa yang dapat dilakukan oleh PPN Prigi adalah dapat melakukan kegiatan yang membantu masyarakat nelayan yakni sebagai organisasi, dimana PPN Prigi melakukan pendekatan secara terus menerus ke dalam masyarakat nelayan dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas masyarakat nelayan. Dalam penelitian ditemukan bahwa untuk meningkatkan kualitas masyarakat nelayan adalah dengan cara melakukan penyuluhan atau sosialisasi perikanan, yang pada dasarnya merupakan strategi untuk mengembangkan pelabuhan perikanan. Penyuluhan atau

sosialisasi tersebut berupa menyampaikan peraturan – peraturan yang seharusnya diperhatikan oleh nelayan, seperti kelengkapan dokumen dan peraturan bongkar muat hasil perikanan. Dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas masyarakat nelayan adalah dengan proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak PPN Prigi yakni dengan memberikan informasi tentang pentingnya manajemen rantai dingin untuk kualitas hasil perikanan, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai jual ikan tersebut. Selain itu PPN Prigi juga melakukan pemberdayaan masyarakat dengan membuat olahan hasil perikanan menjadi lebih modern dan memiliki nilai jual lebih serta dapat menciptakan lapangan kerja bagi istri – istri nelayan.

Ketiga. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dalam peranan ini dapat dikatakan bahwa PPN Prigi memiliki perilaku yang penting untuk masyarakat nelayan, seperti PPN Prigi memberikan fasilitas dasar pelabuhan perikanan sampai pada pemberian penyuluhan kepada masyarakat nelayan yang penting bagi masyarakat nelayan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat digambarkan, posisi peranan dari PPN Prigi terhadap masyarakat Nelayan. Bahwa PPN Prigi menjadi titik tengah bagi nelayan, pedagang, pengusaha jasa, dan investor.



Gambar 9. Diagram Titik Sentral PPN Prigi

Sumber: Olahan Penulis, 2014

PPN prigi memiliki peranan yang strategis dalam pengembangan perikanan dan kelautan, yaitu sebagai penghubung antara nelayan dengan pengguna hasil tangkapan. Pada dasarnya PPN yang dapat berfungsi dengan baik akan menjadikan titik temu (*terminal point*) yang menguntungkan bagi kegiatan ekonomi dilaut dengan kegiatan ekonomi didarat. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan pada PPN Prigi dan masyarakat nelayan, menunjukkan bahwa peranan PPN Prigi sangat besar bagi perkembangan masyarakat nelayan yang ada di Pesisir Prigi. Peranan tersebut adalah masyarakat nelayan mendapatkan fasilitas operasional dari PPN Prigi yang berupa sarana dan prasarana dan keamanan dalam berkerja. Berikut peranan dari PPN Prigi berdasarkan penelitian dan data lapangan yang di temukan oleh peneliti, yakni sebagai berikut:

Tabel 16. Peranan PPN Prigi Terhadap Masyarakat Nelayan

| Peran PPN | Bentuk / kegiatan | Tujuan |
|---|---|---|
| 1. Sebagai penyedia fasilitas perikanan | a. Dermaga / Kolam Labuh b. SPDN c. Perbengkelan d. TPI e. Tempat Pengepakan Ikan f. Lokasi pemasaran ikan | Mempermudah operasional dari nelayan |
| 2. Sebagai magnet untuk Investor | a. Telah masuknya Pabrik Tepung Ikan. b. Pabrik Ikan c. SPBN d. SPBU e. Pengusaha Perikanan | a. Mempermudah penjualan hasil perikanan. b. Mempermudah nelayan dalam pembelian bahan bakar. c. Penyedia lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. |
| 3. Sebagai tempat penyuluhan perikanan kepada nelayan | a. Penyuluhan, sosialisasi tentang perikanan, kelengkapan dokumen kapal perikanan dan peraturan pemerintah yang berlaku b. Pelatihan istri – istri nelayan dalam pengelolaan hasil perikanan | a. Nelayan mendapatkan pengetahuan lebih terkait perikanan, cara penangkapan, penanganan (manajemen penanganan ikan), serta mengerti dan taat aturan pemerintah yang berlaku b. Membantu untuk memberdayakan istri – istri nelayan dengan pengelolaan hasil perikanan dengan nilai jual yang lebih tinggi. |
| 4. Sebagai pusat perekonomian dan industri perikanan | Terjadinya kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli | a. Dapat menjaring tenaga kerja, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. b. Terbentuknya sentra perikanan |

Sumber : Olahan Penulis, 2014

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dengan adanya pembangunan pelabuhan perikanan, Yakni PPN Prigi dapat dikatakan sangat berperan aktif dalam

pengembangan sektor perikanan dan pengembangan SDM masyarakat nelayan. Hal ini terlihat bahwa dengan adanya pengembangan pelabuhan masyarakat nelayan merasa terbantu oleh adanya pelabuhan. Dan dengan adanya pelabuhan perikanan pendapatan nelayan menjadi lebih baik yang berdampak kepada kesejahteraan keluarga maskara nelayan. Serta masyarakat nelayan merasa di perhatikan oleh pemerintah hal ini terlihat pada kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh PPN Prigi dalam usahanya untuk mengembangkan sektor perikanan serta mengembangkan SDM masyarakat nelayan.

Kegiatan - kegiatan atau program kerja yang dilakukan oleh PPN Prigi selalu berlandaskan pada *Grand Strategy* dan RENSTRA lima tahunan yang dimiliki oleh PPN Prigi. Dengan itu kegiatan atau program yang dilakukan oleh PPN Prigi akan sesuai sasaran dari pengembangan.

2. Startegi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara

Pengembangan industrialisasi perikanan Indonesia oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah dimulai sejak tahun 2012. Pengembangan industrialisasi ini dijalankan oleh 400 dari 816 pelabuhan perikanan di Indonesia yang dijadikan sebagai kawasan industrialisasi perikanan terpadu dengan tujuan mengembangkan industrialisasi perikanan yang ada di Indonesia. Dengan adanya pengembangan industrialisasi perikanan tersebut diharapkan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan bahkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan dan menekan angka kemiskinan melalui potensi sektor perikanan yang dimiliki oleh Indonesia.

Dalam mewujudkan industrialisasi tersebut, perhatian Kementerian Perikanan dan Kelautan sebagai motor mesin penggerak industrialisasi perikanan agar berjalan secara optimal. Maka terdapat 3 faktor yang menjadi penunjang industrialisasi perikanan, ketiga faktor tersebut adalah peningkatan nilai tambah, peningkatan produktivitas usaha dan efisiensi pemanfaatan sumber daya ikan (SDI). Keberhasilan pengembangan industrialisasi pada sektor perikanan tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pelabuhan perikanan. Sarana dan prasarana pelabuhan perikanan adalah sebagai penunjang akan peningkatkan produksi perikanan secara terpadu dengan unit pengelolaan yang terkait.

Dalam upaya untuk mewujudkan sektor industrialisasi sektor perikanan pasti terdapat pembangunan - pembangunan fisik yang menjadi faktor penentu untuk menyukseskan program sektor industrialisasi, yakni adalah pembangunan pelabuhan perikanan nusantara. PPN Prigi telah dibangun beberapa fasilitas pelabuhan sejak tahun 2003 dan akan berakhir pada tahun 2020 berdasarkan rencana *masterplan* PPN Prigi Tahun 2003. Yang dilakukan secara bertahap, yakni pada jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang atau pada tahap akhir pengembangan. Pengembangan pelabuhan ini menjadi sangat penting dan tidak dapat ditinggalkan, karena untuk menyukseskan program industrialisasi yang dibuat oleh Kementrian Perikanan dan Kelautan dibutuhkan kesiapan pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pelabuhan perikanan tersebut. Pada hal ini PPN Prigi dalam tahap pengembangan pelabuhan yang dimilikinya masih pada tahap pengembangan jangka panjang. Dimana PPN prigi untuk tahun 2014 masih melakukan tahap – tahap pembangunan

jangka panjang yang akan berakhir pada tahun 2020. Namun sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh PPN Prigi untuk saat ini telah mampu untuk melakukan serta menyukseskan Program industrialisasi sektor perikanan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan.

Dalam menyukseskan program Kementerian Perikanan dan Kelautan, yang dijalankan oleh UPT Kementerian Perikanan dan Kelautan yakni PPN Prigi dalam pengembangan industrialisasi perikanan maka strategi semakin diperlukan untuk menjalankan pengembangan – pengembangan tersebut. Berdasarkan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan PPN Prigi membuat RENSTRA lima tahunan yang bertujuan untuk melakukan pengembangan – pengembangan pada sektor perikanan serta pengembangan pada pelabuhan perikanan itu sendiri. RENSTRA Tersebut adalah (a) Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Ikan (SDI), (b) Penyediaan fasilitas yang memenuhi standar Internasional, (c) Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas operasional PPN Prigi, (d) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan (e) Pengembangan usaha perikanan tangkap dan pemberdayaan ekonomi nelayan dan pelaku ekonomi lainnya di PPN Prigi. Hal ini sesuai dengan konsep strategi menurut David (2009:19) menyebutkan bahwa strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang besar. Selain itu strategi mempengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan, biasanya untuk lima tahun ke depan, dan karenanya berorientasi ke masa yang akan datang. Telah disebutkan bahwa pelabuhan perikanan merupakan UPT dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau bisa disebut bahwa pelabuhan perikanan

adalah perusahaan BUMN milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan konsep strategi menurut David (2009) yang menyebutkan bahwa strategi dibuat untuk lima tahun ke depan dan berorientasi ke masa yang akan datang, demikian juga RENSTRA yang telah dibuat oleh PPN Prigi untuk jangka waktu lima tahun ke depan yang mengarah kepada masa yang akan datang dalam mengembangkan industrialisasi sektor perikanan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat nelayan. Berdasarkan konsep strategi dari David (2009) dalam mengembangkan suatu pengembangan memerlukan keputusan – keputusan yang dapat mempengaruhi berkembang untuk masa depan dengan membuat strategi dalam jangka panjang yakni yang dilakukan oleh PPN Prigi adalah membuat RENSTRA lima tahunan yang dijadikan pedoman untuk melakukan kegiatan – kegiatan pada setiap tahunnya.

PPN Prigi dalam pengembangan industrialisasi perikanan serta pengembangan instansi keduanya memerlukan strategi yang tepat. Karena pengembangan industrialisasi sektor perikanan harus sejalan dengan pengembangan instansi pelabuhan perikanan tersebut atau dengan kata lain pengembangan industrialisasi dan pengembangan instansi pelabuhan perikanan saling berkaitan satu dengan lainnya. Dalam pengembangan industrialisasi sektor perikanan, PPN Prigi melakukan beberapa kegiatan berdasarkan RENSTRA PPN Prigi yang bisa dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PPN Prigi adalah sebuah strategi pengembangan.

(a) Peningkatan sumber daya manusia

Berdasarkan hasil penelitian, dengan beberapa sumber strategi yang dilakukan oleh PPN Prigi yang pertama adalah mengubah pola pikir masyarakat nelayan, dengan strategi mengubah pola pikir masyarakat nelayan diharapkan dengan perubahan pola pikir yang baik optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan dapat dimanfaatkan dengan optimal. Karena untuk pemanfaatan SDI secara optimal diperlukan pelaku – pelaku yakni nelayan yang memiliki kualitas yang baik. Serta armada yang mampu menjelajah untuk beberapa hari dalam usaha penangkapan dan optimalisasi sumber daya ikan yang ada. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap narasumber yang menjelaskan bahwa strategi yang utama diambil oleh PPN Prigi adalah proses pengubah pola pikir masyarakat yang bisa dikatakan pola pikir yang masih tradisional. Oleh karena itu strategi yang dilakukan oleh PPN adalah mendekati diri kepada masyarakat nelayan dimana masyarakat nelayan merupakan objek dari pengembangan sektor industrialisasi sektor perikanan.

Untuk mewujudkan strategi tersebut PPN Prigi menggunakan cara jemput bola dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat nelayan. Dan menagajak masyarakat nelayan untuk duduk bersama mencari solusi – solusi yang diperlukan oleh masyarakat nelayan. Saat ini PPN prigi telah mempunyai balai penyuluhan yakni POS Pelayanan Penyuluhan Perikanan Kawasan Minapolitan Prigi dengan adanya fasilitas tersebut dapat

terjadinya hubungan yang baik antara nelayan dan PPN Prigi selaku perwakilan dari pemerintah.

Berdasarkan data lapangan strategi yang diambil oleh PPN Prigi yakni proses merubah pola pikir adalah strategi untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat nelayan. Dengan mengubah pola pikir masyarakat nelayan, maka masyarakat nelayan akan mudah untuk dibawa ke arah yang lebih maju dengan kualitas SDM yang memadai. Kerana untuk menyukseskan industrialisasi serta mengoptimalkan sumber daya ikan untuk meningkatkan kualitas masyarakat belayan perlu adanya kualitas SDM yang memadai yang memiliki nilai lebih. Sehingga strategi utama dalam mengembangkan pelabuhan perikanan yang diambil oleh PPN Prigi adalah merubah pola pikir , karena merubah pola pikir merupakan gerbang bagi kemajuan kualitas dari masyarakat nelayan.

Berdasarkan data lapangan dapat diketahui pada tabel berikut, kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh PPN Prigi dalam upaya meningkatkan kualitas SDM masyarakat nelayan, sebagai berikut.

Tabel 17. Kegiatan yang dilakukan oleh PPN Prigi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia

| Nama Kegiatan | Jenis Kegiatan | Tujuan |
|---|---|---|
| Penyuluhan terkait dengan dokumen | Pengawasan dokumen kapal | a. Kapal – kapal mendapat legalisasi sesuai peraturan pemerintah b. Keamanan dalam pelayaran |
| Penyuluhan terkait dengan hasil tangkapan | a. Melakukan pengawasan mutu hasil perikanan. b. Melakukan pendampingan dalam manajemen rantai dingin. c. Melakukan pelatihan kepada istri – istri nelayan tentang pengelolaan hasil perikanan. | a. Menjamin kualitas hasil perikanan, dan terhindar dari bahan yang berbahaya. b. Menjamin kualitas hasil tangkapan pada saat di laut hingga ke konsumen. c. Memberikan lapangan kerja kepada istri – istri nelayan serta memberikan nilai jual pada hasil perikanan. |

Sumber : Olahan Penulis, 2014

Berdasarkan tabel diatas, merupakan upaya pengembangan dari PPN Prigi untuk melakukan optimalisasi sumber daya ikan (SDI). Dengan cara memberikan penyuluhan baik, penyuluhan terkait peraturan – peraturan yang berlaku serta penyuluhan cara penangkapan dan pemanfaatan SDI yang ada. Dengan seperti ini optimalisasi sumber daya ikan dapat di optimalkan, karena nelayan sebagai pelaku penangkapan sumber daya ikan memiliki kemampuan yang terus ditingkatkan demi mengoptimalkan sumber daya ikan yang ada. Dengan cara mengubah pola pikir dari masyarakat nelayan yang sebagian

besar hal ini menjadi perhatian lebih dari pihak PPN Prigi. Dengan kata lain merubah pola pikir masyarakat nelayan menjadi modern maka akan adanya pemikiran akan usahanya untuk mengoptimalkan sumber daya ikan yang ada. Sehingga untuk mengoptimalkan sumber daya ikan (SDI) diperlukan peningkatan pada pelaku penangkapan ikan yakni nelayan, dengan cara memberikan penyuluhan peraturan – peraturan, cara penangkapan, cara penanganan hasil perikanan mulai dari laut sampai didaratkan di TPI (tempat pelelangan ikan). Oleh karena itu pada peningkatan sumber daya manusia merupakan strategi awal untuk meningkatkan serta optimalisasi sumber daya ikan (SDI) di perairan yang ada.

(b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Selain strategi dalam peningkatan SDM yakni masyarakat nelayan dalam mewujudkan industrialisasi perikanan, yang bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan (SDI), selanjutnya pada peningkatan sarana dan prasana pelabuhan perikanan nusantara prigi yakni yang berujuan untuk menyediakan fasilitas yang memenuhi standar internasional, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas operasional, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan usaha perikanan tangkap dan pemberdayaan ekonomi nelayan dan pelaku ekonomi lainnya. Oleh karena itu dalam sup bab ini akan dijelaskan sebagai berikut:

(1) Penyediaan Fasilitas Yang Memenuhi Standar Internasional.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk penyediaan fasilitas yang memenuhi standar internasional, pihak PPN Prigi telah menyiapkan lahan untuk penyediaan investasi seluas 38.831 m², dengan penyediaan lahan dengan luas 38.831 m² diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendirikan fasilitas – fasilitas yang memenuhi standar internasional yang dibangun oleh pihak investor, terutama pada bidang atau fasilitas, *Docking*, Wisata Bahari, *Cold Storage*, SPBB/SPBN, Pabrik Es, Dermaga untuk kapal >30 GT. Penyediaan lahan tersebut disediakan untuk para investor untuk dapat membangun serta memberikan kontribusinya untuk peningkatan nelayan, khususnya keberdayaan masyarakat nelayan sehingga nelayan yang ada menjadi lebih berdaya dengan adanya fasilitas – fasilitas yang memenuhi standar internasional. Namun untuk saat ini penyediaan lahan tersebut masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan hasil penelitian serta pengamatan langsung pada lahan seluas 38.831 m² masih sedikit yang telah dibangun oleh pihak investor yakni pembangunan SPBN dan *cold storage*.

(2) Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Operasional PPN Prigi

Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas merupakan cara untuk memperlancar aktifitas perikanan tangkap yang ada di PPN Prigi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemeliharaan dan

pbaikan fasilitas yang ada di PPN Prigi dilakukan secara rutin pada setiap tahun anggarannya. Seperti pemeliharaan fasilitas tempat pendaratan ikan serta tempat pelelangan ikan yang pada setiap tahun dilakukan pemeliharaan dan perbaikan. Pada tahun 2013 PPN Prigi melakukan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana pelabuhan perikanan yang dimiliki, antara lain adalah:

- (a)Pembangunan Jembatan *Jetty* (Untuk operasional persiapan perbekalan kapal – kapal besar yang bersandar).
- (b)Pembangunan lampu *Solar Cell*.
- (c)Peningkatan akses jalan masuk Pelabuhan Periknanan.
- (d)Pembangunan gedung kantor Kesyabandaran.
- (e)Pemeliharaan, *Cold storage*, Tower air, instalasi listrik dan air.

Sehingga dengan adanya pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana atau fasilitas yang dimiliki oleh PPN Prigi. Aktivitas perikanan tangkap yang ada tidak terganggu akibat rusaknya atau tidak berfungsinya sarana atau fasilitas yang disediakan oleh PPN Prigi. Sehingga aktivitas perikanan tangkap serta perekonomian yang ada di PPN Prigi tetap terjaga aktivitasnya dengan baik.

Selain pemeliharaan dan perbaikan fasilitas secara rutin, PPN Prigi mengembangkan sarana dan prasarana sebagai pendukung terwujudnya program industrialisasi oleh Kementerian Kelautan dan

Perikanan. Kegiatan pertama adalah kegiatan penyebaran dan respons balik peta daerah penangkapan, dimana kegiatan ini memberikan informasi kepada nelayan lokasi atau titik ikan berkumpul. Hal ini merupakan kegiatan yang bisa dikatakan penting karena, dalam kegiatan ini PPN Prigi memberikan peta *fishing ground* atau peta penangkapan ikan yang disampaikan kepada nelayan. Dan PPN Prigi dalam hal ini berkerja sama dengan pihak yang terkait yakni Badan Riset Kelautan dan Perikanan yang setiap minggunya terus dilakukan pembaruan data. Namun pada perkembangannya peta *fishing ground* masih belum dapat dimanfaatkan dengan optimal. Karena kurangnya pemahaman untuk mengoperasikan peta tersebut. Berdasarkan data lapangan yang ada menyebutkan bahwa peta *fishing ground* belum dapat dimanfaatkan secara optimal, hal ini dikarenakan oleh beberapa alasan yakni, belum mampunya kapal – kapal perikanan yang dimiliki oleh nelayan untuk menembus ZEEI, keterbatasan kemampuan ini yang menjadikan peta *fishing ground* belum dapat dimanfaatkan dengan optimal berdasarkan data lapangan PPN Prigi masih belum tersedianya kapal dengan kapasitas 30 GT dan selama ini yang mendominasi baru kapal – kapal dengan ukuran dibawah 30 GT serta masyarakat melakukan penangkapan perikanan dengan cara satu hari penangkapan atau setara dengan kurang lebih 6 jam penangkapan atau dapat disebut *one day fishing*.

Selanjutnya alasan peta *fishing ground* belum termanfaatkan dengan optimal, kapal – kapal nelayan sebagian besar belum terlengkapai dengan alat – alat pendukung pelayaran, seperti peta perairan, GPS, yang menyebabkan peta tidak termanfaatkan secara optimal dan hal ini mempengaruhi ketepatan untuk sampai pada lokasi yang telah ditentukan. Alasan terakhir adalah belum terampilnya para nakhoda kapal dalam membaca data – data secara tepat dari peta *fishing ground*. Ketiga alasan ini yang menyebabkan pera *fishing ground* belum termanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu dalam pengembangannya nelayan masih menentukan lokasi penangkapan sesuai dengan arus dan musim ikan yang ada, hal ini mengakibatkan hasil tangkapan dari nelayan tidak bisa optimal di setiap penangkapannya. Selanjutnya strategi yang dilakukan oleh PPN Prigi adalah pelaksanaan Pembinaan Mutu. Pembinaan mutu, ini merupakan faktor dari penentuan keamanan serta kualitas nilai jual hasil perikanan. Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan yang ada di PPN Prigi dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Pengembangan sarana dan prasarana PPN Prigi

| Jenis Pengembangan | Tujuan | Realisasi |
|---|---|--|
| Pemeliharaan rutin fasilitas pelabuhan perikanan | Untuk menjaga kualitas fasilitas pelabuhan perikanan. | Pemeliharaan terkendala dengan dana. |
| Pembangunan SPBN oleh investor. | Menambah jumlah kuota akan bakar untuk nelayan | Untuk sebagian nelayan kuota yang ada masih dirasa kurang. |
| Normalisasi sungai wancir yang dilakukan bersama pemerintah daerah. | Untuk tempat perbaikan kapal perikanan yang rusak. | Normalisasi sungai wancir, belum optimal. |

Sumber: Olahan Penulis, 2014

(3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Kelembagaan pelabuhan perikanan yang masih menjadi UPT pusat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk saat ini telah ada penataan secara umum yang terlihat pada penyesuaian tugas pokok dan fungsi pelabuhan perikanan. Dengan melakukan penataan lebih lanjut untuk kapasitas kelembagaan antara lain, Status hukum, kewenangan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta pemberdayaan lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut PPN Prigi telah memiliki status hukum, tugas pokok dan fungsi yang telah jelas, oleh karena itu untuk meningkatkan kelembagaan yang ada di PPN Prigi, PPN Prigi melakukan koordinasi kepada instansi yang terkait pada bidang perikanan tangkap, antara lain bekerja sama atau melakukan koordinasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan, Karantina ikan, Depkes, Polri, TNI

AL, ADPE, BAPEDALDA, P2SDKP, Bea Cukai dengan melakukan koordinasi tersebut kelembagaan PPN Prigi telah mempunyai kewenangan, tugas dan fungsinya untuk melakukan kerja sama bidang perikanan untuk meningkatkan industrialisasi perikanan serta keamanannya.

(4) Pengembangan usaha perikanan tangkap dan pemberdayaan ekonomi nelayan dan pelaku ekonomi lainnya.

Telah disebutkan, keberadaan pelabuhan perikanan harus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di mana pelabuhan perikanan tersebut berada. Yang diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, dan menjadikan masyarakat menjadi berdaya dalam usahanya untuk mengoptimalkan potensi hasil perikanan, berdasarkan hasil penelitian, usaha untuk pengembangan usaha perikanan pihak PPN Prigi telah mengadakan pelatihan pengelolaan hasil perikanan yang diharapkan akan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya istri – istri nelayan untuk lebih berdaya dalam mengelola hasil perikanan tangkap menjadi hasil olahan yang lebih modern dan memiliki nilai jual seperti pembuatan nugget, sozis ikan, kerupuk dan olahan lainnya yang berasal dari ikan. Sehingga usaha tersebut mampu untuk mengembangkan usaha perikanan serta memberdayakan istri – istri nelayan, yang pada hasil akhir akan berdampak pada peningkatan ekonomi baik kepada para pengelola hasil

perikanan atau pelaku usaha lainya seperti pedagang – pedagang jajanan khas yang ada di sekitar wilayah PPN Prigi. Sebagaimana tujuan pelabuhan perikanan didirikan yakni bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan serta memberdayakan masyarakat nelayan dalam memanfaatkan potensi perikanan yang ada.

3. Analisi Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Acaman Dalam Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Berdasarkan penyajian data yang telah disebutkan terdahulu dalam penyajian data untuk menentukan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*theats*) dalam strategi pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi peneliti memulai dengan mengidentifikasi faktor – faktor apa saja yang menjadi faktor pendukung dan pengahambat baik internal maupun eksternal yang pada akhirnya dapat ditemukan poin – poin dalam menentukan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*theats*). Faktor – faktor yang terdapat dalam pengembangan PPN Prigi didapat dari hasil wawancara terhadap beberapa responden yang ada di PPN Prigi, UPTD yang bertugas di TPI, beberapa responden dari masyarakat nelayan disekitar kawasan PPN Prigi, studi pustaka, laporan – laporan akhir tahun PPN Prigi dan RENSTRA lima tahunan PPN Prigi. Sehingga dapat diketahui faktor – faktor yang mempengaruhi pengembangan dari PPN Prigi dalam upayannya untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, sehingga dapat

diketahui faktor – faktor SWOT yang telah terdahulu pada penyajian data. Faktor – faktor tersebut sebagai berikut:

Tabel 19. Kerangka Analisis SWOT

| Kekuatan (<i>Strengths</i>) | Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) |
|---|---|
| (1) Potensi sumber daya perikanan. (2) Komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan sektor perikanan. (3) Tersedianya SDM dalam jumlah yang memadai. (4) Tersedianya sarana dan prasarana yang terus berkembang. (5) Tersedianya prasarana pengawasan perikanan di PPN Prigi. | (1) Kemampuan nelayan yang belum memadai dalam manajemen hasil tangkapan perikanan. (2) Terdapat beberapa fasilitas yang belum dibangun di PPN Prigi. (3) Terbatasnya biaya pemeliharaan. (4) Belum adanya layanan satu atap terkait pengurusan dokumen kapal dan perijinan usaha di PPN Prigi. (5) Belum optimalnya informasi perikanan. (6) Terbatasnya BBM yang ada di kawasan PPN Prigi. |
| Peluang (<i>Opportunities</i>) | Ancaman (<i>Theats</i>) |
| (1) Kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan investasi. (2) Penguatan nilai tukar rupiah dapat mendorong nilai ekspor dan penerimaan devisa. (3) Meningkatnya kesadaran konsumen akan pangan dari perikanan. (4) Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat nelayan. (5) Terciptanya inovasi baru dalam pengelolaan hasil perikanan yang lebih modern. | (1) Kebijakan pemerintah dalam penentuan harga BBM. (2) Tidak tersedianya modal operasional nelayan. (3) Maraknya <i>Illegal, Unreported Unregulated (IUU) Fishing</i> (4) Pengusahaan perikanan masih di dominasi oleh nelayan tradisional dengan skala kecil dan terbatas pada perairan pantai. (5) Rendahnya kualitas SDM perikanan atau nelayan. (6) Rendahnya tingkat pendidikan nelayan. (7) Rendahnya kualitas mutu hasil perikanan. |

Sumber: Olahan Penulis, 2014

Setelah mengidentifikasi faktor – faktor kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang telah terkelompokan diatas, maka dilanjutkan dengan memberikan bobot dan nilai rating

pada faktor faktor strategi internal (IFAS) dan strategi eksternal (EFES). Yang pemberian bobot dan nilai rating yang akan diketahui nilai dari bobot x nilai rating, berikut tabel penentuan bobot dan nilai rating IFAS dan EFES:

Tabel 20. IFAS

| Faktot – Faktor Strategi Internal | Bobot | Rating | Bobot x Rating |
|---|--------------|---------------|-----------------------|
| Kekuatan: | | | |
| (1) Potensi sumber daya perikanan. | 0.15 | 3 | 0.45 |
| (2) Komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan sektor perikanan. | 0.15 | 4 | 0.60 |
| (3) Tersedianya SDM dalam jumlah yang memadai. | 0.08 | 4 | 0.32 |
| (4) Tersedianya sarana dan prasarana yang terus berkembang. | 0.05 | 4 | 0.20 |
| (5) Tersedianya prasarana pengawasan perikanan di PPN Prigi. | 0.05 | 4 | 0.20 |
| Kelemahan: | | | |
| (1) Kemampuan nelayan yang belum memadai dalam manajemen hasil tangkapan perikanan. | 0.15 | 4 | 0.60 |
| (2) Terdapat beberapa fasilitas yang belum dibangun di PPN Prigi. | 0.05 | 3 | 0.15 |
| (3) Terbatasnya biaya pemeliharaan. | 0.06 | 3 | 0.18 |
| (4) Belum adanya layanan satu atap terkait pengurusan dokumen kapal dan perijinan usaha di PPN Prigi. | 0.08 | 4 | 0.32 |
| (5) Belum optimalnya informasi perikanan. | 0.08 | 3 | 0.24 |
| (6) Terbatasnya BBM yang ada di kawasan PPN Prigi. | 0.10 | 3 | 0.30 |
| Total Bobot dan Bobot x Rating | 1.00 | | 2.51 |

Sumber: Olahan Penulis, 2014

Dimana dalam pemberian bobot pada tabel IFAS dengan nilai bobot maksimal 1.00 yang memiliki arti sangat penting dan bobot terendah dengan nilai 0.0 yang berarti memiliki bobot nilai tidak penting. Angka kekuatan dengan rating 4 yang berarti *outstanding* dan angka rating 1 yang berarti *opor*. Dan kebalikannya untuk

kelemahan rating 1 jika memiliki kelemahan yang besar dan rating 4 memiliki kelemahan dibawah rata – rata.

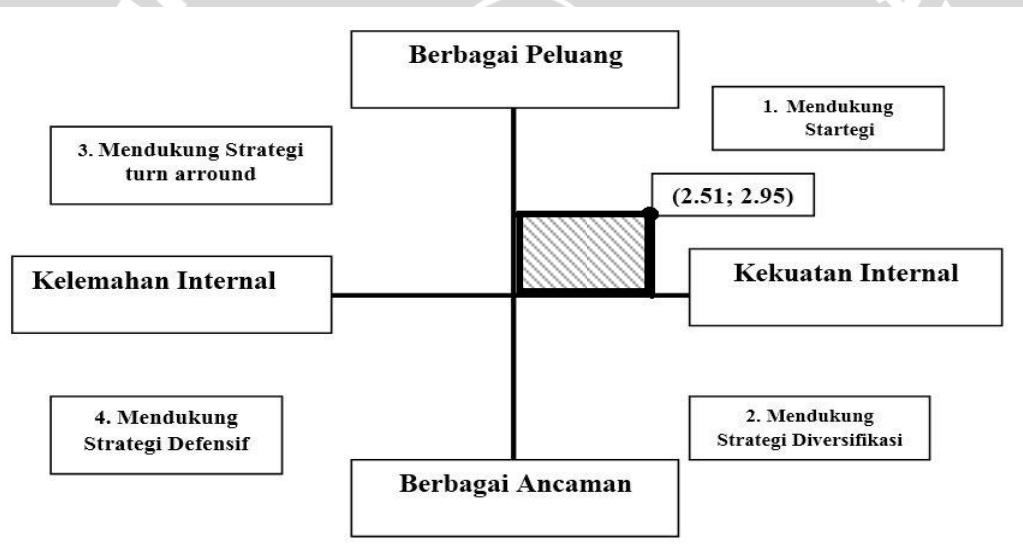
Tabel 21. EFAS

| Faktot – Faktor Strategi Eksternal | Bobot | Rating | Bobot x Rating |
|--|--------------|---------------|-----------------------|
| Peluang: | | | |
| (1) Kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan investasi. | 0.20 | 4 | 0.80 |
| (2) Penguatan nilai tukar rupiah dapat mendorong nilai ekspor dan penerimaan devisa. | 0.15 | 3 | 0.45 |
| (3) Meningkatnya kesadaran konsumen akan pangan dari perikanan. | 0.10 | 3 | 0.30 |
| (4) Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat nelayan. | 0.15 | 4 | 0.60 |
| (5) Terciptanya inovasi baru dalam pengelolaan hasil perikanan yang lebih modern. | 0.10 | 4 | 0.40 |
| Ancaman: | | | |
| (1) Kebijakan pemerintah dalam penentuan harga BBM. | 0.03 | 2 | 0.06 |
| (2) Tidak tersedianya modal operasional nelayan. | 0.02 | 2 | 0.04 |
| (3) Maraknya Illegal, Unreported Unregulated (IUU) Fishing. | 0.05 | 1 | 0.05 |
| (4) Pengusahaan perikanan masih di dominasi oleh nelayan tradisional dengan skala kecil dan terbatas pada perairan pantai. | 0.05 | 2 | 0.10 |
| (5) Rendahnya kualitas SDM perikanan atau nelayan. | 0.05 | 1 | 0.05 |
| (6) Rendahnya tingkat pendidikan nelayan. | 0.05 | 1 | 0.05 |
| (7) Rendahnya kualitas mutu hasil perikanan. | 0.05 | 1 | 0.05 |
| Total Bobot dan Bobot x Rating | 1.00 | | 2.95 |

Sumber: Olahan Penulis, 2014

Dimana dalam pemberian bobot pada tabel EFAS dengan nilai bobot maksimal 1.00 yang memiliki arti sangat penting dan bobot terendah dengan nilai 0.0 yang berarti memiliki bobot nilai tidak penting. Angka peluang dengan rating 4 yang berarti *outstanding* dan angka rating 1 yang berarti *opor*. Dan kebalikanya untuk ancaman rating 1 jika memiliki ancaman sangatbesar dan rating 4 memiliki ancaman

yang sedikit. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 21: IFAS dan tabel 22: EFAS. Maka total Bobot x Rating IFAS memiliki total nilai sebesar 2.51 dan total Bobot x Rating EFES memiliki total nilai sebesar 2.95. yang berarti posisi diagram strategi pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan yang ada di Pesisir Prigi berada pada kuadrat 1 dengan koordinat diagram (2.51; 2.95) posisi strategi pengembangan PPN Prigi dapat dilihat pada diagram berikut dilihat pada gambar diagram berikut:



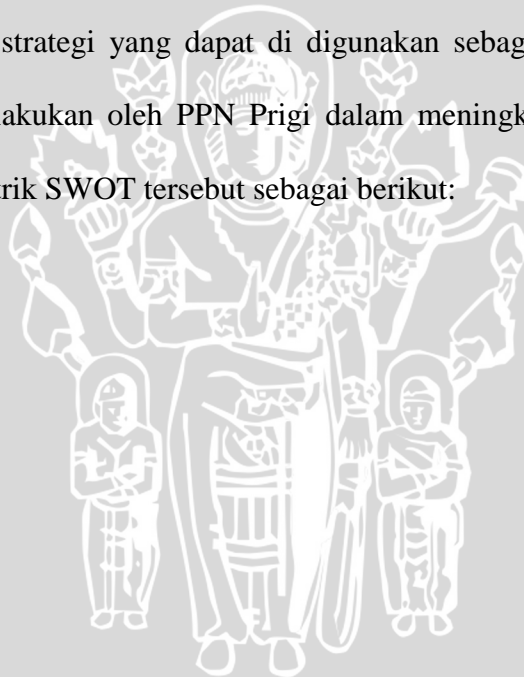
Gambar 10. Diagram Strategi Pengembangan PPN Prigi

Sumber: Olahan Penulis, 2014

Dimana pada posisi kuadran 1 dalam diagram analisis SWOT merupakan situasi yang menguntungkan PPN Prigi tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga PPN Prigi dapat memanfaatkan peluang yang ada di yang ada pada faktor eksternal. Sehingga strategi yang harus ditetapkan lebih lanjut dalam kondisi

pengembangan PPN Prigi ini adalah mendukung kebijakan – kebijakan pertumbuhan yang bersifat agresif (*growth oriented strategy*).

Selanjutnya matriks SWOT digunakan untuk menyusun faktor – faktor strategis pengembangan PPN Prigi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Dimana dalam Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dapat oleh PPN Prigi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Dalam matrik ini dapat menghasilkan 4 kemungkinan alternatif strategi yang dapat di digunakan sebagai alternatif strategi pengembangan yang dilakukan oleh PPN Prigi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, matrik SWOT tersebut sebagai berikut:



Tabel 22: Matrik SWOT

| | | |
|---|---|---|
| <p>Faktor Internal</p> <p>Faktor Eksternal</p> | <p>Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi sumber daya perikanan. 2. Komitmen pemerintah pusat dan daerah. 3. Tersedianya SDM dalam jumlah yang memadai. 4. Tersedianya sarana dan prasarana yang terus berkembang. 5. Tersedianya prasarana pengawasan di PPN Prigi. | <p>Kelemahan (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan nelayan yang belum memadai dalam memanajemen hasil tangkapan perikanan. 2. Terdapat beberapa fasilitas yang belum dibangun di PPN Prigi. 3. Terbatasnya biaya pemeliharaan. 4. Belum adanya layanan satu atap terkait pengurusan dokumen kapal dan perijinan usaha di PPN Prigi. 5. Belum optimalnya informasi perikanan. 6. Terbatasnya BBM yang ada di kawasan PPN Prigi. |
| | <p>Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan investasi. 2. Penguatan nilai tukar rupiah dapat mendorong nilai ekspor dan penerimaan devisa. 3. Meningkatnya konsumen yang sadar akan pangan dari perikanan. 4. Terciptanya inovasi baru dalam pengelolaan hasil perikanan yang lebih modern. | <p>SO</p> <ul style="list-style-type: none"> o Menciptakan pusat pertumbuhan industri sektor perikanan o Meningkatkan peran serta pelayanan PPN Prigi kepada pengusaha perikanan di kawasan sekitar pelabuhan perikanan. |
| <p>Ancaman (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pemerintah pusat dalam penentuan harga BBM subsidi. 2. Tidak tersedianya modal operasional nelayan. 3. Maraknya <i>Illegal, Unreported Unregulated (IUU) Fishing</i>. 4. Pengusahaan perikanan masih di dominasi oleh nelayan tradisional dengan skala kecil dan terbatas pada perairan pantai. 5. Rendahnya kualitas SDM perikanan atau nelayan. 6. Rendahnya tingkat pendidikan nelayan. 7. Rendahnya kualitas mutu hasil perikanan. | <p>ST</p> <ul style="list-style-type: none"> o Optimalisasi potensi SDI di perairan pantai atau ZEEI. o Menyediakan fasilitas yang belum terbangun di PPN Prigi. o Pemeliharaan dan perbaikan secara berkala. o Peningkatan kelembagaan (bekerja sama dengan lembaga terkait dengan perikanan). o Penegakan aturan dan kedisiplinan. | <p>WT</p> <ul style="list-style-type: none"> o Meningkatkan pengawasan terhadap <i>IUU Fishing</i>. Serta menekan akibat dari <i>IUU Fishing</i>. o Pemberdayaan, penyuluhan, sosialisasi, dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM nelayan. o Peningkatan pengetahuan SDM akan pengusaha, pemasaran dan permodalan perikanan. |

Sumber: Olahan Penulis, 2014

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya mengenai Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Dalam Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Kabupaten Trenggalek). Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi terhadap masyarakat nelayan sudah dapat dikatakan bahwa PPN Prigi berperan aktif membantu memberdayakan masyarakat nelayan Pesisir Prigi. Dapat dilihat dengan adanya pembangunan pelabuhan perikanan yang menjadi sentra aktivitas perekonomian sektor perikanan di wilayah Pesisir Prigi. Peranan PPN Prigi terhadap nelayan dapat dilihat dengan pembangunan – pembangunan fasilitas yang tersedia di PPN Prigi yang diperuntukan untuk mempermudah operasional dari nelayan. Seperti pembangunan kolam labuh, dermaga, jembatan jetty, TPI, *cold storage*, pabrik tepung ikan, pabrik es, stasiun pengisian bahan bakar, bengkel, pelayanan penyuluhan perikanan baik kepada nelayan maupun kepada istri nelayan secara keseluruhan peran pelabuhan perikanan dalam pemenuhan fasilitas sudah dapat dikatakan terpenuhi. Dan secara peranan PPN Prigi juga membantu dalam mengupayakan pemberdayaan untuk masyarakat nelayan seperti pengolahan hasil perikanan. Serta PPN Prigi memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat nelayan secara

umum dan PPN Prigi dapat dikatakan lebih aktif memperhatikan nelayan dari pada Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek.

2. Dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat nelayan, selain melaksanakan kegiatan yang pro kepada nelayan, kegiatan yang dilakukan PPN Prigi adalah penyuluhan perikanan yang di dalamnya merupakan upaya dari PPN Prigi untuk mengembangkan kualitas SDM nelayan menjadi lebih berkualitas dan memiliki daya saing yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan. Melaksanakan pengawasan kepada kapal – kapal perikanan. Melaksanakan kegiatan pengawasan hasil mutu perikanan yang bertujuan meningkatkan nilai jual. Melaksanakan pelatihan serta memberdayakan istri – istri nelayan dalam pengelolaan hasil perikanan yang lebih modern dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain kegiatan dari PPN Prigi yang berhubungan dengan SDM dalam upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat nelayan PPN Prigi juga meningkatkan sarana dan prasarana seperti penambahan penyediaan bahan bakar oleh SPBN oleh investor, normalisasi sungai untuk tempat perbaikan kapal perikanan dan pembangunan jembatan *jetty* untuk kapal – kapal 30GT. Yang secara keseluruhan di siapkan oleh PPN Prigi agar nelayan menjadi berdaya dan mandiri.
3. Meskipun dalam pengembangan PPN Prigi, ditemukan banyak berbagai hambatan. Namun dalam analisis SWOT yang dilakukan ditemukan faktor peluang dan ancaman dengan nilai sebesar 2.95 dan faktor

kekuatan dan kelemahan dengan nilai sebesar 2.51. Maka strategi yang dilakukan oleh PPN Prigi terletak pada kuadran 1 yang memiliki arti bahwa strategi yang digunakan adalah mendukung kebijakan – kebijakan pertumbuhan yang bersifat agresif.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya mengenai Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Studi Pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Kabupaten Trenggalek). Maka peneliti dapat memberikan saran serta masukan sebagai berikut:

1. Peran pelabuhan perikanan yang telah ada dan dapat berjalan dengan baik. Dapat lebih ditingkatkan lebih lanjut dan diperkuat pada sektor pengawasan hasil mutu perikanan serta manajemen penanganan ikan rantai dingin untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual dari hasil perikanan nelayan. Selanjutnya PPN Prigi lebih mengoptimalkan peranya sebagai penyuluh perikanan yang dilakukan secara berkala serta menambah jumlah petugas penyuluhan agar semua kelompok masyarakat dapat melayani dengan baik.
2. Dalam upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat nelayan untuk selanjutnya PPN Prigi lebih mengoptimalkan peranya sebagai pemberi layanan dan penyuluh perikanan yang dilakukan secara berkala serta menambah jumlah petugas penyuluhan agar semua kelompok masyarakat

dapat melayani dengan baik. Serta mempercepat pembangunan – pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat nelayan

3. Berdasarkan hasil analisis SWOT diketahui bahwa strategi PPN Prigi Berada pada kuadran 1 yakni mendukung strategi agresif. Oleh karena itu PPN Prigi dapat menggunakan kekuatan internal yang dimiliki untuk mengembangkan pelabuhan perikanan yang lebih kuat.
4. Sarana dan prasaran yang belum tersedia di PPN Prigi merupakan penghambat dalam mengembangkan pelabuhan perikanan, namun hal ini dapat diatasi dengan kerjasama antara PPN Prigi bekerja dan investor untuk membangun sarana dan prasarana yang belum ada di PPN Prigi.
5. Meningkatkan sinergi kelembagaan antara PPN Prigi, Perum PPS serta UPTD kabupaten. Dengan membangun layanan satu atap yang akhirnya akan mempermudah kerja dari pihak pemerintah serta mempermudah masyarakat khususnya masyarakat nelayan dalam mengurus dokumen – dokumen yang diperlukan.
6. Mengoptimalkan informasi perikanan kepada nelayan agar nelayan mengetahui informasi – informasi yang terbaru dan penting untuk masyarakat nelayan. Serta melaksanakan pelatihan kepada nelayan dalam membaca peta perairan dengan baik.
7. Menciptakan iklim usaha perikanan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten yang mendorong peningkatan investasi di wilayah PPN Prigi serta wilayah Kabupaten Trenggalek.

8. Menciptakan suatu usaha untuk memfasilitasi kelompok pengelola perikanan untuk mempromosikan hasil olahan perikanan yang lebih modern ke masyarakat luas. Dan mempromosikan sebagai olahan khas dari masyarakat Pesisir Pantai Prigi.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R., 2006. *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Allison, Michael, Kaye & Jude, 2004. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba: Pedoman Praktis dan Buku Kerja*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bashith, A., 2012. *Ekonomi Masyarakat Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi: Lemah*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Beni, G., Iwan, G. & Herman, H., 2012. Analisis Indeks Kinerja Pengelola dan Indeks Kepuasan Pengguna di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, Desember, Volume Volume 3, Nomor 4, pp. 151-163.
- Bryan, C. & White, L. G., 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- David, F. R., 2009. *Strategic Management, Manajemen Strategis Konsep*. Jakarta : Salemba Empat.
- Dimock, D. &, 1992. *Administrasi Negara: Terjemahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, 2010. *Pengentasan Dari Kemiskinan*. Jakarta : Kementerian Pendidikan Nasional.
- Emil, Y., Abdul, R. & Agus, S., 2013. Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Dasar dan Fungsional Dalam Strategi Peningkatan Produksi di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kota Tegal Jawa Tengah. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, Volume Volume 2, Nomor 1, pp. Hlm 56-65.
- Gretha Kaya, I. R., 2013. *Nelayan Sebagai Masyarakat Pesisir*. [Online] Available at: <http://gracelliaraystika.wordpress.com/2013/01/17/nelayan-sebagai-masyarakat-pesisir/> [Diakses 10 Januari 2014].
- Jauch, L. R. & Glueck, W. F., 1993. *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan (Edisi Ketiga)*. Jakarta : Erlangga.
- KAGHOO, M. S. 2010. *Teori Peran*. (Online) Available at: http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_peran [Diakses 3 Mei 2014].
- Kartasasmita, G., 1996. *Pemberdayaan Untuk Rakyat*. Jakarta: Cides.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor; KEP.10/MEN/2004 Tentang Kepelabuhan Perikanan.
- Kusnadi, 2000. *Nelayan, Strategi adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kusnadi, 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- LEMHANNAS, 1997. *Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Lukito, O., 2008. *Potensi Pesisir Selatan Jawa Timur*. [Online] Available at: <http://okilukito.wordpress.com/2008/09/22/potensi-pesisir-selatan-jawa-timur/> [Diakses 2 Januari 2014].
- Marzuki, 1977. *Metologi Riset*. Yogyakarta: BPDE-UI.

- Miles, B. M. & Huberman, A. M., 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Cetakan 1. Penerjemah Rohidi, T.R. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, L. J., 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H., 2003. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan: Dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, M., 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pasolong, H., 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2012. Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, 2013. Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai, 2011. *Kerjasama Badan Pemberdayaan Masyarakat Provisnsi Jawa Timur Dengan Pusat Inkubator Bisnis dn Pelayanan Masyarakat universitas Brawijaya Malang*. Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Jawa timur.
- Purwanti, P., 2010. *Model Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Sekala Kecil*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Pusapasari, G. R., 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Malang: Universitas Brawijaya.
- Rangkuni, F., 2005. *Analisis SWOT Teknik Membedah kasus Bisnis, Reorientasi Konsep Strategis Untuk Menghadapi Abad 21*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- RENSTRA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2010 - 2014.
- Riggs, F. W., 1986. *Administrasi Pembangunan (Batas - Batas, Strategi Pembangunan Kebijakan dan Pembaharuan Administrasi)*. Jakarta: Rajawali.
- Salusu, J., 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Siagian, P. S., 1983. *Admisnistrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Gunung Agung.
- Siagian, P. S., 1990. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Siagian, P. S., 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S., 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Ke-Empat penyunt. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharto, E., 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarnonugroho, T., 1984. *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: PT Hanindita.
- Suryono, A., 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang (UM Press).
- Suryono, A., 2006. *Ekonomi Politik Pembangunan Dalam Prespektif Teori Ilmu Sosial*. Malang: Universitas Negeri Malang (UM Press).

- Suryono, A., 2010. *Dimensi - Dimensi Prima teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Suud, M., 2006. *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Pustaka Publisher.
- Syamsi, I., 1986. *Pokok - Pokok Kebijakan Pemrograman Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Tjokwinoto, M., 2012. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tjokroamidjojo, B., 1974. *Pengantar Administrasi pembangunan*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Todaro, M. P., 1994. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Widodo, J. & Suadi, 2006. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wrihantnolo, R. R. & Dwidjowijoto, R. N., 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.





LAMPIRAN – LAMPIRAN



Pedoman Wawancara

1. Pelabuhan Perikanan Nusantara
 - a. Apa peran dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi bagi masyarakat nelayan secara umum?
 - b. Pengembangan apa yang telah dilaksanakan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dalam upaya memberdayakan masyarakat nelayan?
 - c. Program apa saja yang dilakukan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Trenggalek dalam upaya memberdayakan masyarakat nelayan?
 - d. Bagaimana pelaksanaan program – program pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tersebut?
 - e. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pengembangan tersebut?
 - f. Apa pengaruhnya pengembangan tersebut terhadap masyarakat nelayan?
2. Masyarakat Nelayan dan Paguyupan Nelayan
 - a. Bagaimana peran dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Trenggalek dalam memberdayakan masyarakat nelayan?
 - b. Bagaimana pengaruhnya pengembangan tersebut terhadap masyarakat nelayan?
 - c. Bagaimana fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi?



Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi



Gedung Tempat Pelelangan Ikan Timur



Gedung Tempat Pelelangan Ikan Barat



Kios – Kios Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi



Stasiun bahan bakar AKR - SPBN



Jembatan Jetty untuk Kapal 30 GT



Suasana Keberangkatan Nelayan Pesisir Prigi



Suasana Penimbangan Hasil Perikanan



Hasil Tangkapan Nelayan



Suasana Pengangkutan Hasil Perikanan



Suasana Pengepakan Oleh Pedagang



Suasana Penyaluran Perikanan di POS Penyaluran Perikanan PPN Prigi



Suasana Penyluhan Perikanan di POS Penyluhan Perikanan PPN Prigi





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227
E-mail: fia@ub.ac.id Website: <http://fia.ub.ac.id>

Program Studi: • Sarjana: - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan
- Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister: - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

Nomor : 3382/UN10.3/PG/2014
Lampiran : -
Hal : Riset / Survey
Kepada : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
Jl. Pantai Prigi, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo,
Kabupaten Trenggalek.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset / survey bagi mahasiswa :

Nama : Arie Dwi Purnomo
Alamat : RT.15 / RW.02, Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek
NIM : 105030103111005
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : -
Tema : Strategi Pengembangan
Lamanya : 2 (Dua) Bulan. 24 Maret – 9 Mei 2014
Peserta : 1 (Satu)

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Malang, 10 Maret 2014

a.n Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik



Choirul Saleh
Dr. Choirul Saleh. M.Si

NIP. 19600112 198701 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227
E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi: • Sarjana: - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan
- Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister: - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

Nomor : 3382/UN10.3/PG/2014
Lampiran : -
Hal : Riset / Survey
Kepada : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Trenggalek
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 1

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset / survey bagi mahasiswa :

Nama : Arie Dwi Purnomo
Alamat : RT.15 / RW.02, Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek
NIM : 105030103111005
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : -
Tema : Strategi Pengembangan
Lamanya : 2 (Dua) Bulan. 24 Maret – 9 Mei 2014
Peserta : 1 (Satu)

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Malang, 10 Maret 2014

a.n Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik



Choirul Saleh
Dr. Choirul Saleh, M.Si

NIP. 19600112 198701 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jln. HOS. Cokroaminoto No. 1 Telp. (0355) 796547
TRENGGALEK Kode Pos. 66316

Trenggalek, 17 Maret 2014

Kepada :

Yth. Sdr. 1. Kepala Bappeda;
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
3. Kepala BPS;
4. Kepala PPN Prigi;
5. Camat Watulimo;
Kab. Trenggalek
di

TRENGGALEK

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/KKN/KKL/PPL/PSG/PRAKERIN

Nomor : 072/ 319 /406.043/2014

MEMBACA : Surat dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nomor: 3382/UN10.3/PG/2014 tanggal 10 Maret 2014

NAMA PENANGGUNG JAWAB : Dr. CHOIRUL SALEH., M.SI

TEMA/ACARA SURVEY/KKN/
PPL/PSG : Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (PPN Prigi) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Studi Pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Kabupaten Trenggalek)

TUJUAN : Penelitian guna penyusunan Skripsi

LAMANYA SURVEY/KKN/KKL /
PPL/PSG : 24 Maret s/d 9 Mei 2014

TEMPAT DILAKUKAN SURVEY/
KKN/KKL/PPL/PSG : Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, BPS, PPN Prigi dan Kecamatan Watulimo

PENGIKUT/PESERTA SURVEY/
KKN/KKL/PPL/PSG : ARIE DWI PURNOMO

ALAMAT : RT. 015/ RW. 002 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek

LAIN-LAIN : 1. Wajib mentaati segala peraturan setempat dimana yang bersangkutan mengadakan kegiatan
2. Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan rencana/ proposal yang telah diajukan.
3. Selesai melakukan kegiatan, melaporkan hasil kegiatan secara tertulis kepada Bupati Trenggalek melalui Kepala Kantor Kosbangpol dan Linmas Kabupaten Trenggalek
4. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

a. n. KEPALA KANTOR KESBANGPOLLINMAS
KABUPATEN TRENGGALEK
Kasubbag. Tata Usaha

ISLAMIATI, S. Sop

Ponata

NIP. 19580406 198612 2 001

Tambahan Disampaikan Kepada :

Yth. 1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Univ. Brawijaya Malang;
2. Sdr. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI

Jalan Pantai Prigi, Trenggalek 66382 Jawa Timur
Telepon (0355) 551147, 551945, 551802 Fax. (0355) 551995

SURAT KETERANGAN
Nomor B. 1004/PPNP/TU.210/V/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang atas nama :

Nama : Arie Dwi Purnomo
NIM : 105030103111005
Jurusan : Administrasi Publik
Tema : Strategi Pengembangan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi..

benar-benar telah melaksanakan Riset / Survey pada tanggal 24 Maret sampai dengan 6 Mei 2014 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi,

Setelah menyusun laporan harap mengirim laporan ke Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Prigi, 6 Mei 2014

P/h. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Tembusan :
Kepala Kantor Kesbangpollinmas
Kabupaten Trenggalek.

CURRICULUM VITAE

Nama : Arie Dwi Purnomo

Nomor Induk Mahasiswa : 105030103111005

Tempat dan tanggal lahir : Trenggalek, 26 Januari 1991

Alamat : Dsn. Ketawang, RT/RW 015/002,
Ds. Tasikmadu, Kec. Watulimo

Pendidikan : SD Tamat Tahun...2004

SMP Tamat Tahun...2007

SMA Tamat Tahun...2010

Perguruan Tinggi Tamat Tahun...2014

